



Development of a Gender Concept for the Forests and Climate Change Programme (FORCLIME) in Indonesia

Pengembangan Konsep Gender untuk Program Hutan dan Perubahan Iklim (FORCLIME) di Indonesia

Published by:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Forests and Climate Change Programme (FORCLIME)

Manggala Wanabakti Building, Block VII, 6th Floor

Jln. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270, Indonesia

Tel : +62 (0)21 572 0212, +62 (0)21 572 0214

Fax : +62 (0)21 572 0193

Website:

www.forclime.org

In Cooperation with:

Ministry of Forestry

Authors:

Eva Engelhardt and Rahmina

Distributed by:

FORCLIME

Design, Layout and Printing:

SunsetMedia|Creative Studio

Jakarta, January 2011

Development of a Gender Concept for the Forests
and Climate Change Programme (FORCLIME) in
Indonesia

Pengembangan Konsep Gender untuk Program
Hutan dan Perubahan Iklim (FORCLIME) di
Indonesia

Eva Engelhardt and Rahmina

January 2011

ACKNOWLEDGEMENT

We want to thank all team members and staff of FORCLIME in Jakarta and Samarinda for their hospitality and cooperation.

Thank you for your great support in connecting us to governmental and non-governmental agencies on national, provincial and district level, as well as organizing our trip to the Dayak people in Menua Sadap.

The research team for the Gender Analysis in Menua Sadap consisted of Anom Rahayu Asmara Trisna, Emina Nursita, Hery Gunawan, Heru Herlambang, Niken Wuri Handayani, Reski Udayanti and Dona Dorina.

Thanks to the research team which, after a short introductory training, went to a remote village and implemented their newly achieved skills.

And, finally, thanks to the people of Menua Sadap for their hospitality and patience answering questions.

Everyone provided valuable contributions in determining how gender aspects could be integrated into the community based forest management approaches supported by FORCLIME.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada:

Tim GIZ FORCLIME di Jakarta dan Samarinda atas keramahtamahan dan kerja samanya khususnya dalam memfasilitasi kami sehingga kami bisa berhubungan dengan berbagai lembaga pemerintah dan non pemerintah di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mendukung kelancaran perjalanan kami lokasi studi di desa Menua Sadap – Kab. Kapuas Hulu.

Tim studi untuk analisis gender di Menua Sadap yang terdiri dari: Sdri. Anom Rahayu Asmara Trisna, Sdri. Emina Nursita, Sdr. Hery Gunawan, Sdr. Heru Herlambang, Sdri. Niken Wuri Handayani, Sdri. Reski Udayanti, dan Sdri. Dona Dorina, yang telah mengikuti pelatihan pengantar tentang gender dan dengan penuh keseriusan telah menerapkan keterampilan baru yang mereka peroleh melalui praktek studi di desa Menua Sadap.

Seluruh warga Menua Sadap atas keramahtamahan dan kesabaran mereka menjawab pertanyaan serta memberikan berbagai dukungan sehingga kegiatan studi berjalan lancar.

Setiap orang yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi pemikiran yang sangat berharga dalam upaya pengintegrasian aspek gender ke dalam pendekatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang didukung oleh FORCLIME.

TABLE OF CONTENTS

DAFTAR ISI

Executive Summary	xi
Ringkasan Eksekutif	xi
1 Introduction	1
1 Pendahuluan	1
2 Methodology	3
2 Metodologi	3
3 Gender aspects in Forestry and Nature Conservation and Climate Change	7
3 Aspek gender dalam Konservasi Kehutanan dan Alam serta Perubahan Iklim	7
4 Country specific Analysis	9
4 Analisis khusus di tingkat nasional	9
4.1 Indonesian Laws regarding Gender Equity and Gender Mainstreaming	9
4.1 Hukum Indonesia mengenai Kesenjangan Gender dan Pengarusutamaan Gender	9
4.2 State Ministry of Women Empowerment and Children Protection (MoWE)	11
4.2 Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MoWE)	11
4.3 Gender Mainstreaming in the Forestry Sector	12
4.3 Pengarusutamaan Gender di Sektor Kehutanan	12
5 Findings from Institutional Analysis	13
5 Temuan dari Analisis Kelembagaan	13
5.1 Gender Mainstreaming in the Ministry of Forestry at National level	13
5.1 Pengarusutamaan Gender di Kementerian Kehutanan pada tingkat Nasional	13
5.2 Implementation of Gender Mainstreaming at the Provincial level	15
5.2 Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada tingkat Provinsi	15
5.3 Gender Mainstreaming in the Forestry Department at District level	17
5.3 Pengarusutamaan Gender di Kementerian Kehutanan pada Tingkat Kabupaten	17

6	Gender Analysis of Target groups	21
6	Analisis Gender Kelompok Sasaran	21
6.1	Preparation phase	21
6.1	Tahap persiapan	21
6.2	Implementation Phase	24
6.2	Tahap Pelaksanaan	24
6.3	Evaluation Phase	25
6.3	Tahap Evaluasi	25
6.4	Results from Target Group Analysis	25
6.4	Hasil-hasil dari Analisis Kelompok Sasaran	25
6.4.1	General information about Menua Sadap	25
6.4.1	Informasi umum tentang Menua Sadap	25
6.4.2	Adat law and gender-specific ownership of land and resources	27
6.4.2	Hukum adat dan kepemilikan lahan dan sumber daya khusus gender	27
6.4.3	Division of Labour	28
6.4.3	Pembagian Kerja	28
6.4.4	Gender specific use of resources, impact of resource degradation and coping strategies	29
6.4.4	Penggunaan sumber daya khusus gender, dampak pemerosotan sumber daya, dan strategi penanggulangan	29
6.4.5	Gender-specific participation in decision making at household level	30
6.4.5	Peran serta khusus gender dalam pengambilan putusan di tingkat rumah tangga	30
6.4.6	Gender specific participation in public meetings	30
6.4.6	Peran serta khusus gender dalam rapat umum	30
6.4.7	Recommendations from people of Menua Sadap	32
6.4.7	Saran dari warga Menua Sadap	32
6.4.8	Gender-specific Needs identified in Menua Sadap	33
6.4.8	Kebutuhan khusus gender yang teridentifikasi di Menua Sadap	33
7	Conclusions in regard of FORCLIME planning	35
7	Simpulan mengenai perencanaan FORCLIME	35
7.1	Conclusions from Target Group Analysis in Menua Sadap	35
7.1	Simpulan dari Analisis Kelompok Sasaran di Menua Sadap	35

7.1.1	Men and women have different roles and interests in managing natural resources	35
7.1.1	Laki-laki dan perempuan memiliki peran dan kepentingan berbeda dalam mengelola sumber daya alam	35
7.1.2	Lack of men in instable village setting	35
7.1.2	Kurangnya laki-laki dalam suasana desa yang tak stabil	35
7.1.3	Critical perception of National Park	36
7.1.3	Persepsi kritis terhadap Taman Nasional	36
7.1.4	Low educational standard	36
7.1.4	Standar pendidikan rendah	36
7.1.5	Women outnumber men but rarely make decisions in public meetings	37
7.1.5	Perempuan lebih banyak daripada laki-laki, namun jarang membuat putusan dalam rapat umum	37
7.2	Conclusions from the Process of the Participatory Gender Analysis	37
7.2	Simpulan dari Proses Analisis Gender Partisipatif	37
7.2.1	Little information flow and transparency inside village community	37
7.2.1	Minimnya arus informasi dan transparansi di dalam masyarakat desa	37
7.2.2	Public meeting streered and dominated by men	38
7.2.2	Rapat umum disetir dan didominasi oleh laki-laki	38
7.2.3	Interviews limited due to availability of respondents and language barriers	38
7.2.3	Wawancara terbatas karena ketersediaan responden dan hambatan bahasa	38
7.2.4	Preparation of plenary discussion in homogenous sub-groups leads to better participation of "weaker groups"	38
7.2.4	Persiapan diskusi pleno dalam subkelompok yang homogen membawa kepada peran serta yang lebih baik dari "kelompok lemah"	38
7.2.5	Participatory gender analysis as an entry point to establish trusting relationships between villagers and extension officers promoting CBFM/REDD	39
7.2.5	Analisis gender partisipatif adalah titik masuk untuk membentuk hubungan yang saling percaya antara penduduk desa dan staf perluasan yang mempromosikan CBFM/REDD	39
7.2.6	Analysis of gender-specific roles and needs to be integrated into a long term development process of CBFM	40
7.2.6	Analisis peran dan kebutuhan khusus gender harus dipadukan ke dalam proses pengembangan CBFM jangka panjang	40

7.3	Conclusions from Institutional Analysis	40
7.3	Simpulan dari Analisis Kelembagaan	40
7.3.1	Work in the forestry sector is still perceived as a mans world	40
7.3.1	Kerja di sektor kehutanan masih dikesani sebagai dunia laki-laki	40
7.3.2	Lack of knowledge about the gender concept in the forestry sector	40
7.3.2	Minimnya pengetahuan tentang konsep gender di sektor kehutanan	40
7.3.3	Little cooperation between MoFor, MoWE and local NGOs in gender mainstreaming activities	41
7.3.3	Sedikit kerja sama antara Kemenhut, MoWE, dan LSM lokal dalam kegiatan pengarusutamaan gender	41
7.3.4	Strategic partnership with decentralisation process and required stakeholder participation	41
7.3.4	Kemitraan srategis dengan proses desentralisasi dan peran serta pemangku kepentingan yang disyaratkan	41
7.3.5	Potential of Gender Focal Persons and Gender Working groups not yet fully utilized	42
7.3.5	Potensi Focal point Gender dan Kelompok Kerja Gender belum sepenuhnya dimanfaatkan	42
8	Potential Partners	43
8	Mitra potensial	45
9	Recommendations for Entry points for gender mainstreaming and women empowerment in FORCLIME	47
9	Saran untuk Titik Masuk bagi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di FORCLIME	47
9.1	Recommendations for Component 1: Policy development at national level	47
9.1	Saran untuk Komponen 1: Pengembangan kebijakan di tingkat nasional	47
9.1.1	Support the implementation of the MoFor Guidelines for Gender Mainstreaming released in 2004	47
9.1.1	Mendukung implementasi Panduan Kemenhut untuk Pengarusutamaan Gender yang diterbitkan di tahun 2004	47
9.1.2	Advocate for stronger cooperation and networking of different partners at the national level (MoFor, MoWE, BAPPENAS)	47
9.1.2	Menyokong kerja sama dan pembentukan jejaring yang lebih kuat dari berbagai mitra pada tingkat nasional (Kemenhut, MoWE, BAPPENAS)	47
9.1.3	Advocate for more gender awareness in "male-dominated" sectors and programmes	48
9.1.3	Menyokong kesadaran gender lebih tinggi di sektor dan program yang "didominasi laki-laki"	48

9.2	Recommendations for component 2 and 3 (provincial and district level):	48
9.2	Saran-saran untuk komponen 2 dan 3 (tingkat provinsi dan kabupaten):	48
9.2.1	Integrate gender issues in all phases of planning, implementation, monitoring and evaluation in forest management concepts	48
9.2.1	Memadukan masalah gender dalam semua tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam konsep pengelolaan hutan	48
9.2.2	Participatory Gender analysis as an integral part of CBFM/REDD processes	49
9.2.2	Analisis Gender Partisipatif sebagai bagian terpadu proses CBFM/REDD	49
9.2.3	Support the establishment of gender focal persons and gender working groups at Forestry Services at Provincial and District level	49
9.2.3	Mendukung pembentukan focal point gender dan kelompok kerja gender pada Dinas Kehutanan di tingkat Provinsi dan Kabupaten	49
9.2.4	Raise gender awareness and gender competence of stakeholders from forestry sector and BAPPEDA	50
9.2.4	Meningkatkan kesadaran gender dan kecakapan gender pemangku kepentingan dari sektor kehutanan dan BAPPEDA	50
9.2.5	Encourage cooperation between Provincial Forestry Services, Women Empowerment Services and local NGOs	50
9.2.5	Mendorong kerja sama antara Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi, dan LSM setempat	50
9.2.6	Advocate at MoFor and other stakeholders to train and include more members of Dayak communities in out-reach activities	51
9.2.6	Menyokong Kemenhut dan pemangku kepentingan lainnya untuk melatih dan menyertakan lebih banyak anggota masyarakat Dayak dalam kegiatan penjangkauan	51
10	Elements of a FORCLIME Gender Strategy	53
10	Unsur Strategi Gender FORCLIME	53
10.1	FORCLIME Gender Policy	53
10.1	Kebijakan Gender FORCLIME	53
10.2	Include gender differentiating topics and gender-responsive indicators into FORCLIME result chain	53
10.2	Menyertakan topik khusus gender dan indikator tanggap gender ke dalam rantai hasil FORCLIME	53
10.2.1	REDD	54
10.2.1	REDD	54
10.2.2	CBFM	54
10.2.2	CBFM	54

10.3 Gender expert/gender liaison officer:	55
10.3 Pakar gender/staf penghubung gender:	55
10.3.1 FORCLIME Internal	55
10.3.1 Internal FORCLIME	55
10.3.2 FORCLIME External	55
10.3.2 Eksternal FORCLIME	55
LITERATURE	57
DAFTAR PUSTAKA	57
ANNEXES	59
LAMPIRAN	73
I Terms of Reference	61
I Kerangka Acuan Kerja	75
II List of institutions and of people consulted	62
II Daftar lembaga dan orang yang dimintai nasihat	76
III Members of the Gender Research Team	63
III Anggota Tim Penelitian Gender	77
IV Training schedule and Tools for Participatory Gender Analysis in Forest and Natural Resources Management	64
IV Jadwal pelatihan dan Alat untuk Analisis Gender Partisipatif dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Alam	78

ABBREVIATIONS

BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Regional Development Planning Agency)
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (National Development Planning Agency)
CEDAW	Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women
CIFOR	Centre for International Forestry Research
DFID	UK Department for International Development
FFI	Flora and Fauna International
FORCLIME	Forest and Climate Change Programme
GDI	Gender Development Index
GEM	Gender Empowerment Measure
HDI	Human Development Index
HoB	Heart of Borneo Initiative
GGCA	Global Gender and Climate Alliance
GIZ	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, German Technical Cooperation
GRT	Gender Research Team
ICRAF	International Centre for Research in Agro forestry
IUCN	International Union for Conservation of Nature
MoFor	Ministry of Forestry, National level
MoWE	Ministry of Women Empowerment and Children Protection, National level
NGO	Non-Governmental Organisation
PUG	Pengarusutamaan Gender, Gender Mainstreaming
REDD	Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation
RENSTRA	Rencana Strategis, Strategic Plan
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Midterm Development Plan
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Pemerintah, Government Unit Tasks
WED	Women Empowerment Division
WES	Women Empowerment Services at Provincial and District level

SINGKATAN

BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
CBFM	Community Based Forest Management (Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat/PHBM)
CC	Climate Change (Perubahan Iklim)
CEDAW	Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (Konvensi tentang Penghilangan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan)
CIFOR	Centre for International Forestry Research (Pusat untuk Penelitian Kehutanan Internasional)
DFID	Departemen Pembangunan Internasional (Inggris)
FFI	Flora dan Fauna Internasional
FORCLIME	Forests and Climate Change Programme (Program Hutan dan Perubahan Iklim)
GAD	Gender and Development (Gender dan Pembangunan)
GDI	Gender Development Index (Indeks Pembangunan Gender)
GEM	Gender Empowerment Measure (Ukuran Pemberdayaan Gender)
GRT	Gender Research Team (Tim Peneliti Gender)
HDI	Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia)
HoB	Heart of Borneo Initiative (Prakarsa Jantung Borneo)
GGCA	Global Gender and Climate Alliance (Persekutuan Gender dan Iklim Global)
GIZ	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Kerja sama Teknis Jerman)
GRT	Gender Research Team (Tim Penelitian Gender)
ICRAF	International Centre for Research in Agro forestry (Pusat Internasional untuk Penelitian Agrohutani)
IUCN	International Union for Conservation of Nature (Uni Internasional untuk Konservasi Alam)
LUP	Land Use Planning (Rencana Tata Guna Lahan)
MoF atau	Kementerian Kehutanan, tingkat nasional
MoWE	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tingkat nasional
M+E	Monitoring dan Evaluasi
NGO	Non-Governmental Organisation (Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM)
NTFP	Non Timber Forest Product (Hasil Hutan Bukan Kayu/HHBK)
PUG	Pengarusutamaan Gender
REDD	Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan)
RENSTRA	Rencana Strategis
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Pemerintah
WED	Women Empowerment Division (Divisi Pemberdayaan Perempuan)
WES	Women Empowerment Services (Dinas Pemberdayaan Perempuan), tingkat provinsi dan kabupaten

EXECUTIVE SUMMARY

The Executive Summary gives a summary of the background, the process, and the results of the consultancy. There is an overview of the recommendations which are further elaborated in chapter 9

I Background

The Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) supports the Forests and Climate Change Programme (FORCLIME) in Indonesia from January 2009 until December 2020 the first phase being implemented from 2009 till the end of 2012.

The objective of the technical module is: “Relevant public and private actors implement the improved institutional and regulatory framework, methods and services for sustainable forest management, nature conservation and the reduction of greenhouse gas emissions from deforestation and forest degradation.” A gender approach was necessary to insure that male and female members of the poor rural population participate and benefit equally from future projects. Guidelines of the German development cooperation, as well as the Indonesian legislation, include the achievement of more gender equality as the top priority of cross cutting issues.

II Methodology

A gender analysis of the Indonesian forestry sector was conducted which covered country and sector specific analysis. It also included an assessment of the knowledge and skills of Indonesian partner organisations in the forest sector in handling

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan Eksekutif berisi ringkasan tentang uraian singkat tentang latar belakang, proses, dan hasil konsultasi. Juga berisi ikhtisar tentang rekomendasi, yang akan di jelaskan lebih lengkap dalam Bab 9

I Latar belakang

Kementerian Republik Federal Jerman untuk Kerja sama dan Pembangunan Ekonomi (BMZ) mendukung Program Kehutanan dan Perubahan Iklim (FORCLIME) di Indonesia dari Januari 2009 hingga Desember 2020, yang tahap pertamanya sedang dilaksanakan dari tahun 2009 hingga akhir 2012.

Tujuan modul Bantuan Teknis ini adalah: “Pelaku sektor publik dan swasta yang relevan menerapkan kerangka kerja regulasi dan kelembagaan, metode, dan layanan untuk pengelolaan hutan berkelanjutan, konservasi alam, dan pengurangan emisi gas rumah kaca akibat deforestasi dan degradasi hutan.” Pendekatan gender dalam hal ini diperlukan untuk menjamin bahwa anggota laki-laki dan perempuan populasi pedesaan yang miskin berperan serta dan menarik manfaat secara setara dari proyek di masa depan. Pedoman kerja sama pembangunan Jerman serta legislasi Indonesia telah menetapkan isu gender sebagai salah satu prioritas utama untuk isu lintas sektor (*cross cutting issues*).

II Metodologi

Analisis gender sektor kehutanan Indonesia dilakukan yang meliputi analisis di tingkat negara dan tingkat sektor. Analisis juga mencakup pengkajian pengetahuan dan keterampilan organisasi mitra Indonesia di sektor kehutanan dalam menangani pengarusutamaan gender. Analisis kelembagaan

gender mainstreaming. Institutional analysis included literature review, interviews and focus group discussions on the national, regional and district levels.

A participatory target group analysis was conducted in a forest based community near a national park in West-Kalimantan to help understand the gender-specific utilisation of natural resources and the gender-specific needs in community based forest management programmes.

A group of 8 people (6 female, 2 male), representing the forest and environmental services, the university, national parks and others, was trained to facilitate participatory methods and to collect data for the gender analysis at the village level. The training workshop took place in the provincial capital of East Kalimantan, Samarinda. The appraisal was implemented in a Dayak village, Menua Sadap, in the District of Kapuas Hulu in West-Kalimantan, one of the three district chosen by FORCLIME for future activities. The process of conducting participatory gender-sensitive appraisal was successful, despite some initial resistance from the male village leadership. Interviews, focus group discussions, ranking exercises and village meetings took place for 3 days. The findings were summarized, evaluated and presented in Jakarta to an audience composed of national gtz staff and a representative of the Ministry of Women Empowerment. A second presentation took place in Samarinda before 15 high- and middle ranking officials from Forestry and Environmental Services, university and FORCLIME staff.

III Major findings of the gender analysis

Institutional Analysis

Indonesia has signed a number of international conventions regarding gender mainstreaming and female empowerment. These treaties have been translated into national legislation. A presidential decree from 2000 requires that gender mainstreaming activities must be considered in each line ministry. A special Ministry of Women Empowerment was established to coordinate

dilakukan melalui tinjauan pustaka, wawancara, dan diskusi kelompok fokus pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.

Analisis kelompok sasaran partisipatif dilakukan terhadap masyarakat Menua Sadap yang tinggal dekat Taman Nasional Betung Kerihun di Kalimantan Barat. Analisis ini dilakukan untuk membantu memahami pemanfaatan sumber daya alam berdasar dimensi gender dan kebutuhan khusus gender dalam program pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Kelompok yang terdiri 8 orang (6 perempuan, 2 laki-laki), yang mewakili Dinas Kehutanan dan Instansi Lingkungan Hidup, universitas, taman nasional, dan LSM, telah dilatih untuk memfasilitasi penggunaan metode partisipatif dan mengumpulkan data bagi analisis gender di tingkat desa. Loklatih ini berlangsung di Samarinda - Kalimantan Timur.

Kajian gender secara partisipatif diterapkan di masyarakat Dayak di Desa Menua Sadap, di Kabupaten Kapuas Hulu - Kalimantan Barat, salah satu dari tiga kabupaten yang dipilih oleh FORCLIME untuk kegiatan mendatang. Proses penilaian peka gender yang partisipatif berhasil diselenggarakan, walaupun ada penolakan awal dari para laki-laki pemimpin desa. Wawancara, diskusi kelompok fokus, latihan pemerinkatan, dan pertemuan tingkat desa berlangsung selama 3 hari. Temuan kajian lapang dirangkum, dievaluasi, dan dipresentasikan dalam pertemuan di Jakarta yang dihadiri staf nasional GIZ dan wakil dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Presentasi kedua berlangsung di Samarinda di hadapan 15 pejabat dari unsur Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, universitas, LSM, perusahaan swasta kehutanan dan staf FORCLIME.

III Temuan utama analisis gender

Analisis Kelembagaan

Indonesia telah menandatangani sejumlah konvensi internasional mengenai pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan. Perjanjian-perjanjian ini telah diterjemahkan menjadi perundang-undangan nasional. Keputusan Presiden tahun 2000 mensyaratkan bahwa kegiatan pengarusutamaan gender harus dipertimbangkan di setiap kementerian.

and supervise the process. In 2004, the Ministry of Forestry (MoFor) published a comprehensive guideline in implementing gender mainstreaming in the forest sector. At the national level a gender focal person and a gender working group were established at the MoFor.

Interviews and focus group discussions with officers from the forest sector on the national, provincial and district levels revealed that knowledge about the gender mainstreaming guidelines was very limited. Forest management was perceived as a male-dominated area and gender issues were reduced to women's concerns. Gender mainstreaming as a concept based on gender-specific needs assessment and gender-responsive planning in programme management was hardly known and, therefore, not implemented.

Officers from the Regional Planning Agency (BAPPEDAS) were better informed because their performances are assessed using Gender Empowerment Measures (GEM) indicators, among others. The GEM in West-Kalimantan is very low and officers were interested in changing this.

The Ministry of Women Empowerment (MoWE) conducted a number of workshops for provincial government representatives to raise awareness and advocate for gender-responsive budgeting. The MoWE supported the educational and health sectors to develop mid-term development plans based on sex-segregated data and gender-specific topics and indicators. The forestry and agricultural sectors were not yet included in these activities.

Institutional analysis revealed that there was little cooperation between the Forestry and the Women Empowerment Sectors. However, most officers interviewed were interested in the approach and requested more information.

A strategic entry point for gender-mainstreaming activities in the current Indonesian situation is connected to the decentralisation process which requires citizen participation and stakeholder consultation in participatory planning processes at the local level. The identification of gender specific needs can be one step in the decentralised

Kementerian khusus untuk pemberdayaan perempuan dibentuk guna mengoordinasi dan menyelia proses ini. Di tahun 2004, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menerbitkan sebuah pedoman menyeluruh dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender di sektor kehutanan. Pada tingkat nasional, seorang focal point gender dan sebuah kelompok kerja gender dibentuk di Kemenhut.

Wawancara dan diskusi kelompok fokus dengan staf instansi kehutanan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten mengungkapkan bahwa pengetahuan tentang pedoman pengarusutamaan gender sangatlah terbatas. Pengelolaan hutan dikesani sebagai area yang didominasi laki-laki dan masalah gender dicitrakan menjadi keprihatinan perempuan. Pengarusutamaan gender sebagai sebuah konsep yang berdasarkan pengkajian kebutuhan khusus gender dan perencanaan tanggap gender dalam pengelolaan program hampir tidak diketahui sehingga tidak dilaksanakan.

Staf dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) lebih mahfum karena kinerja mereka dikaji antara lain dengan indikator-indikator Ukuran Pemberdayaan Gender (GEM). GEM di Kalimantan Barat sangat rendah dan staf di sana berminat mengubah hal ini.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan (MoWE) telah mengadakan serangkaian lokakarya untuk wakil pemerintah provinsi guna meningkatkan kesadaran dan menyokong penganggaran yang tanggap gender. MoWE mendukung sektor-sektor pendidikan dan kesehatan untuk mengembangkan rencana pembangunan jangka menengah berdasarkan data pemilahan seks serta topik dan indikator khusus gender. Sedangkan sektor kehutanan dan pertanian belum terlibat dalam semua kegiatan MoWE ini.

Analisis kelembagaan mengungkapkan minimnya kerja sama antara sektor-sektor kehutanan dan pemberdayaan perempuan. Akan tetapi, sebagian besar staf yang diwawancarai berminat pada pendekatan ini dan meminta informasi lebih lanjut.

Sebuah titik masuk strategis bagi kegiatan pengarusutamaan gender dalam situasi Indonesia saat ini berkaitan dengan proses desentralisasi yang mensyaratkan peran serta warga negara dan konsultasi pemangku kepentingan dalam proses

participatory planning and budgeting processes. Women's participation and meaningful contribution to this process is a prerequisite of a successful development which contributes to programmes benefiting women and men equally.

Process of participatory gender analysis

The methodology "tested" in Menua Sadap for the participatory gender analysis of the target group proved to be successful. Tools used for collecting gender specific data were informal talks, participatory observation, discussions in gender-homogenous subgroups, ranking, semi-structured interviews and facilitated village meetings. The group of researchers (most of them Muslims) was capable of developing a friendly relationship with the Dayak people (most of them Catholic) and initiating a public community analysis focusing on gender-specific interests and priorities in forest products. The group prepared a public meeting with exercises in gender-and age specific sub-groups. Representatives of each group presented results and recommendations during a village meeting. Research group members facilitated a discussion about conclusions and recommendations in which women and men were equally involved. A successful example was set in involving women in public consultation.

Findings from gender analysis at target group level

Menua Sadap is a remote village, situated at the bank of a large river, 3 km from a road which leads to the border of Malaysia and is in very bad condition. The village is inhabited by about 200 people (children included).

The gender analysis gathered detailed information regarding the division of labour and the utilization of forests and other natural resources. Men are responsible for clearing fields in the forest, logging, fishing, hunting and for earning cash outside of the village. Women are responsible for most agricultural activities with corn, rice and vegetable production.

perencanaan partisipatif di tingkat lokal. Identifikasi kebutuhan khusus gender bisa menjadi salah satu langkah dalam proses perencanaan dan penganggaran partisipatif yang terdesentralisasi. Peran serta dan sumbangan bermakna kaum perempuan pada proses ini merupakan sebuah prasyarat pembangunan yang berhasil yang akan memberikan sumbangan kepada program yang menguntungkan baik perempuan maupun laki-laki secara setara.

Proses analisis gender partisipatif

Metodologi yang "diuji" di Menua Sadap untuk analisis gender partisipatif kelompok sasaran terbukti berhasil. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data khusus gender adalah percakapan informal, pengamatan partisipatif, diskusi dalam subkelompok yang homogen secara gender, pemeringkatan, wawancara semi-terstruktur, dan rapat desa berfasilitasi. Kelompok peneliti (sebagian besar Muslim) mampu mengembangkan hubungan yang bersahabat dengan orang Dayak (sebagian besar Katolik) dan memulai analisis komunitas publik yang berfokus pada kepentingan dan prioritas khusus gender dalam pemanfaatan sumberdaya hutan. Kelompok menyiapkan rapat umum dengan latihan dalam sub-kelompok khusus gender dan umur. Wakil-wakil dari setiap kelompok memaparkan hasil dan saran selama rapat desa. Anggota penelitian kelompok memfasilitasi diskusi tentang simpulan dan saran yang di dalamnya perempuan dan laki-laki dilibatkan secara setara. Ini merupakan sebuah contoh keberhasilan pelibatan perempuan dalam proses konsultasi publik.

Temuan dari analisis gender pada tingkat kelompok sasaran

Menua Sadap adalah sebuah desa terpencil, terletak di tepi sungai Embaloh, 3 km dari jalan raya yang kondisinya buruk yang menghubungkan Putussibau dengan perbatasan Malaysia. Desa ini berpenghuni sekitar 200 orang (termasuk anak-anak).

Analisis gender mengumpulkan informasi terinci mengenai pembagian kerja dan pemanfaatan hutan serta sumber daya alam lainnya. Laki-laki bertanggung jawab membuka lahan di hutan, membalak, memancing, berburu, dan mencari uang tunai di luar

They are in charge of the basic food security of the family, to which men contribute wild meat and fish. Men earn cash through cutting and selling trees, women earn some income using non-timber forest products for handicrafts.

Men and women have different methods and priorities utilising natural resources and different needs in accessing the forest and its products.

Small scale agriculture, fishing and the sale of forest products are not sufficient to meet the needs of the rural community. Many men, especially young men in the age-group 20-45 years, are absent because they work in Malaysia and elsewhere. Each family has 1-2 members working outside and sending some remittance.

There is a male leadership group consisting of Village Head, Head of Security and Elderly for Adat legislation. They receive information from extension officers and others, but rarely share it with the community.

Women often outnumber men in public meetings, which are organised and directed by male leaders. Only the wife of the Village Head, who is also the representative of the Women League (PKK), is regularly involved and also takes part in decision-making.

Presently, women do not seem to be motivated to play a more active role because they do not see the benefits. They have not been addressed before and have little knowledge about resource mapping, land use planning and topics of environmental protection.

In general, there is resistance against the National Park, because it limits the access to and use of forest resources which are the basis of daily subsistence. Three men are employed as guards and receive a small income. However, male and female villagers pointed out the disadvantages of the National Park and did not recognize any benefits for themselves.

desa. Perempuan bertanggung jawab atas sebagian besar kegiatan pertanian yang menghasilkan jagung, beras, dan sayur-mayur. Mereka bertanggung jawab atas ketahanan pangan dalam keluarga, sedangkan para lelaki berkontribusi dalam penyediaan daging satwa liar dan ikan. Laki-laki memperoleh uang tunai melalui penebangan dan penjualan kayu, perempuan mendapatkan sedikit pendapatan dari pemanfaatan produk hutan non-kayu untuk kerajinan tangan.

Laki-laki dan perempuan memiliki metode dan prioritas berbeda dalam memanfaatkan sumber daya alam dan kebutuhan berbeda dalam mengakses hutan dan produknya.

Pertanian skala kecil, penangkapan ikan, dan penjualan produk hutan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan. Banyak laki-laki, khususnya pemuda berusia 20-45 tahun, merantau untuk bekerja di Malaysia dan tempat lain. Setiap keluarga memiliki 1-2 anggota yang bekerja di luar desa dan mengirimkan uang ke keluarga yang tinggal di desa.

Ada kelompok pimpinan yang didominasi laki-laki yang terdiri atas Kepala Desa, Kepala Keamanan Desa, dan Sesepuh Adat. Mereka menerima informasi dari penyuluh dan orang-orang lain, namun jarang membaginya dengan masyarakat.

Secara kuantitas, jumlah perempuan dalam pertemuan desa seringkali lebih banyak daripada laki-laki. Namun biasanya pertemuan tersebut diadakan dan diarahkan oleh para pemimpin laki-laki. Hanya istri Kepala Desa, yang juga wakil Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang terlibat secara teratur dan ikut mengambil bagian dalam pembuatan putusan.

Saat ini, perempuan tampaknya tidak termotivasi untuk berperan lebih aktif karena tidak melihat manfaatnya. Mereka jarang ditanggapi dan hanya memiliki pengetahuan minim tentang pemetaan sumber daya, perencanaan tata guna lahan dan topik-topik perlindungan lingkungan.

Secara umum, ada penolakan terhadap Taman Nasional Betung Kerihun, karena membatasi akses dan penggunaan sumber daya hutan yang merupakan landasan kehidupan sehari-hari. Tiga laki-laki dari desa dipekerjakan sebagai petugas keamanan taman nasional dan menerima pendapatan yang kecil.

IV Conclusions in regard to FORCLIME gender strategy:

Findings at Target Group level

- Men and women have different patterns of using forest products
- Men and women have different needs regarding the access to and the availability of forest products
- Men and women decide together whether to cut trees to clear new farming areas.
- Women play a prominent role in subsistence agriculture and are open to new methods.
- Women are usually not involved in agricultural and forest extension activities
- Different needs and priorities of men and women should be considered in land use planning and public consultation meetings of CBM/REDD
- The CBFN/REDD approach must find ways to involve women as active stakeholders of their activities Future CBFM/REDD activities confronted with rumours about “eco-tourism”, demands regarding improved sanitation and high expectations about a micro hydropower plant
- The village depends on remittances from family members working outside

Process at Target group level

- Little information flow and transparency within the village community
- Public meetings directed and dominated by men, although women outnumber men.
- Women seem not to be interested in meetings related to natural resource management
- Women are not involved enough in public decision-making, despite one outspoken PKK representative

Akan tetapi, banyak penduduk desa laki-laki dan perempuan menunjukkan kerugian atas keberadaan taman nasional dan tidak melihat manfaat apa pun dari taman nasional bagi diri mereka.

IV Simpulan sehubungan dengan strategi gender FORCLIME:

- Temuan pada tingkat Kelompok Sasaran
- Laki-laki dan perempuan memiliki pola yang berbeda dalam menggunakan produk hutan
- Laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan yang berbeda mengenai akses ke dan ketersediaan produk hutan
- Laki-laki dan perempuan memutuskan bersama apakah menebang pohon atau tidak untuk membuka lahan pertanian baru.
- Perempuan memainkan peran menonjol dalam pertanian pangan dan terbuka terhadap metode-metode baru.
- Perempuan biasanya tidak terlibat dalam kegiatan penyuluhan pertanian dan hutan
- Kebutuhan dan prioritas yang berbeda dari laki-laki dan perempuan harus dipertimbangkan dalam perencanaan tata guna lahan dan rapat konsultasi publik CBFM/REDD
- Pendekatan CBFM/REDD harus menemukan cara melibatkan perempuan sebagai pemangku kepentingan aktif kegiatan mereka. Kegiatan CBFM/REDD mendatang dihadapkan dengan desas-desus tentang “eko-wisata”, tuntutan terhadap sanitasi yang disempurnakan dan harapan tinggi terhadap pembangkit listrik tenaga air mikro
- Desa bergantung pada kiriman uang dari anggota keluarga yang bekerja di luar daerah.

Proses pada tingkat Kelompok Sasaran

- Lemahnya arus informasi dan transparansi di dalam masyarakat desa
- Rapat umum diarahkan dan didominasi oleh laki-laki, walaupun jumlah perempuan lebih banyak.
- Perempuan tampaknya tidak berminat pada rapat yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam

- Interactions between outsiders and villagers are limited due to peoples absence and language barriers. Elderly people often do not speak Bahasa Indonesia.
- Preparation of plenary discussion in homogenous sub-groups leads to better participation of “weaker groups”
- Participatory gender analysis useful as entry point to establish trusting relationships between villagers and extension officers promoting CBFM/REDD
- Analysis of gender-specific roles and needs should be integrated into a long term development process of CBFM to avoid frustration or false expectations
- The process of the analysis can also be used to increase womens interest in identifying their specific needs and contributing to discussions in planning meetings
- Perempuan tidak cukup terlibat dalam pembuatan putusan publik, walaupun adanya wakil PKK yang vokal
- Interaksi antara orang luar dan orang desa terbatas karena merantainya orang dan penghalang bahasa. Orang-orang yang lanjut usia (sesepuh) sering tidak dapat berbicara Bahasa Indonesia dengan fasih.
- Persiapan diskusi pleno dalam subkelompok yang homogen membawa kepada peran serta yang lebih baik bagi “kelompok lemah”
- Analisis gender partisipatif berguna sebagai titik masuk untuk membangun hubungan saling percaya antara penduduk desa dan staf penyuluhan yang mempromosi CBFM/REDD
- Analisis peran dan kebutuhan khusus gender harus terpadu ke dalam proses pembangunan jangka panjang CBFM guna menghindari rasa frustrasi atau harapan hampa
- Proses analisis juga dapat digunakan untuk menaikkan minat perempuan dalam mengenali kebutuhan khusus mereka dan berkontribusi pada diskusi dalam rapat perencanaan

Institutional Analysis of Forestry sector

- Work in the forestry sector is still perceived as a man’s world
- Lack of knowledge about the gender mainstreaming concept in forestry sector at national, provincial and district levels.
- Lack of competence integrating gender-specific needs as cross cutting issue into planning and programme management
- Little cooperation between MoFor, MoWE, BAPPEDA and local NGOs in implementing gender mainstreaming activities
- Potentials for strategic partnership with decentralisation process and required stakeholder participation undeveloped
- Potential of Gender Focal Persons and Gender Working groups not yet fully utilized.

Analisis Kelembagaan Sektor Kehutanan

- Kerja di sektor kehutanan masih dikonotasikan sebagai dunia laki-laki
- Minimnya pengetahuan tentang konsep pengarusutamaan gender di sektor kehutanan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.
- Minimnya kecakapan memadukan kebutuhan khusus gender sebagai masalah lintas sektor ke dalam pengelolaan perencanaan dan program
- Sedikitnya kerja sama antara Kemenhut, MoWE, BAPPEDA, dan LSM lokal dalam menerapkan kegiatan pengarusutamaan gender
- Potensi untuk kemitraan strategis dengan proses desentralisasi dan peran serta pemangku kepentingan yang disyaratkan masih kurang berkembang
- Potensi Focal point Gender dan Kelompok Kerja Gender belum sepenuhnya dimanfaatkan.

V Major Recommendations for FORCLIME

Recommendations are described in detail following in chapter 9

Component 1: Policy development at national level

- Support the implementation of the MoFor Guidelines for Gender Mainstreaming released in 2004
- Review MoFor Strategic Plan 2010-2014 and integrate gender aspects
- Advocate for stronger cooperation and networking of different partners at national level (MoFor, MoWE, BAPPENAS) to increase competence implementing gender mainstreaming decree
- Advocate for more gender awareness and gender-responsive planning in “male-dominated” sectors and programmes

Components 2 (REDD, CBFM) and 3 (HoB) at provincial and district level

- Integrate gender aspects into development of concepts, regulations and processes of REDD/CBFM
- Participatory Gender analysis to become an integral part of CBFM/REDD processes to identify gender-specific needs and priorities in natural resource management
- Integrate gender issues in all phases of planning, implementation, monitoring and evaluation in forest management concepts
- Integrate modules on gender analysis and gender-sensitive facilitation into training for MoFor and other stakeholders implementing REDD/CBFM
- Support the establishment of gender focal persons and gender working groups at Forestry Services and BAPPEDA at Provincial and District level

V Saran-saran Utama untuk FORCLIME

Untuk Komponen 1 (Pengembangan Kebijakan) di tingkat nasional

- Mendukung implementasi Panduan Kemenhut untuk Pengarusutamaan Gender yang diterbitkan di tahun 2004
- Meninjau Rencana Strategis Kemenhut 2010-2014 dan memasukkan aspek gender ke dalamnya
- Menyokong kerja sama dan penjejaringan yang lebih kuat berbagai mitra di tingkat nasional (Kemenhut, MoWE, BAPPENAS) untuk meningkatkan kompetensi dalam menerapkan regulasi yang berkaitan pengarusutamaan gender
- Menyokong perencanaan yang lebih sadar gender dan tanggap gender di sektor dan program yang “didominasi laki-laki”

Untuk Komponen 2 (REDD, CBFM) dan 3 (HoB) di tingkat provinsi dan kabupaten

- Mengintegrasikan aspek gender ke dalam pembangunan konsep, peraturan, dan proses REDD/CBFM
- Analisis gender partisipatif untuk menjadi bagian terpadu proses CBFM/REDD guna mengenali kebutuhan dan prioritas khusus gender dalam pengelolaan sumber daya alam
- Memadukan masalah gender dalam semua tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam konsep pengelolaan hutan
- Integrasi modul tentang analisis gender dan fasilitasi peka gender ke dalam pelatihan untuk Kemenhut dan pemangku kepentingan lainnya yang menerapkan REDD/CBFM
- Mendukung pembentukan Gender Focal point dan kelompok kerja gender pada Dinas Kehutanan dan BAPPEDA di tingkat provinsi dan kabupaten
- Mendorong kerja sama antara Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi, dan LSM setempat

- Encourage cooperation between Provincial Forestry Services, Women Empowerment Services and local NGOs
- Advocate at MoFor and other stakeholders (NGOs) to train and include more members of Dayak communities in facilitating out-reach activities

VI Elements of a FORCLIME Gender Strategy

- Set up a Gender Policy for FORCLIME
- Include gender differentiating topics and gender-responsive indicators into FORCLIME result chain
- Establish Gender expert/gender liaison officer

- Melakukan advokasi untuk mendorong Kemenhut dan pemangku kepentingan lainnya (LSM) agar melatih dan menyertakan lebih banyak lagi anggota masyarakat Dayak dalam memfasilitasi kegiatan penjangkauan (outreach).

VI Unsur Strategi Gender FORCLIME

- Menyiapkan Kebijakan Gender untuk FORCLIME
- Menyertakan topik khusus gender dan indikator tanggap gender ke dalam rantai hasil FORCLIME
- Membentuk pakar gender/menunjuk staf yang bertanggung jawab untuk isu gender (gender liaison officer)

Introduction

Chapter 1 provides some background information about FORCLIME and its need for a gender concept

Indonesia has been identified as the third largest emitter of greenhouse gases, according to studies commissioned by World Bank and DFID. 85% of these gases stem from deforestation. In response to this fact, the Indonesian government released a National Action Plan on Climate Change in December 2007, which was translated into a series of national laws and plans for the forestry sector.

The German Technical Cooperation, with long years of experience in the field of community based forest management in Kalimantan, aims at supporting the Indonesian Forestry Sector in the operationalisation and implementation of the Strategic Plan of the Ministry of Forestry (RENSTRA) 2011-2020.

FORCLIME works in three components.

Component 1 supports the development of regulations and procedures at the national level necessary to implement RENSTRA.

Component 2 develops examples of implementing REDD activities, which are part of RENSTRA, at the provincial and district levels.

Component 3 operates in the Heart of Borneo Initiative and focuses on National Parks and communities inside the parks and buffer zones.

Unclear land use rights and the insufficient participation of local population and communities in forest and environmental projects have been identified as one core problem preventing sustainable management of resources.

Pendahuluan

Bab 1 menyediakan sedikit informasi latar belakang tentang FORCLIME dan kebutuhannya akan konsep gender

Indonesia telah diidentifikasi sebagai negara pelepas gas rumah kaca terbesar ketiga, menurut studi yang ditugaskan oleh Bank Dunia dan DFID. 85% gas ini berasal dari penggundulan hutan. Sebagai tanggapan terhadap fakta ini, pemerintah Indonesia menerbitkan Rencana Tindakan Nasional tentang Perubahan Iklim pada bulan Desember 2007, yang diterjemahkan menjadi serangkaian regulasi dan rencana nasional untuk sektor kehutanan.

Lembaga Kerjasama Teknis Jerman, dengan bertahun-tahun pengalaman di bidang pengelolaan hutan lestari (termasuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat) di Kalimantan, bermaksud mendukung sektor kehutanan Indonesia dalam pengoperasian dan pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Kehutanan 2011-2020.

Modul Bantuan Teknis dalam Program FORCLIME bekerja dalam tiga komponen, yakni:

- Komponen 1 mendukung pengembangan regulasi dan prosedur yang dibutuhkan pada tingkat nasional untuk implementasi RENSTRA.
- Komponen 2 mengembangkan contoh-contoh pelaksanaan kegiatan REDD, yang merupakan bagian dari RENSTRA, di tingkat provinsi dan kabupaten.
- Komponen 3 beroperasi dalam Heart of Borneo Initiative dan berfokus pada taman nasional dan masyarakat di dalam taman nasional dan zona penyangga.

Hak tata guna lahan yang tak jelas dan peran serta penduduk dan masyarakat lokal yang tidak memadai dalam berbagai proyek kehutanan dan lingkungan telah diidentifikasi sebagai satu masalah inti yang menghambat upaya pengelolaan sumber daya secara lestari.

Additionally, the Indonesian decentralization process demands public participation in setting up 5-year development plans.

Stakeholder consultations are the centre of all concepts and procedures. The local population, whose livelihood depends on subsistence agriculture and forest products, is directly impacted by climate change. They should be involved in planning and decision making about their area which interfere with their daily routines. Local population should not feel only negative restrictions from forest protection. Their living conditions should be improved, due to sustainable forest management.

FORCLIME decided to conduct a Gender Analysis in one pilot area in order to understand the specific needs of women and men at the community level regarding the utilization and management of national resources. Knowledge of gender-specific roles and rights in decision-making in natural resource management are a prerequisite for a process insuring that male and female target population benefit equally from project achievements.

Additionally, a short gender analysis should be conducted for the different levels of the Ministry of Forestry the main partner of FORCLIME, and other involved stakeholders from government and NGOs to assess competence in handling gender issues and needs in capacity building.

The final objective of the consultancy was to develop a gender concept for FORCLIME which is aligned with GTZ gender strategy, the country gender policy and contributes to the achievement of FORCLIME'S goals and indicators.

Selain itu, proses desentralisasi Indonesia menuntut peran serta publik dalam menyiapkan rencana pembangunan lima tahun.

Konsultasi dengan pemangku kepentingan adalah inti semua konsep dan prosedur. Penduduk lokal, yang nafkahnya bergantung pada pertanian tanaman pangan dan produk hutan, terkena dampak langsung perubahan iklim. Mereka harus dilibatkan dalam perencanaan dan pengambilan putusan tentang daerah mereka yang menjadi tempat penghidupan mereka sehari-hari. Penduduk lokal tidak boleh hanya merasakan dampak negatif akibat larangan-larangan yang ada dalam perlindungan hutan. Kondisi kehidupan mereka harus ditingkatkan, demi terwujudnya pengelolaan hutan lestari.

FORCLIME memutuskan untuk melakukan analisis gender di satu daerah percontohan guna memahami kebutuhan khusus perempuan dan laki-laki di tingkat masyarakat dalam penggunaan dan pengelolaan sumber daya. Pengetahuan peran dan hak khusus gender dalam pembuatan keputusan dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan prasyarat bagi sebuah proses untuk memastikan bahwa populasi sasaran laki-laki dan perempuan menarik manfaat secara setara dari capaian proyek.

Selain itu, analisis gender singkat harus dilakukan untuk berbagai tingkat instansi kehutanan sebagai mitra utama FORCLIME dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat baik dari kalangan pemerintah dan LSM, guna mengkaji kompetensi mereka dalam penanganan isu gender dan kebutuhan pengembangan kapasitas yang diperlukan.

Tujuan akhir konsultasi pengarusutamaan gender di sektor kehutanan ini adalah mengembangkan konsep gender untuk FORCLIME yang diselaraskan dengan strategi gender GIZ dan kebijakan gender di Indonesia, serta memberi kontribusi untuk pencapaian sasaran dan indikator FORCLIME.

Methodology

Metodologi

Chapter 2 gives an overview of the ambitious methodology applied. Literature review and interviews were applied for institutional analysis. A group of Indonesian employees from government, Universities and NGOs were introduced to participatory gender analysis at target group level. They applied their skills to the case study of a small Dayak village. They also learned how to summarize, evaluate and present results.

Bab 2 memberikan ikhtisar tentang metodologi yang diterapkan. Tinjauan pustaka dan wawancara diterapkan untuk analisis kelembagaan. Sekelompok pegawai Indonesia dari kalangan pemerintah, universitas, dan LSM dikenalkan dengan analisis gender partisipatif pada tingkat kelompok sasaran. Mereka menerapkan keterampilan mereka untuk studi kasus sebuah komunitas Dayak di Desa Menna Sadap – Kapuas Hulu. Mereka juga mempelajari cara merangkum, mengevaluasi, dan memaparkan hasil.

The assignment was carried out in close cooperation of an international and a national gender consultant who had the same Terms of Reference (see Annex). FORCLIME staff selected and invited participants to meetings and workshops. They participated at meetings in Ministries at national level.

Penugasan dilakukan dalam kerja sama erat dengan konsultan gender internasional dan nasional yang menggunakan Kerangka Acuan Kerja yang sama (lihat Lampiran). FORCLIME memilih dan mengundang peserta loklatih ke pertemuan dan lokakarya. Peserta loklatih juga berperan serta dalam pertemuan-pertemuan di kementerian pada tingkat nasional.

Laws, regulations and plans regarding gender mainstreaming in the Indonesian government structure, particularly in the Ministry of Forestry, were studied. Guidelines and plans for the implementation of gender mainstreaming issues at provincial and district level were reviewed.

Hukum, peraturan, dan rencana mengenai pengarusutamaan gender di lingkup pemerintah Indonesia, khususnya di Kementerian Kehutanan, dipelajari. Panduan dan rencana untuk implementasi pengarusutamaan masalah gender di tingkat provinsi dan kabupaten direview.

Interviews with representatives of the Ministry of Forestry and Ministry of Women Women Empowerment were conducted at the national level in Jakarta.

Wawancara dengan wakil-wakil Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dilakukan pada tingkat nasional di Jakarta.

Focus group discussions with government representatives and NGOs members were conducted at the provincial level in Samarinda, East-Kalimantan and at the district level in Putisibau, West-Kalimantan. A questionnaire was used to assess gender competence at the provincial level.

Diskusi kelompok fokus dengan wakil-wakil pemerintah dan anggota LSM dilakukan pada tingkat provinsi di Samarinda, Kalimantan Timur, dan pada tingkat kabupaten di Putisibau-Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Kuesioner digunakan untuk mengkaji kompetensi gender pada tingkat provinsi.

The gender analysis at target group level was designed as a learning process for a group of 8 people (2 male, 6 female) who represented the Forestry Services, Environmental Services and the Forestry Faculty of the University.

The aim was to establish and train a “Gender Research Team” able to conduct a rapid participatory appraisal regarding gender specific roles and needs in forest based communities.

The gender analysis at target group level was designed to serve different objectives.

A group of local gender researchers was to be established and trained in participatory methodology. Selected “tools” of data collection were to be tested. Gender specific roles and needs were to be identified.

The gender researchers applied their new skills and tested the tools in a case study in a small Dayak forest community, Menua Sadap. The data from the gender analysis was summarized and analysed. Gender specific roles and needs and recommendations for FORCLIME were concluded.

The learning process ended with the presentation of a draft version to an audience at the national level composed of members of gtz and Ministry of Women Empowerment.

A revised version was presented by the consultant at the provincial level in Samarinda to an audience composed of representatives of Forestry Services, Environmental Services, Gender Studies Centre, Women Empowerment Services and FORCLIME.

Feedback was integrated into the following study.

Findings and recommendations from the field study were linked to the result chain of FORCLIME planning. The consultants participated in a workshop in which the result chain, topics, objectives and indicators of the three components were discussed. The consultants offered contributions about how gender differentiating perspectives could be integrated.

Analisis gender pada tingkat kelompok sasaran dirancang sebagai proses pembelajaran untuk peserta lokalatih yang terdiri 8 orang (2 laki-laki, 6 perempuan) yang mewakili beberapa instansi kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman dan LSM. Tujuannya adalah membentuk dan melatih “Tim Penelitian Gender” yang mampu melakukan kajian partisipatif secara cepat mengenai peran dan kebutuhan khusus gender dalam masyarakat yang mempunyai ketergantungan terhadap sumberdaya hutan.

Analisis gender pada tingkat kelompok sasaran dirancang untuk melayani berbagai tujuan. Kelompok peneliti gender lokal dibentuk dan dilatih dalam penggunaan metodologi partisipatif. “Alat” pengumpulan data yang dipilih harus diuji coba. Peran dan kebutuhan khusus gender harus diidentifikasi.

Peneliti gender menerapkan keterampilan barunya dan menguji coba alat dalam studi kasus di sebuah komunitas Dayak di Desa Menua Sadap. Data dari analisis gender dirangkum dan dianalisis. Peran dan kebutuhan khusus gender serta saran untuk FORCLIME disimpulkan.

Proses pembelajaran diakhiri dengan presentasi versi draf dalam sebuah pertemuan tingkat nasional yang dihadiri unsur GIZ dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan.

Versi yang direvisi dipaparkan oleh konsultan dalam sebuah pertemuan tingkat provinsi di Samarinda yang dihadiri unsur instansi Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, Pusat Studi Gender – Universitas Mulawarman, Badan Pemberdayaan Perempuan, LSM, perusahaan swasta kehutanan dan FORCLIME. Umpan balik diskusi kemudian dipadukan ke dalam laporan studi.

Temuan dan saran dari studi lapangan dikaitkan dengan rantai hasil perencanaan FORCLIME. Konsultan berperan serta dalam sebuah lokakarya yang membahas rantai hasil, topik, tujuan dan indikator tiga komponen FORCLIME. Konsultan menawarkan beberapa kontribusi tentang bagaimana sudut pandang gender yang berbeda dapat dipadukan.

The concept and topics of the process were prepared by the international consultant and implemented with the local consultant. Both consultants followed the same terms of reference and worked in close cooperation. However, the national consultant was more involved in the interactions with the Gender Research Team and the people of Menua Sadap, because the international consultant did not speak Bahasa Indonesia and many people had difficulties expressing themselves in English.

Konsep dan topik tentang proses disiapkan oleh konsultan internasional dan dilaksanakan oleh konsultan lokal. Kedua konsultan mengikuti kerangka acuan kerja yang sama dan bekerjasama secara erat. Akan tetapi, konsultan nasional lebih terlibat dalam interaksi dengan Tim Penelitian Gender dan penduduk Menua Sadap, karena konsultan internasional tidak dapat berbicara bahasa Indonesia sementara banyak orang memiliki kesulitan mengungkapkan pikiran dalam bahasa Inggris.



Figure 2.1.
Gender Research Team discussed among themselves (above) and with people of Menua Sadap (below)

Gambar 2.1.
Tim Studi Gender berdiskusi diantara mereka (atas) dan dengan penduduk Menua Sadap (bawah)



Gender aspects in Forestry and Nature Conservation and Climate Change

Chapter 3 gives a short outline of gender aspects in the forestry sector

The gender approach is based on the recognition that women and men play different roles in their societies and have different responsibilities and needs. Women and men also have different access to public services and, therefore, benefit differently from their projects. Programmers dealing with community based forest management and climate change should be aware that

- women and men have different access to and make different use of forest products and other natural resources
- women have special knowledge about plants and other forest products
- based on their social position and traditional land ownership rights, women often have less access to and control over forests and natural resources than men
- climate change and the degradation of forests and destruction of natural resources have different impacts on women and men. Impacts of climate change may lead, for example, to a decrease in food production, which in subsistence agriculture is mainly a responsibility of women. The reduction of forest products used as fuel, food or medicine has a negative impact on the quality of life. Women have less time meet their domestic responsibilities, earn money, engage in political issues or other public activities.

Women and men have different strategies for coping with effects from climate change.

Aspek gender dalam Konservasi Kehutanan dan Alam serta Perubahan

Bab 3 memberikan rangkuman singkat aspek gender di sektor kehutanan

Pendekatan gender didasarkan pada pengakuan bahwa perempuan dan laki-laki memainkan peran berbeda di masyarakat dan memiliki tanggung jawab dan kebutuhan yang berbeda. Perempuan dan laki-laki juga memiliki akses yang berbeda ke layanan publik sehingga menarik manfaat secara berbeda dari proyek-proyek mereka. Perancang program yang menangani pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan perubahan iklim harus menyadari bahwa:

- perempuan dan laki-laki memiliki akses berbeda dan menggunakan secara berbeda produk hutan dan sumber daya alam lainnya
- perempuan memiliki pengetahuan khusus tentang tumbuhan dan produk hutan lainnya
- berdasarkan kedudukan sosial dan hak kepemilikan tanah tradisional, perempuan sering memiliki lebih sedikit akses ke dan kontrol atas hutan dan sumber daya alam daripada laki-laki
- perubahan iklim dan pemerosotan hutan serta penghancuran sumber daya alam berdampak berbeda pada perempuan dan laki-laki. Perubahan iklim dapat membawa dampak, misalnya pada penurunan produksi makanan, yang dalam pertanian pangan menjadi tanggung jawab terutama kaum perempuan. Berkurangnya sumberdaya hutan yang digunakan sebagai bahan bakar, makanan, atau obat-obatan berdampak buruk pada mutu hidup. Perempuan menjadi kurang memiliki waktu untuk memenuhi tanggung jawab rumah tangga, memperoleh uang, terlibat dalam persoalan politis atau kegiatan publik lainnya.

Perempuan dan laki-laki memiliki strategi berbeda untuk menanggulangi efek dari perubahan iklim.

Women are more vulnerable to the impacts of climate change because they have less legal protection and ownership rights and less access and control over mitigating assets. Sometimes, they only get access to less fertile land. They often do not get credits for farm implements because they lack a collateral in land.

“While men tend to place their trust in technological solutions to problems, women are more inclined to work for a change in lifestyles and a general reduction in energy consumption.” (Roehr, 2009)

Both, women and men should participate in planning and decision-making processes regarding forest and other natural resources. They should both have the chance to voice their demands and to decide how to manage the resources in a sustainable way. Therefore, gender perspectives should be incorporated and women as agents of change should be involved.

Despite a strong target group orientation in community based forest management, this perspective on the different needs of women and men is often not considered.

Forestry is still perceived as a “man’s world” and few women participate in forestry projects. Projects are implemented to have beneficial effects on the whole community, but sometimes prove to be disadvantageous or even burdensome to women. (gtz, 1997)

The REDD concept promoted by FORCLIME, component 2, includes a strong community based forestry component.

Stakeholders consultations play a central role in the REDD concept and the participatory process.

International REDD negotiations and schemes must ensure compliance with international and national commitments on gender equality and equity

- Equitable access to the economic benefits derived from forest services
- Ensure full participation and integration of women in policy design processes (IUCN/GGCA, 2006).

Perempuan lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim karena kurang memiliki perlindungan hukum dan hak kepemilikan serta lebih sedikit akses ke dan kontrol atas penguasaan aset. Kadang-kadang, mereka hanya mendapatkan akses ke tanah yang kurang subur. Mereka sering tidak memperoleh kredit untuk usaha pertanian karena tidak mempunyai agunan berbentuk tanah.

“Sementara laki-laki cenderung menempatkan kepercayaan pada solusi teknologi terhadap masalah, perempuan lebih cenderung bekerja untuk perubahan dalam gaya hidup dan pengurangan konsumsi energi secara umum.” (Roehr, 2009)

Keduanya, perempuan dan laki-laki harus berperan serta dalam perencanaan dan proses pengambilan putusan mengenai sumber daya hutan dan alam lainnya. Mereka harus sama-sama berkesempatan menyuarakan kebutuhan mereka dan memutuskan cara mengelola sumber daya secara lestari. Karena itu, sudut pandang gender harus dimasukkan dan perempuan sebagai agen perubahan harus dilibatkan.

Walaupun ada orientasi kelompok sasaran yang kuat dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat, sudut pandang tentang perbedaan kebutuhan perempuan dan laki-laki ini sering tidak diperhatikan. Kehutanan masih dikesani sebagai “dunia laki-laki” dan hanya segelintir perempuan yang berperan serta dalam proyek kehutanan. Proyek-proyek dilaksanakan dengan harapan akan berefek menguntungkan pada seluruh masyarakat, namun kadang-kadang terbukti merugikan atau bahkan membebani perempuan. (GTZ, 1997)

Konsep REDD yang dipromosikan oleh FORCLIME, Komponen 2, mencakup komponen yang berorientasi kuat pada pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Konsultasi pemangku kepentingan memainkan peran sentral dalam konsep REDD dan proses partisipatif.

Perundingan dan skema REDD internasional harus memastikan kepatuhan dengan komitmen internasional dan nasional tentang kesamaan dan kesetaraan gender yang mencakup:

- Akses setara ke manfaat ekonomi yang berasal dari pemanfaatan hutan
- Memastikan peran serta penuh dan penyertaan perempuan dalam proses desain kebijakan (IUCN/GGCA, 2006).

Country specific Analysis

Chapter 4 analyses the legal situation regarding Gender Mainstreaming in Indonesia and compares mandates and guidelines of the Forestry Sector and the State Ministry of Women Empowerment and Children Protection.

4.1 Indonesian Laws regarding Gender Equity and Gender Mainstreaming

The Constitution of the Republic of Indonesia, 1945, already includes the commitment to the principle of equal rights for women and men.

Indonesia also ratified the UN-Convention Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) in 1986. During the democratic reform in 1999, increased attention was paid to human rights and gender rights and resulted in an amendment to the constitution in 2000 and Presidential Instruction No. 9 of 2000, which reaffirmed the strategy of gender mainstreaming as one of the national development strategies. “The target of gender mainstreaming strategy is to achieve equality and gender justice, through policies and programs that consider experience, aspirations, needs and problems of women and men into all policies in various fields of life and development. “ (Instructions of the President of the Republic of Indonesia about Gender Mainstreaming in National Development, Number 9. 2000)

All government ministries and agencies at the national and local level were required to integrate gender mainstreaming strategies in the planning, implementation, monitoring and evaluation of development projects.

Analisis di tingkat nasional

Bab 4 menganalisis situasi hukum mengenai Pengarusutamaan Gender di Indonesia dan membandingkan mandat dan panduan Sektor Kehutanan dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4.1 Hukum Indonesia mengenai Kesetaraan Gender dan Pengarusutamaan Gender

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sudah mencakup komitmen kepada prinsip hak setara untuk perempuan dan laki-laki.

Indonesia juga meratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) di tahun 1986. Selama reformasi demokratis di tahun 1999, perhatian yang meningkat diberikan kepada hak asasi manusia dan hak gender dan menghasilkan amendemen pada Undang-Undang Dasar di tahun 2000 dan Instruksi Presiden No. 9/2000, yang mempertegas strategi pengarusutamaan gender sebagai salah satu strategi pembangunan nasional.

“Sasaran strategi pengarusutamaan gender adalah mencapai kesetaraan dan keadilan gender, melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam seluruh kebijakan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. “ (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional)

Semua kementerian dan badan pemerintah di tingkat nasional dan lokal diwajibkan untuk memadukan strategi pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi proyek-proyek pembangunan.

In 2003, a new Financial Management Framework was enacted to ensure better linkages between policy formulation, planning, budget allocation, expenditure tracking, and result monitoring and evaluation. Central and regional governments are required to prepare performance-based budgets. The Framework provides the possibility for establishing gender equity as a standard performance measure. (ADB, 2006, p. 32)

In the same year, 2003, the Ministry of Home Affairs released the Ministerial Decree 132 on gender mainstreaming in regional development. The Decree requires that gender aspects should be mainstreamed into all phases of the project cycle and capacity building in gender-responsive planning should be regarded as a priority activity by local government institutions.

The Decree 132 gives room to establish Women Empowerment Divisions (WED) at provincial and local levels, with functional structures parallel to those of the Ministry of Women Empowerment and Children Protection at the national level. (ADB, 2006, p.35).

The Ministerial Decision 132 emphasizes that general responsibility for the implementation of gender mainstreaming at the provincial level is assigned to the governors. District heads or mayors have the responsibility for implementation at district level. Heads of sub districts and villages are responsible for sub-district and village level.

Gender working groups and gender focal points should be established similar to the national structure. The Decision 132 requires at least 5% of the respective provincial, district and municipal budgets for gender mainstreaming activities.

The national 5-Year-Development Plan (2010-2014) has three main guiding principles which are good governance, sustainable development and gender mainstreaming. Gender Mainstreaming should be integrated as a cross cutting issue into all line ministries by creating gender-responsive budgets.

Di tahun 2003, Kerangka Kerja Pengelolaan Keuangan yang baru diberlakukan guna memastikan pengaitan lebih baik antara perumusan kebijakan, perencanaan, penyisihan anggaran, pelacakan pengeluaran, serta pemantauan dan evaluasi hasil. Pemerintah pusat dan daerah diwajibkan untuk menyiapkan anggaran berbasis kinerja. Kerangka Kerja itu menyediakan kemungkinan mengukuhkan kesetaraan gender sebagai ukuran kinerja standar. (ADB, 2006, h. 32)

Di tahun yang sama, 2003, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Kepmendagri Nomor 132 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah. Putusan ini mewajibkan bahwa aspek gender harus diarusutamakan ke dalam semua tahap siklus proyek dan kapasitas pembangunan dalam perencanaan tanggap gender yang harus dianggap sebagai sebuah kegiatan prioritas oleh lembaga pemerintah setempat. Kepmendagri nomor 132 memberikan ruang untuk membentuk Divisi Pemberdayaan Perempuan (WED) di tingkat provinsi dan lokal, dengan struktur fungsional yang sejajar dengan yang di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat nasional. (ADB, 2006, h. 35). Kepmendagri Nomor 132 menekankan bahwa tanggung jawab umum untuk implementasi pengarusutamaan gender pada tingkat provinsi ditugaskan kepada gubernur. Bupati atau walikota bertanggung jawab untuk pelaksanaan pada tingkat kabupaten/kota. Camat dan kepala desa bertanggung jawab untuk tingkat kecamatan dan desa. Kelompok kerja gender dan petugas penghubung (*focal point*) gender harus terbentuk serupa dengan struktur nasional. Kepmendagri 132 membutuhkan sedikitnya 5% anggaran setiap provinsi, kabupaten dan kota untuk kegiatan pengarusutamaan gender.

Rencana pembangunan nasional 5 tahun (2010-2014) memiliki tiga prinsip pemandu utama: tata kelola yang baik, pembangunan berlanjut, dan pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan Gender harus dipadukan sebagai persoalan lintas sektor ke dalam semua lini kementerian dengan membuat anggaran yang tanggap gender.

4.2 State Ministry of Women Empowerment and Children Protection (MoWE)

Following up the Presidential Decree 9/2000, the MoWE has the principal function of formulating government policies in the areas of women empowerment, women welfare and children protection. It should also coordinates activities of the government agencies, the private sector and community based organizations.. Government agencies at the national level were advised to appoint gender focal points and to establish gender working groups to help integrate gender issues as a cross cutting issue in all fields and activity. The gender working groups were meant to identify gender gaps and gender-related problems, to provide technical assistance to their colleagues in implementing gender mainstreaming activities.

The State Ministry of Women Empowerment and Children Protection received technical leadership for supporting and coordinating line ministries in their efforts to set up gender mainstreaming strategies for their sectors following the presidential decree of 2000.

The MoWE was restructured in 2009 and 5 directorates were established , one of them dealing with forest, agriculture and fisheries. Each directorate has a Deputy and an Assistant Deputy. The focus is on strengthening capacities in Gender Mainstreaming and gender budgeting, e.g. the MoFor should develop a gender-sensitive budget.

The MoWE Assistant Deputy for agriculture, forestry and fisheries has the mandate to call for meetings with MoFor.

- to look at the output of performance based planning
- to support line ministries to develop gender-responsive planning and gender-responsive budgeting.
- to develop gender responsive budget guidelines (data collection)
- to have working relations with gender working groups and gender focal persons.

4.2 Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MoWE)

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9/2000, MoWE memiliki fungsi pokok merumuskan kebijakan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan, kesejahteraan perempuan, dan perlindungan anak. MoWE juga harus mengoordinasi kegiatan badan pemerintah, sektor swasta dan organisasi berbasis masyarakat. Instansi pemerintah di tingkat nasional dianjurkan untuk menunjuk *focal point* gender dan membentuk kelompok kerja gender guna membantu memadukan isu gender sebagai isu lintas sektor di semua bidang dan kegiatan. Kelompok kerja gender dimaksudkan untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dan isu yang terkait dengan gender, menyediakan bantuan teknis kepada rekan-rekan mereka dalam melaksanakan kegiatan pengarusutamaan gender.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapatkan pejabat-pejabat teknis untuk mendukung dan mengoordinasi kementerian lini dalam upaya mereka menyiapkan strategi pengarusutamaan gender untuk sektor masing-masing sesuai dengan instruksi presiden tahun 2000.

MoWE direstrukturisasi di tahun 2009 dan 5 direktorat dibentuk, salah satunya menangani kehutanan, pertanian, dan perikanan. Setiap direktorat memiliki seorang Wakil dan Asisten Wakil. Fokus kegiatannya adalah pada upaya memperkuat kapasitas dalam Pengarusutamaan Gender dan penganggaran gender, misalnya Kemenhut harus mengembangkan anggaran yang peka gender.

Asisten Wakil MoWE untuk pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki mandat untuk mengundang rapat dengan Kemenhut:

- untuk melihat keluaran perencanaan berbasis kinerja
- untuk mendukung kementerian lini guna mengembangkan perencanaan tanggap gender dan penganggaran tanggap gender.
- untuk mengembangkan panduan anggaran tanggap gender (pengumpulan data)
- untuk memiliki hubungan kerja dengan kelompok kerja gender dan focal point gender.

4.3 Gender Mainstreaming in the Forestry Sector

The MoFor published “Guidelines for the Implementation of Gender Mainstreaming in the Forestry Sector “(PUG), in 2004.

In 2007, MoF or gave directives regarding how gender mainstreaming should be implemented.

Under Presidential Instruction No. 9 / 2000 and other existing regulations, the Ministry of Forestry is responsible for developing a system of forestry gender responsive development. Concretely, the Forestry Department had the responsibility to implement the planning, implementation, monitoring and evaluation of policies, programmes and activities that are gender responsive. It assured that the men and women who are in the forestry sector have a role, gain access, benefits, and control over a fair share in forest development. On the basis of the above, in 2003, the Ministry of Forestry has established a gender focal person and a gender working group at MoFor through the Minister of Forestry Decree No. 82/Kpts-II/2003 with the tasks,

- to integrate gender mainstreaming in the forestry sector in policy planning, program planning, project planning, and planning activities;
- to insure gender mainstreaming in the implementation of the forestry sector development;
- to monitor and evaluate gender mainstreaming in the forestry sector;
- to coordinate cooperation of cross-agencies and intergovernmental Working Groups on Gender Mainstreaming at each echelon in the implementation of gender mainstreaming.

Activities to be implemented by the gender working group in MoFor in 2005 were: Human Resource Development through Gender Mainstreaming Training Center Dissemination of information regarding Gender Mainstreaming at Regional level Preparation of leaflets and handbook organisation of coordination meetings.

4.3 Pengarusutamaan Gender di Sektor Kehutanan

Kemenhut menerbitkan “Panduan untuk Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Sektor Kehutanan” di tahun 2004. Di tahun 2007, Kemenhut memberikan arahan mengenai cara pengarusutamaan gender dilaksanakan.

Menurut Instruksi Presiden No. 9/2000 dan peraturan yang ada lainnya, Kementerian Kehutanan bertanggung jawab atas pengembangan sistem pembangunan kehutanan tanggap gender. Secara konkret, Kementerian Kehutanan bertanggung jawab menjalankan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan yang tanggap gender. Kementerian ini memastikan bahwa laki-laki dan perempuan di sektor kehutanan memiliki peran, memperoleh akses, manfaat, dan kontrol atas bagian yang adil dalam pembangunan kehutanan. Atas dasar itu, di tahun 2003, Kementerian Kehutanan telah membentuk *focal point* gender dan kelompok kerja gender pada Kemenhut melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 82/Kpts-II/2003 dengan tugas-tugas:

- memadukan pengarusutamaan gender di sektor kehutanan dalam perencanaan kebijakan, perencanaan program, perencanaan proyek, dan kegiatan perencanaan;
- menjamin pengarusutamaan gender dalam hal implementasi pembangunan sektor kehutanan;
- memantau dan mengevaluasi pengarusutamaan gender di sektor kehutanan;
- mengoordinasi kerjasama lintas lembaga dan Kelompok Kerja Antar pemerintah tentang Pengarusutamaan Gender pada setiap eselon dalam implementasi pengarusutamaan gender.

Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh kelompok kerja gender di lingkup Kemenhut di tahun 2005 adalah:

- Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pusat Pelatihan Pengarusutamaan Gender
- Penyebaran informasi mengenai Pengarusutamaan Gender di tingkat daerah
- Penyiapan brosur dan buku pegangan; penyelenggaraan rapat koordinasi.

Findings from Institutional Analysis

Chapter 5 describes how mandates and guidelines for gender mainstreaming were implemented in the forest sector at national, provincial and district level.

5.1 Gender Mainstreaming in the Ministry of Forestry at National level

The Ministry of Forestry established a gender working group and a gender focal point in 2004, following the mandating decree for gender mainstreaming. The Gender Working Group was headed by the undersecretary, members were section directors. They were all male.

The secretary and the gender focal person were the only females. They came from sub-ordinate positions and had no decision-making power.

The group succeeded in producing two booklets. One booklet analysed the MoFor and its Gender Mainstreaming approach and concluded that the planning was not gender-responsive. The other booklet described practical experience conducting gender analysis in natural resource management in communities surrounding forests.

The Minister is supposed to report every year about the gender mainstreaming activities of the MoFor to the Ministry of Women Empowerment. However, the position of the MoWE is too weak to enforce this rule on the Minister.

A new minister took over the position in 2009 and the gender working group became silent. The gender working group has no power to impose gender guidelines on the minister. So, at the moment, no report is written, no gender responsive programme planned and there is no mechanism to enforce the issue.

Temuan dari Analisis Kelembagaan

Bab 5 menguraikan cara mandat dan pedoman untuk pengarusutamaan gender dilaksanakan di sektor kehutanan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.

5.1 Pengarusutamaan Gender di Kementerian Kehutanan pada tingkat Nasional

Kementerian Kehutanan membentuk kelompok kerja gender dan *focal point* gender di tahun 2004, mengikuti terbitnya putusan yang memberikan mandat bagi pengarusutamaan gender. Kelompok Kerja Gender dikepalai oleh asisten menteri, anggotanya adalah direktur-direktur. Semuanya laki-laki.

Hanya sekretaris dan *focal point* gender yang perempuan. Mereka berasal dari jabatan yang lebih rendah dan tidak memiliki kekuasaan mengambil putusan. Kelompok Kerja berhasil menyusun dua buklet. Satu buklet menganalisis Kemenhut dan pendekatan Pengarusutamaan Gendernya dan menyimpulkan bahwa perencanaan tidak tanggap gender. Buklet lainnya menguraikan pengalaman praktis mengadakan analisis gender dalam pengelolaan sumber daya alam di masyarakat di sekitar hutan.

Menteri diharapkan untuk melaporkan setiap tahun tentang kegiatan pengarusutamaan gender Kemenhut kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Akan tetapi, posisi MoWE terlalu lemah untuk menegakkan aturan ini terhadap sang menteri. Menteri baru mengambil alih jabatan di tahun 2009 dan kelompok kerja gender menjadi mandeg. Kelompok kerja gender tidak memiliki kekuasaan untuk memaksakan panduan gender pada sang menteri. Maka, pada saat ini, tidak ada laporan tertulis, tidak ada program tanggap gender yang direncanakan, dan tidak ada mekanisme untuk menuntaskan persoalan ini.

There is no internal Gender Mainstreaming strategy for staff development within the MoFor. A quota system is unpopular and not developed. There are no more than 10% female employees in the Forestry sector. Women are still not accepted. The gender focal person assumed that women are only chosen when there is a small budget, because their salaries are lower. There is very little competence in handling gender issues. Most people still refer to gender as a woman's issues. Forestry is a traditionally male sector. The staff is not motivated and the gender topic is not popular. Male dominated sectors usually want to delegate gender aspects to the MoWE to assist integrating gender into their plans.

MoWE faces difficulties in implementing gender mainstreaming in line ministries which are not related to traditional female roles, such as health and education.

The position of the Assistant Deputy for agriculture, forestry and fisheries, created in 2010 is still new and not yet fully working. The status is still too low to approach a minister to follow up the requests of a gender working group. It is still unclear how an Assistant Deputy can support the gender focal persons in sectors whose leaders are unmotivated.

MoWE still lacks data on women in forest management. There is "on-going data collection" but it remains unclear what kind of data are collected.

MoWE has tried to raise the status of the edict from 2000 from a presidential decree to a presidential regulation so that it would command the legal power to make obligatory the implementation of gender mainstreaming as a development strategy (ADB, 2006)

The Ministry supports the line ministries to develop mechanisms and GAD guidelines for their respective sectors and to develop a sector-specific "Guidebook on implementation". There is still a clear division of skills and labour. The gender expertise is with the MoWE, while the line ministries have sector knowledge.

Tidak ada strategi Pengarusutamaan Gender internal untuk pengembangan staf di dalam Kemenhut. Sistem kuota tidak populer dan tidak dikembangkan. Tidak lebih dari 10% karyawan yang perempuan di sektor Kehutanan. Perempuan masih tidak diterima. Petugas *focal point* gender menganggap bahwa perempuan hanya dipilih bila anggarannya kecil, karena gaji mereka lebih rendah. Sangat kecil kecakapan dalam menangani masalah gender. Sebagian besar orang masih merujuk kepada gender sebagai masalah perempuan. Kehutanan adalah sektor laki-laki secara tradisional. Staf tidak termotivasi dan topik gender tidak populer. Sektor yang didominasi laki-laki biasanya ingin menyerahkan aspek gender kepada MoWE untuk membantu memadukan gender ke dalam rencana mereka.

MoWE menghadapi kesulitan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender di kementerian lini yang tidak terkait dengan peran tradisional perempuan, seperti kesehatan dan pendidikan.

Posisi Wakil Asisten untuk pertanian, kehutanan dan perikanan, yang diciptakan di tahun 2010 masih baru dan belum sepenuhnya berfungsi. Status ini masih terlalu rendah untuk mendekati menteri guna menindaklanjuti permintaan kelompok kerja gender. Masih belum jelas cara Wakil Asisten dapat mendukung *focal point* gender di sektor yang pemimpinnya tidak termotivasi.

MoWE masih kekurangan data tentang perempuan dalam pengelolaan hutan. Ada "pengumpulan data yang berlanjut", namun tidak jelas macam data yang dikumpulkan.

MoWE telah mencoba menaikkan status Instruksi Presiden tahun 2000 presiden menjadi Peraturan Presiden sehingga akan memiliki kekuatan hukum untuk mewajibkan pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan (ADB, 2006).

Kementerian ini mendukung kementerian lini untuk mengembangkan mekanisme dan panduan Gender and Development bagi sektor masing-masing dan mengembangkan "Panduan tentang Pelaksanaan" khusus sektor. Masih ada pembagian keterampilan dan tenaga kerja yang mencolok. Kepakaran gender adalah pada MoWE, sementara kementerian lini memiliki pengetahuan sektor.

It is a challenge for MoWE to integrate Gender Mainstreaming into sector approaches without in-depth sector knowledge and without a sex-disaggregated database in the situation analysis.

5.2 Implementation of Gender Mainstreaming at the Provincial level

The Ministerial Decree 132 on gender mainstreaming in regional development, district planning, implementation and monitoring and evaluation was released in 2003. Capacity building in gender responsive planning was perceived as a priority activity by local government institutions. (ADB 2004, 35)

Women Empowerment Divisions (WED) were to be established at the provincial level to disseminate knowledge and skills in implementing gender mainstreaming in programmes in each line ministry. WED should also collect sex-disaggregated data.

The WED were in charge of providing training to line ministries in gender responsive budgeting, mainly in the sectors education and health. However, they were not assigned to train the forestry section.

“Although the government has designed and put into place legal frameworks and policy instruments that are decidedly tactical, its agencies continue to have limited fundamental understanding and appreciation of the benefits and importance of mainstreaming gender perspectives within their policies and programmes. (ADB, 2006, p.34)

“The WEDs’ capacity to promote gender mainstreaming is often limited by the positions of the unit heads within the government apparatus structure among the WEDs across Indonesia. More than half (54%) are headed by low-ranking officers of echelon 4 (the lowest rank in the civil service hierarchy). This constraint limits the WEDs’ ability to influence higher level public servants to mainstream gender in their development strategies.” (ADB, 2006, p.35)

Inilah tantangan untuk MoWE untuk memadukan Pengarusutamaan Gender ke dalam pendekatan sektor tanpa pengetahuan sektor yang mendalam dan tanpa basis data yang terpisah seks dalam analisis situasi.

5.2 Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di tingkat Provinsi

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kabupaten diterbitkan di tahun 2003. Pembangunan kapasitas dalam perencanaan tanggap gender ditanggapi sebagai kegiatan prioritas oleh lembaga pemerintah setempat. (ADB 2004, h. 35)

Unit Kerja atau Instansi Pemberdayaan Perempuan (WED) dibentuk pada tingkat provinsi untuk menyebarluaskan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender dalam program di setiap kementerian lini. WED juga harus mengumpulkan data yang terpisah seks.

WED ditugasi untuk menyediakan pelatihan kepada kementerian lini dalam penganggaran tanggap gender, utamanya di sektor pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi, mereka tidak ditugasi untuk melatih bagian kehutanan.

“Walaupun pemerintah telah merancang dan menyediakan kerangka hukum dan instrumen kebijakan yang sengaja dirancang taktis, badan-badannya masih memiliki pemahaman mendasar dan penghargaan yang terbatas tentang manfaat dan arti penting sudut pandang pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan program mereka. (ADB, 2006, h. 34)

“Kapasitas WED untuk mempromosikan pengarusutamaan gender sering terhalang oleh jabatan kepala unit di dalam struktur aparat pemerintah di antara WED di seluruh Indonesia. Lebih dari setengahnya (54%) dikepalai oleh staf berpangkat rendah dari eselon 4 (pangkat jabatan struktural terendah dalam hirarki pegawai negeri sipil). Kendala ini membatasi kemampuan WED mempengaruhi pegawai negeri berpangkat lebih tinggi untuk mengarusutamakan gender dalam strategi pembangunan mereka.” (ADB, 2006, h. 35)

The institutional analysis of the provincial forest office in Samarinda (East Kalimantan) showed there was neither a Gender Working Group nor a Gender Focal Person. Gender as a topic was never introduced. Gender is still seen as a women's issue and women are appointed when required for gender workshops, irrespective of their professional expertise. There is little awareness of the lack of gender issues in forest management. Competence in conducting gender analysis in community based activities is low. Gender-sensitive planning is still a new topic in the department.

There is a large gender imbalance in staff structure in Provincial Forestry Service of East Kalimantan. At the Provincial level, there are 528 staff members, but only 66 are women. For structural positions are dominated also by males:

POSITION	MALE	FEMALE	TOTAL M + F
Echelon II	1	-	1
Echelon III	8	-	8
Echelon IV	30	7	37
Total	39	7	46

*) Include branch office (UPTD) under Provincial Forestry Service of East Kalimantan

**) Source from Administration Unit of Provincial Forestry Service of East Kalimantan

The new 5-year-plan of the Forestry Sector has eight priority areas. One of them is the community participation and the empowerment of communities which live in areas around forests. Communities consist of male and female members. If the Forest Department wants the support of all community members, it must integrate a gender approach.

BAPPEDA, the Regional Development Planning Agency in Samarinda, has the mandate to combine provincial 5-year-plans with national policies.

BAPPEDA Samarinda delegated gender mainstreaming activities to the Human Resource Management Division. The two representatives interviewed were well informed about indicators regarding Human Development Index (HDI)

Analisis kelembagaan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda memperlihatkan bahwa tidak ada Kelompok Kerja Gender maupun Focal point Gender. Gender sebagai topik tidak pernah diperkenalkan. Gender masih terlihat sebagai masalah perempuan dan perempuan ditunjuk saat dibutuhkan untuk lokakarya gender, tanpa memandang kepakaran profesionalnya. Ada sedikit kesadaran akan minimnya masalah gender dalam pengelolaan hutan. Kecakapan dalam mengadakan analisis gender dalam kegiatan berbasis masyarakat adalah rendah. Perencanaan peka gender masih topik baru di Dinas Kehutanan ini.

Ada ketimpangan gender yang besar dalam struktur staf di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dimana ada 528 staf, namun hanya 66 yang perempuan. Sedangkan posisi jabatan struktural juga didominasi laki-laki sbb:

JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH L + P
Eselon II	1	-	1
Eselon III	8	-	8
Eselon IV	30	7	37
Jumlah	39	7	46

*) Data termasuk UPTD dibawah Dishutprov Kaltim

**) Informasi Bagian Tata Usaha Dishutprov Kaltim.

Rencana 5 tahun Sektor Kehutanan yang baru memiliki delapan area prioritas. Salah satunya adalah peran serta masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan. Masyarakat terdiri atas anggota laki-laki dan perempuan. Jika ingin mendukung semua anggota masyarakat, Dinas Kehutanan harus memadukan pendekatan gender.

BAPPEDA, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, memiliki mandat untuk menggabungkan rencana 5 tahun provinsi dengan kebijakan nasional.

BAPPEDA Kaltim menyerahkan kegiatan pengarusutamaan gender kepada Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia. Dua wakil yang diwawancarai cukup mengetahui tentang indikator-indikator bagi Indeks Pembangunan Manusia (HDI) dan Ukuran Pembangunan Gender (GEM) karena

and Gender Development Measure (GEM) because these indicators are used to assess their performance. The GEM is composed of 3 elements, percentage of women employment in the formal sector, illiteracy rate of women over 15 years and participation in government agencies.

BAPPEDA Samarinda was concerned about their results. East-Kalimantan is in place 5 of 33 Indonesian provinces regarding the HDI, because it is a rich province. But it is only in place 30 regarding the GEM. Men still have the most access to formal employment in logging and mining companies. Women's work which takes place in the informal sectors is not considered in the official statistics.

BAPPEDA representatives supported the finding that the integration of gender mainstreaming through gender-responsive planning took place in health and education, but Forestry and Agriculture were left behind. They showed interest in getting more involved in gender mainstreaming activities in order to raise their GEM.

5.3 Gender Mainstreaming in the Forestry Department at District level

National level must refer to presidential decrees, i.e., Gender Mainstreaming of 2000. Provincial level only should "consider" it.

It is not obligatory for local governments under the decentralisation law to integrate gender mainstreaming in Forest Management if it is not considered relevant. Gender mainstreaming is obligatory in health and education. It remains an "optional function" for district decision makers if they want to create a gender unit in their services or not.

The MoWE, however, recommends a holistic approach by setting up gender working groups at each level of the local government. Membership should be drawn from all government agencies, community-based organisations and women's study centres. (ADB, 2006, p. 33)

semua indikator ini digunakan untuk menilai kinerja mereka. GEM tersusun dari 3 elemen: persentase mempekerjakan perempuan di sektor formal, tingkat buta huruf perempuan di atas usia 15 tahun, dan peran serta perempuan dalam badan pemerintah.

BAPPEDA Kaltim prihatin dengan hasil-hasil mereka. Kalimantan Timur menempati posisi 5 dari 33 provinsi Indonesia dalam hal HDI, karena merupakan provinsi yang kaya. Namun, provinsi ini hanya menempati posisi 30 dalam hal GEM. Laki-laki masih menguasai sebagian besar akses ke pekerjaan formal di perusahaan perkebunan dan pertambangan. Kerja perempuan yang berlangsung di sektor informal tidak diperhatikan dalam statistik resmi.

Para wakil BAPPEDA mendukung temuan bahwa pemaduan pengarusutamaan gender melalui perencanaan tanggap gender berlangsung di bidang kesehatan dan pendidikan, namun bidang kehutanan dan pertanian tertinggal. Mereka menunjukkan minat untuk lebih terlibat dalam kegiatan pengarusutamaan gender guna meningkatkan GEM.

5.3 Pengarusutamaan Gender di sektor Kehutanan pada Tingkat Kabupaten

Tingkat nasional harus merujuk ke instruksi presiden, yakni Pengarusutamaan Gender tahun 2000. Tingkat provinsi hanya perlu "memperhatikan" instruksi itu.

Instruksi untuk memadukan pengarusutamaan gender dalam pengelolaan hutan tidak bersifat wajib bagi pemerintah daerah menurut undang-undang desentralisasi jika tidak dianggap relevan. Pengarusutamaan gender bersifat wajib di bidang kesehatan dan pendidikan. Hal itu tetap "fungsi opsional" untuk pembuat kebijakan kabupaten apakah mereka ingin atau tidak menciptakan unit gender dalam dinas-dinas mereka.

Namun, MoWE menyarankan pendekatan holistik dengan menyiapkan kelompok kerja gender di setiap tingkat pemerintah daerah. Keanggotaan diambil dari semua instansi pemerintah, organisasi berbasis masyarakat dan pusat studi perempuan. (ADB, 2006, h. 33)

Kementerian menawarkan kepada pemerintah tingkat subnasional 20% anggarannya untuk menggerakkan prakarsa pengarusutamaan gender di tingkat provinsi

The Ministry offers to sub-national level governments 20% of its budget to motivate gender mainstreaming initiatives at the provincial and district levels. The aim is to increase government officials interest in gender issues and questions of gender equality.

A focus group discussion in Putusibau with a good representation of Forestry services and some local NGOs revealed that the gender concept and gender mainstreaming were new terms for the participants. In order to empower women, Women Empowerment Services Office has some programmes for rural areas based on West Kalimantan's Governor decree. This did not occur in Menua Sadap because the village was not on the list of the Rural Place Programme to be facilitated by them. There was joint working with Forest District Services for womens programmes in some rural place surrounding the forest, but no long term programmes.

In implementation, there is still a lack of budget resources and human resources to reach the rural and remote locations on their programme. Most of their programmes are concerned with generating income for women; i.e: handicrafts and weaving.

Other Services and Organizations in Kapuas Hulu

BAPPEDA	• Focus on Development Planning. • Concerned about Women Trafficking issues in border areas; • Women and gender issues included in the Social and Cultural Division; • Cooperation with Women Empowerment Services for publications and outreach activities
BPS- Statistical office	• Focus on statistics based on population census (women and men) in every 10 year; • Census for agriculture and economics; activities for Village Potential Survey • Lack of sex-segregated database
Forest Services	• Forest District Management; • Established Farmer Groups who lived in the surroundings of forests; • Encouraged women to become involved in the groups

dan kabupaten. Tujuannya adalah menaikkan minat pejabat pemerintah dalam masalah gender dan persoalan kesetaraan gender.

Diskusi kelompok terfokus di Putusibau – Kab. Kapuas Hulu dengan perwakilan Dinas Kehutanan dan beberapa LSM setempat mengungkapkan bahwa konsep gender dan pengarusutamaan gender adalah istilah-istilah baru bagi peserta. Untuk memberdayakan perempuan, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan memiliki beberapa program untuk area pedesaan berdasarkan putusan Gubernur Kalimantan Barat. Hal ini tidak terjadi di Menua Sadap karena desa itu tidak masuk daftar Program Pembangunan Pedesaan untuk mereka fasilitasi. Ada kerja bersama dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu untuk program pemberdayaan perempuan di beberapa area pedesaan di sekitar hutan, namun tidak ada program jangka panjang.

Dalam pelaksanaan, masih ada kekurangan sumber daya anggaran dan sumber daya manusia untuk menjangkau pedesaan dan lokasi terpencil pada program mereka. Sebagian besar program menaruh perhatian pada penciptaan pendapatan untuk perempuan, yakni, kerajinan tangan dan tenun-menun.

Dinas dan Organisasi lainnya di Kab. Kapuas Hulu dan peran-perannya.

BAPPEDA	• Fokus pada Perencanaan Pembangunan. • Memprihatinkan masalah Penyelundupan Perempuan di daerah perbatasan; • Masalah perempuan dan gender tercakup dalam Divisi Sosial dan Budaya; • Kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk kegiatan penerbitan dan penjangkauan
BPS- Kantor Statistik	• Fokus pada statistik yang berdasarkan sensus penduduk (perempuan dan laki-laki) setiap 10 tahun; • Sensus untuk pertanian dan ekonomi; kegiatan untuk Survei Potensi Desa • Minim basis data yang terpisah seks

National Park Betung Kerihung	• Focus on National Park Management; • Provides seeds plan and fish for rehabilitation; • Gives capacity building for communities how to deal with tourists
FFI	• Has some projects in Kapuas Hulu; • Uses the gender aspect as the approach for programme implementation; • Open for joint programmes and networking
DED	• Technical Assistant • Capacity building

Some coordination of services already takes place. Representatives of the above mentioned institutions in Kapuas Hulu District recommended during a meeting on 1.11.10:

- capacity building for women who live in rural areas
- training to upgrade their skills in economic and product development;
- increase number of male staff members in Women Empowerment Services so the meaning of “gender approach” is understood
- develop gender mainstreaming in SKPD supported by budget and gender- responsive programmes;
- conduct meetings and seminars to disseminate information about gender concept at district level government.

Dinas Kehutanan	• Pengelolaan Kehutanan Kabupaten; • Membentuk Kelompok Petani yang tinggal di sekitar hutan; • Mendorong perempuan untuk terlibat dalam kelompok
Taman Nasional Betung Kerihun	• Fokus pada Pengelolaan Taman Nasional; • Menyediakan tumbuhan benih dan ikan untuk rehabilitasi; • Memberikan pembangunan kapasitas untuk masyarakat mengenai cara menghadapi wisatawan
FFI (Flora Fauna International)	• Memiliki beberapa proyek di Kapuas Hulu; • Menggunakan aspek gender sebagai pendekatan untuk implementasi program; • Terbuka untuk program bersama dan pembentukan jejaring
DED	• Bantuan teknis • Pembangunan kapasitas

Sebagian kegiatan koordinasi sudah berlangsung. Wakil-wakil dari lembaga di Kabupaten Kapuas Hulu yang disebutkan di atas pada rapat tanggal 1 November 2010 menyarankan sebagai berikut:

- pembangunan kapasitas untuk perempuan yang hidup di daerah pedesaan
- pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka di bidang ekonomi dan pengembangan produk;
- meningkatkan jumlah anggota staf laki-laki di Kantor Pemberdayaan Perempuan sehingga arti “pendekatan gender” dipahami
- mengembangkan pengarusutamaan gender dalam instansi Pemerintah Daerah yang didukung oleh anggaran dan program tanggap gender;
- mengadakan rapat dan seminar untuk menyebarluaskan informasi tentang konsep gender pada tingkat pemerintahan kabupaten.



Gender Analysis of Target groups

Chapter 6 describes the preparation, implementation and evaluation phase of the learning process of the Gender Research Team applying participatory tools for gender analysis. Results from the analysis of a forest community and identified gender roles

6.1 Preparation phase

A flexible approach was chosen to respond to the actual situations and needs of people. “Learning-by-doing” and joint reflection about results and personal experiences were the basic elements of the learning process.

The members of the Gender Research Team (GRT) were selected by FORCLIME, Samarinda. They came from different professional background (see Annex) and had different experience in data collection and procession. An initial self-assessment demonstrated that most members had little knowledge about the gender approach and desired more information about its topics and strategies. Participants also had little experience facilitating participatory tools in rapid appraisals. They were more used to conducting semi-structured interviews and compiling data on the computer.

The preparation of the GRT covered a short introduction into basics of the gender mainstreaming concept and its relevance in the forestry sector, especially in the REDD framework. Inputs about gender analysis and participatory rapid appraisals were provided.

Following the Harvard Framework of Gender Analysis, 6 topics and tools for data collection were chosen. Their outlines had to be adapted to relevant topics of the community based forest management and operationalised (“steps to be taken”) considering the participants facilitation skills.

Analisis Gender Kelompok Sasaran

Bab 6 menguraikan tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran Tim Penelitian Gender yang telah menerima materi pengenalan alat partisipatif untuk analisis gender. Hasil-basil dari analisis masyarakat hutan dan peran gender yang teridentifikasi.

6.1 Tahap persiapan

Pendekatan yang fleksibel dipilih untuk menjawab situasi aktual dan kebutuhan orang-orang. “Belajar dengan melakukan” dan perenungan bersama mengenai hasil dan pengalaman pribadi adalah elemen dasar proses pembelajaran.

Anggota Tim Penelitian Gender (GRT) dipilih oleh FORCLIME Samarinda. Mereka datang dari berbagai latar belakang profesional (lihat Lampiran) dan memiliki beragam pengalaman dalam pengumpulan dan pengolahan data. Sebuah pengkajian diri awal memperlihatkan bahwa sebagian besar anggota memiliki sedikit pengetahuan tentang pendekatan gender dan menginginkan informasi lebih lanjut tentang topik-topik dan strategi-strateginya. Peserta juga memiliki sedikit pengalaman memfasilitasi alat partisipatif dalam kajian secara cepat. Mereka lebih terbiasa dengan mengadakan wawancara semi-terstruktur dan menyusun data pada komputer.

Persiapan GRT mencakup pengenalan singkat ke dasar-dasar konsep pengarusutamaan gender dan relevansinya dalam sektor kehutanan, khususnya dalam kerangka kerja REDD. Masukan tentang analisis gender dan penilaian cepat partisipatif disediakan.

Dengan mengikuti Kerangka Kerja Analisis Gender Harvard, 6 topik dan alat untuk pengumpulan data dipilih. Garis besarnya telah disesuaikan dengan topik terkait dari pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan diterapkan (“langkah yang harus diambil”) dengan mempertimbangkan keterampilan fasilitasi peserta.

Participants gain practical experience applying the tools with their own case studies.

One GRT member came from a Dayak community and contributed a good knowledge base used to adapt the tools to the specific features of Dayak forest communities. She also acted as interpreter in the village.

Topics	Tools	Steps to be taken /Sample
Division of labour between men and women	Profile of division of labour between young and adult women, young and adult men	- Conduct focus group discussions in specific groups of young women (under 18 years), adult women, young men (under 22 years), adult men. - They rank their involvement in the division of labour using the profile. - Conduct a village meeting. - Representatives of each group present their results (start with the weakest group) - Facilitate plenary discussion
Access to and control over land and other natural resources	Semi-structured interviews or Focus Group Discussion	Conduct semi-structured interviews with village leadership and other key informants (50% women)
Gender- and age-specific use of natural resources	5 questions : - most important natural resources and their use - changes in availability and quality of natural resources - coping strategies - recommendations	- Conduct focus group discussions in specific groups of young women (under 18 years), adult women, young men (under 22 years), adult men. - Visualise results on cards. - Conduct village meetings - Representatives of each group present their results.
Decision making in households	Profile of decision-making at household level	- Interview family members in sex-segregated groups - Complete profile for each group - Compare profiles
Participation in public meetings (Land Use Planning)	Semi-structured interviews Profile of qualitative participation in public meetings	- Conduct interviews with male and female community members - Observe “traditional” village meetings and complete profile - Present results to village meeting and request feedback
Education, health, migration	Semi-structured interview	Conduct interviews with teachers, nurses and other key informants

(Profiles and questionnaires are in the Annex)

At the end of the preparation phase, GRT members shared responsibilities regarding the tools.

Peserta meraih pengalaman praktis dalam menerapkan alat dengan studi kasus mereka sendiri.

Satu anggota GRT berasal dari masyarakat Dayak dan menyumbangkan basis pengetahuan yang bagus yang digunakan untuk menyesuaikan alat dengan ciri-ciri tertentu masyarakat hutan Dayak. Dia juga bertindak sebagai penerjemah di desa.

Topik	Alat	Langkah yang harus diambil/Contoh
Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan	Profil pembagian kerja antara perempuan muda dan dewasa, laki-laki muda dan dewasa	▪ Melakukan diskusi kelompok fokus dalam kelompok khusus perempuan muda (di bawah 18 tahun), perempuan dewasa, laki-laki muda (di bawah 22 tahun), laki-laki dewasa. ▪ Dengan profil tersebut, mereka membuat peringkat keterlibatan mereka dalam pembagian kerja. ▪ Melakukan rapat desa. ▪ Wakil-wakil setiap kelompok memaparkan hasil mereka (mulai dengan kelompok terlemah) ▪ Memfasilitasi diskusi pleno
Akses ke dan kontrol atas sumber daya tanah dan alam lainnya	Wawancara semi-terstruktur atau Diskusi Kelompok Fokus	Melakukan wawancara semi-terstruktur dengan pimpinan desa dan pemberi informasi utama lainnya (50% perempuan)
Penggunaan sumber daya alam menurut gender dan umur	5 pertanyaan: ▪ sumber daya alam paling penting dan penggunaannya ▪ perubahan dalam ketersediaan dan mutu sumber daya alam ▪ strategi penanggulangan ▪ saran	▪ Melakukan diskusi kelompok fokus dalam kelompok khusus perempuan muda (di bawah 18 tahun), perempuan dewasa, laki-laki muda (di bawah 22 tahun), laki-laki dewasa. ▪ Memvisualisasi hasil pada kartu. ▪ Melakukan rapat desa ▪ Wakil setiap kelompok memaparkan hasil mereka.
Pengambilan putusan di rumah tangga	Profil pengambilan putusan pada tingkat rumah tangga	▪ Wawancara anggota keluarga dalam kelompok seks yang terpisah ▪ Melengkapi profil untuk setiap kelompok ▪ Membandingkan profil
Peran serta dalam rapat umum (Perencanaan Tata Guna Lahan)	Wawancara semi-terstruktur Profil peran serta kualitatif dalam rapat umum	▪ Melakukan wawancara dengan anggota masyarakat laki-laki dan perempuan ▪ Mengamati rapat desa “tradisional” dan melengkapi profil ▪ Memaparkan hasil ke rapat desa dan meminta umpan balik
Pendidikan, kesehatan, migrasi	Wawancara semi-terstruktur	Melakukan wawancara dengan guru, bidan, dan pemberi informasi utama lainnya

(Profil dan kuesioner ada dalam Lampiran)

Di akhir tahap persiapan, anggota GRT membagi tanggung jawab mengenai siapa yang akan menggunakan alat yang mana dalam kajian gender di desa.

6.2 Implementation Phase

Gender Research Team members were expected by the people of Menua Sadap, due to prior announcements by FORCLIME. The GRT slept and ate in teams of two in houses of individual Dayak families who received a small payment in return. The objectives of the GRT assignment were unclear to the village leaders. The first village meeting included only the GRT, 6 male community members and one female PKK representative in order to clarify the situation. Village leadership asked many questions about the intentions of GRT and the REDD concept. There was a criticism regarding the benefits from the National Park and related activities, but a final “go-ahead” was achieved.

GRT members became involved in many informal conversations, observations and organised their settings according to their tools and tasks.

Many adults leave Menua Sadap early in the morning to go to forest fields or to travel to other places of work. Elderly people and mothers with small children and the village school teacher are left behind. They were willing to be interviewed and interested in getting involved in the sessions conducted by the GRT. GRT had the chance to accompany some people to their fields or on the river. There was a language barrier because not all Dayak people speak Bahasa Indonesia.

The village leader invited the community members to a second, larger village meeting (20 women, 10 men) which was facilitated by the GRT.

Findings from Tool 1 and 3 were presented by the villagers and women and men were equally involved in the following discussion. “Needs” and recommendations were not discussed in detail because the GRT did not want to raise expectations. Feedback from village leadership and community members was very positive. They appreciated the participatory process and the feedback of results. After the meeting, collection of information continued and became much easier.

6.2 Tahap Pelaksanaan

Anggota Tim Penelitian Gender ditunggu oleh warga Menua Sadap, karena diumumkan sebelumnya oleh FORCLIME. GRT tidur dan makan dalam tim dua orang di rumah-rumah keluarga Dayak yang menerima sedikit pembayaran sebagai imbalan. Tujuan penugasan GRT tidak jelas bagi pemimpin desa. Rapat desa pertama menyertakan hanya GRT, 6 laki-laki anggota masyarakat, dan satu perempuan wakil PKK guna menjernihkan situasi. Pimpinan desa mengajukan banyak pertanyaan tentang niat GIZ dan konsep REDD. Ada kritikan mengenai manfaat Taman Nasional dan kegiatan terkait, namun “lampu hijau” akhirnya diperoleh.

Anggota GRT terlibat dalam banyak pembicaraan tak resmi dan pengamatan, serta mengatur suasana sesuai dengan alat dan tugas mereka. Banyak orang dewasa meninggalkan Menua Sadap dini hari untuk pergi ke hutan atau bepergian ke tempat kerja lainnya. Hanya orang-orang tua, ibu-ibu dengan anak-anak kecil serta guru sekolah desa yang tersisa di kampung. Mereka sukarela untuk diwawancarai dan berminat terlibat dalam sesi-sesi yang diadakan oleh GRT. GRT berkesempatan mendampingi sebagian orang ke sawah atau sungai. Ada hambatan bahasa karena tidak semua masyarakat Dayak di desa Menua Sadap fasih berbicara bahasa Indonesia.

Pemimpin desa mengundang anggota masyarakat ke rapat desa kedua yang lebih besar (20 perempuan, 10 laki-laki) yang difasilitasi oleh GRT. Temuan dari Alat 1 dan 3 dipaparkan oleh penduduk desa serta perempuan dan laki-laki terlibat secara setara dalam diskusi sesudahnya. “Kebutuhan” dan saran tidak dibahas secara terinci karena GRT tidak ingin meninggikan harapan. Umpan balik dari pimpinan dan anggota masyarakat desa sangat positif. Mereka menghargai proses partisipatif dan umpan balik dari hasil. Setelah rapat, pengumpulan informasi berlanjut dan menjadi jauh lebih mudah.

6.3 Evaluation Phase

Back in Putusibau GRT gave a feedback with their personal observations and challenges during the stay in this village.

They summarized and exchanged information according to their respective tools. They analyzed their findings and conclusions on specific gender roles in forest based communities. They learned to identify specific practical and strategic gender needs. They also developed recommendations on the basis of the identified needs.

Major findings, identified needs and recommendations were included in a power point presentation which was presented to an audience at national and provincial level.

The learning process was designed for 3 full weeks, 1 week preparation, 1 week implementation, 1 week evaluation. This had to be shortened, due to other important FORCLIME assignments. Much time was spent traveling under sometimes exhausting conditions. Arriving and departing from the district capital Putusibau by different planes took 3 days. Travelling to and leaving the village Menua Sadap took an additional 2 days because the roads were extremely bad in the rainy season.

6.4 Results from Target Group Analysis

6.4.1 General information about Menua Sadap

Menua Sadap belongs to Kecamatan Embaloh Hulu in the District of Kapuas Hulu. It is divided into 3 sub villages: Sadap, Klayam, and Karang Mbunut.

It has borders with the National Park in the North, Pulau Manak in the South, Mensiau and Labian in the West and Tamao in the East. Menua Sadap is located next to a big river which is of major importance to nutrition, transport and water. Roads are very bad, especially during the rainy season. This also applies to the main road which is a distance of 3 km and leads to Malaysia. Almost all people from Menua Sadap are Dayak people, who are Catholic. They still follow some traditional practices, such

6.3 Tahap Evaluasi

Kembali di Putusibau, GRT memberi umpan balik dengan pengamatan pribadi dan tantangan selama tinggal di desa. Mereka merangkum dan bertukar informasi sesuai dengan alat masing-masing. Mereka menganalisis temuan dan simpulan tentang peran gender tertentu di masyarakat berbasis hutan. Mereka belajar mengidentifikasi kebutuhan praktis dan strategis tertentu dari gender. Mereka juga mengembangkan saran atas dasar kebutuhan yang teridentifikasi.

Temuan besar, kebutuhan yang teridentifikasi, dan saran tercakup dalam dokumen Powerpoint yang dipaparkan kepada khalayak pada tingkat nasional dan provinsi.

Proses pembelajaran dirancang untuk 3 minggu penuh: 1 minggu persiapan, 1 minggu pelaksanaan, minggu evaluasi. Waktu ini harus diperpendek, karena penugasan penting FORCLIME lainnya. Banyak waktu dihabiskan untuk bepergian dalam kondisi yang kadang melelahkan. Tiba dan berangkat dari ibukota Kabupaten Putusibau dengan berbagai pesawat memakan waktu 3 hari. Perjalanan ke dan meninggalkan Desa Menua Sadap memakan waktu 2 hari lagi karena jalan sangat jelek di musim hujan.

6.4 Hasil-hasil dari Analisis Kelompok Sasaran

6.4.1 Informasi umum tentang Menua Sadap

Menua Sadap termasuk ke dalam Kecamatan Embaloh Hulu di Kabupaten Kapuas Hulu. Desa ini terbagi menjadi 3 dusun: Sadap, Klayam, dan Karang Mbunut.

Desa ini berbatasan dengan Taman Nasional Betung Kerihun di utara, Desa Pulau Manak di selatan, Mensiau dan Labian di barat, dan Tamao di timur. Menua Sadap berlokasi di tepi sungai Embaloh yang amat penting sebagai sumber ikan, prasarana angkutan, dan sumber air. Jalan sangat jelek, khususnya selama musim hujan. Kondisi ini juga terjadi pada jalan utama yang berjarak 3 km dan menuju ke Malaysia. Hampir semua orang dari Menua Sadap adalah suku Dayak, yang beragama Katolik. Mereka

as respecting the “Pantang” (abstinences). For example, during the period of mourning, guests are not allowed to visit a long house and community members are not allowed to perform their normal activities during certain times.

There are about 200 inhabitants in Menua Sadap, most of them living in a long house and in individual houses nearby. The main source of livelihood comes from small scale farming, corn and rice cultivation on dry land and hilly fields mixed with vegetables. They still follow patterns of shifting cultivation, but also farm nearby fields permanently.

People collect many forest products, such as wood for house construction, fire wood, bamboo, rattan, leaves, medical plants and many others. Fish is an important part of in the daily diet. There are a number of boats with diesel engines which are used to travel on the river to remote places in the forest. People keep chicken and pigs and hunt monkeys and other wild animals in the forest. Logging provides a source of income. Timber can be transported on the river.

There are few opportunities for cash income. Men, especially younger men, migrate to bigger towns or to Malaysia and leave the families behind. The dependency on cash remittances from outside labour could not be assessed. For this reason, there are more adult women than men in the village.

masih mengikuti sebagian praktik tradisional, seperti menghormati “pantangan”. Misalnya, selama masa duka, tamu tidak boleh mengunjungi rumah panjang dan anggota masyarakat tidak boleh melakukan kegiatan normal selama waktu tertentu.

Ada sekitar 200 warga di Menua Sadap, sebagian besar hidup di rumah panjang (*betang*) dan di rumah-rumah perseorangan di sekitarnya. Sumber utama nafkah berasal dari pertanian skala kecil, bercocok tanam jagung dan padi di lahan kering dan sawah-sawah berbukit yang dicampur dengan sayur-mayur. Mereka masih mengikuti pola ladang gilir balik (*shifting cultivation*), namun juga bercocok tanam di sawah-sawah sekitar secara tetap.

Orang-orang mengumpulkan banyak produk hutan, seperti kayu untuk bangunan rumah, kayu bakar, bambu, rotan, daun, tumbuhan obat, dan banyak lainnya. Ikan adalah bagian penting dari menu harian. Ada sejumlah perahu dengan mesin disel yang digunakan untuk bepergian di sungai ke tempat-tempat jauh di hutan. Penduduk memelihara ayam dan babi, serta berburu kera dan binatang liar lainnya di hutan. Pembalakan menyediakan sumber pendapatan. Kayu dapat diangkut di sungai.

Ada beberapa peluang mendapatkan pendapatan tunai. Laki-laki, khususnya yang muda, merantau ke kota lebih besar atau ke Malaysia dan meninggalkan keluarga. Ketergantungan pada kiriman uang dari tenaga kerja di luar tidak dapat dikaji. Karena itulah, ada lebih banyak perempuan dewasa daripada laki-



Figure 6.1.
Non timber forest products of Menua Sadap village



Gambar 6.1.
Hasil hutan bukan kayu dari Desa Menua Sadap

Village leadership is dominated by men, holding the positions of village head, head of Adat law, Kepala Dusun and security officer.

Villagers have established a flexible pipe from a spring and drinking water is accessible. Electricity is generated by a diesel engine for about 3 hours a day. A school, up to grade four, was opened in 1987, based on the initiative of the only teacher. In 2010, 25 pupils were enrolled, (about 50% girls), but attendance was irregular. Educational status of adults is perceived as low. It can be assumed that many adults have not gone beyond Grade 4 in Primary Education, due to lack of facilities and a lifestyle of migration due to shifting cultivation. In the past, teachers refused to live in Menua Sadap because it is remote and roads are extremely bad. Villagers are establishing a structure for a health post in self-help. People feel abandoned because government services are scarce and officers are not willing to remain in Menua Sadap.

6.4.2 Adat law and gender-specific ownership of land and resources

Dayak Iban living in Menua Sadap maintain their cultural and customary behaviour ruled by Adat law like other Dayaks in West Kalimantan. The influence of Adat is still demonstrated in cultivation; paddies and corn fields and an annual harvest celebration called 'Gaway'. Land, forests and rivers are owned by the communities in the tenurial system of the Iban people. This means they are allowed to use, manage and protect the resources, according to their personal subsistence needs. They also acknowledge that forests which are registered as National Parks belong to the Government.

People in Menua Sadap have rules, sanctions and punishment in case of violence against Adat law. There are a number of conflicts which are solved by local justices applying Adat law. If Adat law cannot solve the conflict, the case is transferred to national law. Adat law also applies to outsiders.

laki dewasa di desa ini. Pimpinan desa didominasi laki-laki yang menjabat kepala desa, kepala hukum adat, kepala dusun, dan kepala keamanan desa.

Desa telah membangun pipa paralon dari sebuah mata air dan air minum dapat diakses. Tenaga listrik dibangkitkan oleh mesin disel selama sekitar 3 jam per hari. Sekolah, hingga kelas empat, dibuka di tahun 1987, berdasarkan prakarsa satu-satunya guru. Di tahun 2010, 25 murid mendaftarkan diri, (sekitar 50% anak perempuan), namun kehadiran tidak teratur. Status pendidikan orang dewasa terkesan rendah. Boleh diasumsikan bahwa banyak orang dewasa belum pernah belajar lebih dari kelas 4 sekolah dasar, karena minimnya fasilitas, pola hidup merantau dan juga sistem perladangan gilir balik. Di masa lalu, para guru menolak hidup di Menua Sadap karena terpencil dan jalan ke sana teramat jelek. Penduduk desa mendirikan sendiri sebuah bangunan untuk pos kesehatan. Mereka merasa diabaikan karena layanan pemerintah langka dan pegawai pemerintahan tidak mau tinggal di Menua Sadap.

6.4.2 Hukum adat dan kepemilikan lahan dan sumber daya khusus gender

Orang Dayak Iban yang hidup di Menua Sadap memelihara budaya dan perilaku adat mereka yang diatur oleh hukum adat seperti suku-suku Dayak lainnya di Kalimantan Barat. Pengaruh adat masih terlihat dalam bercocok tanam; ladang padi dan jagung serta perayaan panen tahunan yang disebut dengan 'Gaway'. Tanah, hutan, dan sungai dimiliki oleh masyarakat dengan sistem kepemilikan suku Iban. Ini berarti bahwa mereka boleh menggunakan, mengelola, dan melindungi sumber daya, menurut kebutuhan penghidupan masing-masing. Mereka juga mengakui bahwa hutan yang tercatat sebagai Taman Nasional adalah milik pemerintah.

Orang di Menua Sadap memiliki aturan, sanksi, dan hukuman dalam hal pelanggaran hukum adat. Ada sejumlah konflik yang diselesaikan oleh pengadilan lokal yang memberlakukan hukum adat. Jika hukum adat tidak dapat menyelesaikan konflik, kasus dialihkan ke hukum nasional. Hukum adat juga berlaku bagi orang luar.

Men and women have the same right to inherit land from their parents. In some cases, parents divided the land among their male and female children when they were still alive. Men and women can also gain access to land through marriage.

6.4.3 Division of Labour

Productive activities: Land clearing is done primarily by old and young men. Cutting trees, burning bushes and preparing farm land is dominated by men. Sowing, transplanting and weeding is performed by both, but women have the larger and more time consuming share. Non Timber Forest Production from rattan and bamboo is dominated by women who produce handicrafts and have skills in weaving.

Reproductive activities and domestic tasks, such as collecting firewood, cleaning houses, washing clothes, cooking, taking care of children and looking after old and sick people are dominated by women. Men are less involved. In Menua Sadap, some men were looking after small children while their wives worked in the fields or outside the village.

Social activities, such as religious and community development meetings, are equally attended by women and men. Women are more involved in credit unions, PKK and weaving groups. Meetings related to the management of natural resources, for example, Land Use Planning meetings, are dominated by men. Women may attend the meetings but do not participate actively.

In general, women are responsible for providing the daily livelihood for the family. Men are expected to earn cash to pay expenses for schools, medical treatment, transportation, clothing and household assets. Women stay at home to feed the family with products from subsistence farming, while men migrate to towns or neighboring Malaysia to find cash earning jobs.

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mewarisi tanah dari orang tua mereka. Pada beberapa kejadian, orang tua membagi tanah di antara anak-anak laki-laki dan perempuannya saat masih hidup. Laki-laki dan perempuan juga dapat memperoleh akses ke tanah melalui perkawinan.

6.4.3 Pembagian Kerja

Kegiatan produktif: Pembukaan lahan dilakukan utamanya oleh laki-laki tua dan muda. Menebang pohon, membakar semak, dan menyiapkan lahan pertanian didominasi oleh laki-laki. Menyemai benih, menanam, dan menyingkir rumput dilakukan oleh kedua gender, namun perempuan mengambil bagian yang lebih besar dan lebih memakan waktu. Pemanfaatan Hasil Hutan Non-Kayu (HHNK) dari rotan dan bambu didominasi oleh kaum perempuan yang menghasilkan kerajinan tangan dan memiliki keterampilan menenun.

Kegiatan reproduktif dan tugas rumah tangga, seperti mengumpulkan kayu bakar, membersihkan rumah, mencuci pakaian, memasak, merawat anak-anak, dan merawat orang tua dan orang sakit didominasi oleh perempuan. Laki-laki kurang begitu terlibat. Di Menua Sadap, sebagian laki-laki mengasuh anak-anak kecil selagi para istri mereka bekerja di ladang atau di luar desa.

Kegiatan sosial, seperti pertemuan keagamaan dan pembangunan masyarakat, sama-sama dihadiri oleh perempuan dan laki-laki. Perempuan lebih terlibat dalam koperasi simpan-pinjam, PKK, dan kelompok penenun. Rapat-rapat yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, misalnya, Rapat Perencanaan Tata Guna Lahan, didominasi laki-laki. Perempuan dapat menghadiri rapat, namun tidak berperan serta secara aktif.

Secara umum, perempuan bertanggung jawab atas penyediaan makanan setiap hari untuk keluarga. Laki-laki diharapkan untuk memperoleh uang tunai guna membiayai pengeluaran untuk sekolah, perawatan kesehatan, angkutan, pakaian dan aset rumah tangga. Perempuan tinggal di rumah untuk memberi keluarga makan dengan hasil dari pertanian pangan, sementara laki-laki merantau ke kota atau ke negeri jiran Malaysia untuk mendapatkan pekerjaan berupah tunai.

6.4.4 Gender specific use of resources, impact of resource degradation and coping strategies

Topic	Men	Women
Most important natural resources and their usage	Trees, wood, medicinal plants, fruits, animals. Used for building houses, health, and hunting for consumption and cash	Rattan, bemban, umbud, leaves and firewood. Used for weaving, handicraft and home consumption
Changes of supplies and quality of natural resources	Resources still in place, but at increasing distance	There are still available, but becoming less and further away
Coping strategies	Replanting rehabilitation of forest for local needs	Re-planting of trees near houses and fields More use of NTFP Improvement of handicraft production
Recommendations from Menua Sadap	Capacity building on forest rehabilitation, intensified agriculture and local fisheries	Capacity building in agriculture, weaving, handicraft, market access and product modification

6.4.4 Penggunaan sumber daya khusus gender, dampak pemerosotan sumber daya, dan strategi penanggulangan

Topik	Laki-laki	Perempuan
Sumber daya alam terpenting dan pemakaiannya	Pohon, kayu, tumbuhan obat, buah, binatang. Digunakan untuk membangun rumah, kesehatan, dan berburu untuk dimakan dan dijual	Rotan, bemban, umbut, daun, dan kayu bakar. Digunakan untuk ditenun, kerajinan tangan, dan konsumsi rumah
Perubahan pasokan dan mutu sumber daya alam	Sumber daya masih tersedia, namun pada jarak yang semakin jauh	Masih tersedia, namun dengan jumlah berkurang dan jarak makin jauh
Strategi penanggulangan	Rehabilitasi penanaman kembali hutan untuk kebutuhan lokal	Penanaman kembali pohon dekat rumah dan ladang Penggunaan HHNK lebih banyak Peningkatan produksi kerajinan tangan
Saran dari Menua Sadap	Pembangunan kapasitas pada rehabilitasi hutan, pertanian intensif, dan penangkapan ikan lokal	Pembangunan kapasitas di bidang pertanian, tenun-menenun, kerajinan tangan, akses pasar, dan modifikasi produk

6.4.5 Gender-specific participation in decision making at household level

Decisions taken at household level	Gender-roles in decision-making
Agriculture, land clearing, education, health, buying furniture and large investments	Decided together
Cutting trees and cultivation of short term plantings	Decided by men, after consultation with women
Budget allocation for family consumption	Decided by women, after consultation with men

6.4.5 Peran serta khusus gender dalam pengambilan putusan di tingkat rumah tangga

Putusan yang diambil pada tingkat rumah tangga	Peran gender dalam pembuatan putusan
Pertanian, pembukaan lahan, pendidikan, kesehatan, pembelian furnitur, dan investasi besar	Diputuskan bersama
Menebang pohon dan pembudidayaan tanaman jangka pendek	Diputuskan oleh laki-laki, setelah berkonsultasi dengan perempuan
Penyisihan anggaran untuk konsumsi keluarga	Diputuskan oleh perempuan, setelah berkonsultasi dengan laki-laki

Women can sometimes decide alone, for example, when husbands die or go to work in Malaysia. The decision to cut trees for clearing new land is decided together. Men clear the land which women cultivate for family consumption.

Perempuan kadang-kadang dapat memutuskan sendiri, misalnya, saat suami telah meninggal dunia atau pergi bekerja di Malaysia. Putusan untuk menebang pohon bagi pembukaan lahan baru diputuskan bersama. Laki-laki membuka lahan yang dibudidayakan perempuan untuk konsumsi keluarga.

6.4.6 Gender specific participation in public meetings

In Menua Sadap, there are annual meetings to discuss agricultural issues such as cultivation, land clearing, seedling preparation and harvesting. There are special meetings for the womens group involved in handicrafts and weaving. Another public meeting was conducted about participatory mapping exercises. Sometimes, more women attend the meetings than men because many adult men leave the village for long periods to work elsewhere.

6.4.6 Peran serta khusus gender dalam rapat umum

Di Menua Sadap, ada rapat tahunan untuk membahas masalah pertanian seperti pembudidayaan, pembukaan lahan, penyiapan benih, dan pemanenan. Ada rapat khusus untuk kelompok perempuan yang terlibat dalam kerajinan tangan dan tenun-menun. Rapat umum lainnya diadakan mengenai pelaksanaan pemetaan partisipatif. Kadang-kadang, lebih banyak perempuan menghadiri rapat daripada laki-laki karena banyak laki-laki dewasa meninggalkan desa untuk waktu yang lama guna bekerja di tempat lain.

Women like to participate in agricultural and handicraft group meetings, while men got more involved in participatory mapping.

Participants of Land Use Planning meetings are local people, mostly men who have a good knowledge of the land or location and natural resources, extension officers from forest services and a team of facilitators. Women and men, old and young, are invited and attend Land Use Planning meetings. However, it was confirmed that the meetings were dominated by men and women and youth hardly spoke up or expressed their needs.

Women are present and have the opportunity to express their opinions, but keep quiet due to their lack of education, self-confidence and interest. They usually do not contribute to discussions and do not influence decisions regarding land use issues in spite of their important role in subsistence farming and handling NTFP.

Most decisions are taken by the male participants and agreements are handled solely by the Head of the village.

Perempuan suka berperan serta dalam rapat kelompok pertanian dan kerajinan tangan, sementara laki-laki lebih terlibat dalam pemetaan partisipatif.

Peserta Rapat Perencanaan Tata Guna Lahan adalah penduduk lokal, sebagian besar laki-laki yang berpengetahuan baik tentang tanah atau lokasi dan sumber daya alam, staf penyuluhan dari Dinas Kehutanan dan fasilitator tim. Perempuan dan laki-laki, tua dan muda, diundang dan menghadiri Rapat Perencanaan Tata Guna Lahan. Akan tetapi, dipastikan bahwa rapat didominasi oleh laki-laki dan perempuan serta kaum muda hampir tidak berbicara atau mengungkapkan kebutuhan mereka.

Perempuan hadir dan berpeluang mengekspresi pendapat, namun berdiam diri karena minimnya pendidikan, keyakinan diri, dan minat. Mereka biasanya tidak berkontribusi kepada diskusi dan tidak mempengaruhi putusan mengenai masalah tata guna lahan walaupun berperan penting dalam pertanian pangan dan penanganan Hasil Hutan Non Kayu (HHNK).

Sebagian besar putusan diambil oleh peserta laki-laki dan kesepakatan ditangani hanya oleh kepala desa.



Figure 6.2.
Involving the community



Gambar 6.2.
Melibatkan masyarakat

6.4.7 Recommendations from people of Menua Sadap

After the interviews and discussions, people from Menua Sadap were asked to make proposals for the future. The proposals were not discussed in depth because the GRT did not want to create expectations which later could not be met.

Proposals included the following points:

- a. Capacity building and awareness raising for men and women, old and young
 - reasons for degradation of land and resources
 - impacts of degradation of land and resources
 - subjects related to gender roles and gender specific needs at local level.
 - relevance of gender issues in workshops and meetings related to land use and village planning
- b. Village planning for sustainable forest management based on active participation by women and men
- c. Projects for income generation
 - strengthen Credit Unions and women's small business
 - improve women's entrepreneurial skills to strengthen their bargaining position during marketing their products
 - conduct participatory market chain analysis
 - training in improving quality, diversifying product range and standardisation of products, according to market requests

6.4.7 Saran dari warga Menua Sadap

Setelah wawancara dan diskusi, penduduk dari Menua Sadap diminta membuat proposal untuk masa mendatang. Proposal tidak dibahas secara mendalam karena GRT tidak ingin menciptakan harapan yang belakangan tidak dapat dipenuhi.

Proposal meliputi butir-butir berikut:

- a. Pembangunan kapasitas dan peningkatan kesadaran bagi laki-laki dan perempuan, tua dan muda
 - alasan bagi pemerosotan lahan dan sumber daya
 - dampak pemerosotan lahan dan sumber daya
 - topik-topik yang terkait dengan peran gender dan kebutuhan khusus gender pada tingkat lokal.
 - relevansi masalah gender dalam lokakarya dan rapat yang terkait dengan tata guna lahan dan perencanaan desa
- b. Perencanaan desa untuk pengelolaan hutan lestari berdasarkan peran serta aktif oleh perempuan dan laki-laki
- c. Proyek-proyek untuk penciptaan pendapatan
 - memperkuat koperasi simpan-pinjam dan usaha kecil perempuan
 - meningkatkan keterampilan wirausaha perempuan untuk memperkuat posisi tawar selama memasarkan produk mereka
 - melakukan analisis rantai pasar partisipatif
 - pelatihan dalam peningkatan mutu, diversifikasi rangkaian produk, dan standarisasi produk, sesuai dengan permintaan pasar

6.4.8 Gender-specific Needs identified in Menua Sadap

	WOMEN	MEN	BOTH
PRACTICAL GENDER NEEDS	Capacity building for adding value in NTFP's production: Training for new designs, quality control, market access Skills in participatory market analysis	Improving skills for forest rehabilitation; intensified agricultural methods, local plant cultivation Improved fishery Adding value to products from river	Detailed information about forest, village and other regulations More knowledge of sustainable forest management practices Better understanding of participatory mapping, REDD and eco-tourism
STRATEGIC GENDER NEEDS	More self-consciousness and leadership skills in public meetings and community development Stronger bargaining positions and active participation in decision-making in land use and village development planning (i.e., Income generating activities, eco-tourism)	More job opportunities in forest and agricultural sector from district level Young men need local incentives to get involved in local economic development	Strengthened capacities in self-organisation in village development activities and forest management Ability to cooperate in income generating activities Improved infrastructure, road to market, sanitation, electricity

6.4.8 Kebutuhan khusus gender yang teridentifikasi di Menua Sadap

	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	KEDUANYA
PRAKTIS KEBUTUHAN GENDER	- Pembangunan kapasitas untuk menambah nilai dalam produksi HHNK: - Pelatihan untuk desain baru, kendali mutu, akses pasar - Keterampilan dalam analisis pasar partisipatif	- Meningkatkan keterampilan untuk rehabilitasi hutan; metode pertanian intensif, budi daya tumbuhan lokal - Penangkapan ikan yang ditingkatkan - Menambahkan nilai atas produk dari sungai	- Informasi terinci tentang hutan, desa, dan peraturan lainnya - Pengetahuan lebih banyak mengenai praktik pengelolaan hutan lestari - Pemahaman yang lebih baik mengenai pemetaan partisipatif, - REDD dan ekowisata - Kapasitas yang diperkuat dalam penataan diri pada kegiatan pembangunan desa dan pengelolaan hutan
KEBUTUHAN GENDER STRATEGIS	- Lebih sadar diri dan keterampilan kepemimpinan dalam rapat umum dan pembangunan masyarakat - Posisi tawar lebih kuat dan peran serta aktif dalam pembuatan putusan mengenai tata guna lahan dan perencanaan pembangunan desa (yakni, kegiatan penciptaan pendapatan, ekowisata)	- Kesempatan kerja lebih banyak di sektor kehutanan dan pertanian dari tingkat kabupaten - Laki-laki muda membutuhkan insentif lokal untuk terlibat dalam pengembangan ekonomi lokal	- Kemampuan bekerjasama dalam kegiatan penciptaan pendapatan - Infrastruktur yang ditingkatkan, jalan ke pasar, sanitasi, tenaga listrik



Conclusions in regard of FORCLIME planning

Chapter 7 summarizes conclusions from the target group analysis, the process of participatory appraisal and the institutional analysis.

7.1 Conclusions from Target Group Analysis in Menua Sadap

7.1.1 Men and women have different roles and interests in managing natural resources

The participatory gender analysis clearly indicated that women and men have different roles regarding natural resources management. They have different interests and needs in using natural resources which should be considered in CBFM as well as in LUP. When CBFM and REDD implement their concept of stakeholder consultation, women must be involved as equally as men.

Women seemed to be little interested in subjects related to resource management despite their responsibility of feeding the family. Their work in agriculture is the back bone of the family nutrition. Men go fishing and hunting to add some supplementary food or to get some cash income.

7.1.2 Lack of men in instable village setting

There is a high fluctuation of people in Menua Sadap, because people move around to find cash labor. Many men, especially younger men, migrate to Malaysia to find jobs. In every family interviewed, some members were in Malaysia. The village lacks a stable male labour force. Women also move around, but seem to be more stable. This is another reason why women should be involved in CBFM/REDD activities and learn to handle leadership positions.

Simpulan terkait perencanaan FORCLIME

Bab 7 merangkum simpulan dari analisis kelompok sasaran, proses penilaian partisipatif dan analisis kelembagaan.

7.1 Simpulan dari Analisis Kelompok Sasaran di Menua Sadap

7.1.1 Laki-laki dan perempuan memiliki peran dan kepentingan berbeda dalam mengelola sumber daya alam

Analisis gender partisipatif menunjukkan dengan jernih bahwa perempuan dan laki-laki memiliki peran berbeda dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Mereka memiliki kepentingan dan kebutuhan yang berbeda dalam penggunaan sumber daya alam yang harus diperhatikan dalam PHBM serta dalam perencanaan tata ruang (*Land Use Planning/LUP*). Saat CBFM dan REDD melaksanakan konsep konsultasi pemangku kepentingan, perempuan harus terlibat secara setara dengan laki-laki.

Perempuan tampaknya kurang berminat pada persoalan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya walaupun mereka bertanggung jawab memberi makan keluarga. Kerja mereka di pertanian adalah tulang punggung pemenuhan gizi keluarga. Laki-laki pergi memancing dan berburu untuk mendapatkan sejenis makanan tambahan atau sedikit pendapatan tunai.

7.1.2 Kurangnya laki-laki dalam suasana desa yang tak stabil

Ada fluktuasi tajam orang-orang di Menua Sadap, karena orang merantau untuk menemukan kerja berupah tunai. Banyak laki-laki, khususnya yang muda, bermigrasi ke Malaysia untuk mendapatkan pekerjaan. Di setiap keluarga yang diwawancarai, sebagian anggotanya berada di Malaysia. Desa

7.1.3 Critical perception of National Park

People, especially adult men of Menua Sadap, do not see any benefit from the National Park. Actually, they experience negative impacts because they cannot enter the Park for hunting and logging as they did previously. They complained that they lack these resources for their livelihood and families were suffering from hunger. Three young men were trained by the National Park as tourist guides and earn a small income. All others have not yet benefited from the National Park. For this reason, there is a conflict with National Park authorities and Park regulations.

7.1.4 Low educational standard

Educational standard in Menua Sadap seems to be quite low, especially among adults. There is a primary school with 4 class rooms started by a motivated teacher. She teaches 18-25 children each year, girls and boys equally represented. Children do not attend the class on a regular basis, but often follow their parents when they move away. Talented children who want to continue education have to enroll in a secondary boarding school provided by the Catholic Mission 30 km away. At the time of the interviews, only the son of the village head attended the secondary school. People have access to information through television because they have satellite dishes and a monitor is running on the verandah of the longhouse when electricity is available.



kekurangan tenaga kerja laki-laki. Perempuan juga ada yang merantau, namun tampaknya lebih banyak yang menetap di desa. Hal ini menjadi alasan lain kaum perempuan harus terlibat dalam kegiatan CBFM/REDD dan belajar menangani posisi kepemimpinan.

7.1.3 Persepsi kritis terhadap Taman Nasional Betung Kerihun

Orang-orang, khususnya laki-laki dewasa Menua Sadap, tidak melihat manfaat apa pun dari Taman Nasional. Sebenarnya, mereka mengalami dampak buruk karena tidak dapat memasuki Taman untuk berburu dan menebang pohon sebagaimana yang dulu mereka lakukan. Mereka mengeluh bahwa mereka kekurangan sumber daya untuk penghidupan dan keluarga mereka menderita kelaparan. Tiga laki-laki muda dilatih oleh Taman Nasional sebagai pemandu wisata dan memperoleh penghasilan kecil. Yang lainnya belum menarik manfaat dari Taman Nasional. Karena alasan ini, ada konflik dengan penguasa Taman Nasional dan peraturan Taman Nasional.

7.1.4 Standar pendidikan rendah

Standar pendidikan di Menua Sadap tampaknya amat rendah, khususnya di kalangan orang dewasa. Ada sekolah dasar dengan 4 ruang kelas yang dimulai oleh seorang guru yang kreatif. Dia mengajar 18-25 anak-anak setiap tahun, anak perempuan dan laki-laki terwakili secara setara. Anak-anak tidak menghadiri kelas secara teratur, namun sering mengikuti orang tua mereka berpindah. Anak-anak berbakat yang ingin meneruskan pendidikan harus mendaftarkan diri di sekolah asrama lanjutan yang disediakan oleh Misi Katolik yang jauhnya 30 km. Pada waktu wawancara, hanya anak laki-laki kepala desa yang mengikuti sekolah lanjutan. Orang-orang mengakses informasi melalui televisi karena memiliki satelit parabola dan sebuah TV menyala di beranda rumah panjang saat tenaga listrik tersedia.

7.1.5 Women outnumber men but rarely make decisions in public meetings

Women could play an important role in community organization and development activities because they outnumber men and have the primary responsibility of daily livelihood. Presently, only the wife of the village head, who is the representative of PKK, the traditional Indonesian Women League, is invited and contributes actively during meetings. Most women do not participate actively in public decision-making. They discuss issues at home or informally, but often keep quiet during public meetings, if they attend at all. FORCLIME should take special precautions to insure that women are officially and directly invited to meetings. Meetings should be scheduled respecting women daily tasks. They should be conducted in a gender-sensitive way so that women are encouraged to give comments and to be actively involved on all levels. Women should learn to represent their interests during REDD and other activities and to take leadership positions. Only then, will women be motivated to contribute to community activities and consultations as required by CBFM and REDD standards and procedures.

7.2 Conclusions from the Process of the Participatory Gender Analysis

7.2.1 Little information flow and transparency inside village community

There seems to be little information flow or transparency of on-going discussions in the village. Host families were aware of arriving visitors. Village leaders and others had no idea about the objectives of the visit. They also did not mention activities, such as Participatory Resource Mapping which was conducted by German Development Services previously. Most people heard some rumors about eco-tourism or micro-hydropower generators, but had no realistic image. FORCLIME is recommended to ensure full and extensive sharing of information with all.

7.1.5 Perempuan lebih banyak daripada laki-laki, namun jarang membuat putusan dalam rapat umum

Perempuan dapat memainkan peran penting dalam organisasi masyarakat dan kegiatan pembangunan karena jumlah mereka lebih banyak daripada laki-laki dan memiliki tanggung jawab utama dalam pemenuhan nafkah sehari-hari. Saat ini, hanya istri kepala desa, yang merupakan wakil PKK, perkumpulan tradisional perempuan Indonesia, yang diundang dan berkontribusi secara aktif selama rapat. Sebagian besar perempuan tidak berperan serta secara aktif dalam pembuatan putusan publik. Mereka membahas masalah di rumah atau secara informal, namun sering bersikap tenang selama rapat umum, jika pun menghadiri. FORCLIME harus mengambil langkah kehati-hatian khusus untuk menjamin bahwa perempuan diundang secara resmi dan langsung ke rapat. Rapat harus dijadwalkan secara matang guna menghormati tugas harian perempuan. Rapat harus dilakukan dengan cara peka gender sehingga perempuan didorong untuk memberikan komentar dan terlibat secara aktif pada semua tingkat. Perempuan harus belajar menyatakan kepentingan mereka selama kegiatan REDD dan lainnya serta mengambil posisi pimpinan. Hanya dengan demikian perempuan akan termotivasi untuk berkontribusi kepada kegiatan dan konsultasi masyarakat seperti yang disyaratkan oleh standar dan prosedur CBFM dan REDD.

7.2 Simpulan dari Proses Analisis Gender Partisipatif

7.2.1 Minimnya arus informasi dan transparansi di dalam masyarakat desa

Tampaknya ada sedikit arus informasi atau transparansi dari diskusi yang berlangsung di desa. Keluarga induk semang menyadari pengunjung yang tiba. Pemimpin desa dan penduduk lainnya tidak mengetahui apa-apa tentang tujuan kunjungan. Mereka juga tidak menyebutkan kegiatan, semisal Pemetaan Sumber Daya Partisipatif, yang dilakukan sebelumnya oleh DED dan GTZ FORCLIME. Sebagian besar orang mendengar gosip tentang ekowisata atau pembangkit listrik mikrohidro, namun tidak memiliki gambaran yang realistis. FORCLIME disarankan untuk memastikan pembagian informasi secara penuh dan luas dengan semua orang.

7.2.2 Public meetings steered and dominated by men

The first introductory meeting followed the “usual set-up”. Only 5-6 men and the female representative of PKK participated. 2 other women sat quietly in the back and served tea and biscuits. The village head directed the meeting. After long explanations and listening to long lists of complaints about the National Park, permission was given for further research work.

7.2.3 Interviews limited due to availability of respondents and language barriers

Individual interviews and focus group discussions went well, but had to respect individual time schedules. Most adults leave the village early in the morning and return in the late afternoon. The elderly and mothers with small children are left behind and spend time watching TV. It was easy to address them. The elders sometimes did not speak Bahasa Indonesia and it was a big advantage to have a team member who was a Dayak and could translate. FORCLIME is advised to train and include more members of Dayak communities in outreach activities because they have easier access to the Catholic minorities.

7.2.4 Preparation of plenary discussion in homogenous sub-groups leads to better participation of “weaker groups”

The following set-up worked well: Individual interviews and focus group discussions with separate groups for young and adult women and young and adult men had been conducted previously. Representatives of all groups presented the results from those discussions to the plenary. GRT facilitated this process and insured that the “weakest” groups were given equal chances. It took some time until the plenary followed this style, but there was no major resistance in accepting it. The second village meeting, which was facilitated by the GRT, succeeded in involving women and men in discussions. The contributing factors to women’s active involvement were: they were explicitly invited by the village head and the meeting was

7.2.2 Rapat umum disetir dan didominasi oleh laki-laki

Rapat pengenalan pertama mengikuti “pengaturan biasa”. Hanya 5-6 laki-laki dan perempuan wakil PKK yang hadir. 2 perempuan lainnya duduk dengan tenang di belakang, dan menyuguhkan teh dan kue. Kepala desa mengarahkan rapat. Setelah penjelasan panjang dan mendengarkan daftar panjang keluhan tentang Taman Nasional, izin diberikan untuk kerja penelitian lebih lanjut.

7.2.3 Wawancara terbatas karena ketersediaan responden dan hambatan bahasa

Wawancara perseorangan dan diskusi kelompok fokus berjalan baik, namun harus mengikuti jadwal waktu perseorangan. Sebagian besar orang dewasa meninggalkan desa dini hari dan kembali di petang hari. Orang-orang tua dan kaum ibu dengan anak-anak kecil ditinggalkan dan menghabiskan waktu menonton TV. Berbicara dengan mereka tidak sulit. Orang-orang tua kadang-kadang tidak bisa berbicara bahasa Indonesia, untungnya ada anggota tim yang merupakan orang Dayak dan dapat berperan sebagai penterjemah. FORCLIME dianjurkan untuk melatih dan menyertakan lebih banyak anggota masyarakat Dayak dalam kegiatan penjangkauan karena mereka memiliki akses yang lebih mudah ke masyarakat Katolik di sana.

7.2.4 Persiapan diskusi pleno dalam subkelompok yang homogen membawa kepada peran serta yang lebih baik dari “kelompok lemah”

Pengaturan berikut berjalan baik: Wawancara perseorangan dan diskusi kelompok fokus dengan kelompok-kelompok terpisah untuk perempuan muda dan dewasa serta laki-laki muda dan dewasa telah dilakukan sebelumnya. Wakil-wakil dari semua kelompok memaparkan hasil dari diskusi itu ke pleno. GRT memfasilitasi proses ini dan menjamin bahwa kelompok “terlemah” diberi kesempatan setara. Diperlukan beberapa waktu hingga pleno mengikuti gaya ini, namun tidak ada hambatan besar dalam menerimanya. Rapat desa kedua, yang difasilitasi oleh GRT, berhasil melibatkan

scheduled early enough so that children could also attend. Major parts of the meeting were facilitated by women.

Women brought up ideas and arguments when the facilitators gave them the opportunity. They felt encouraged because their points from group work were supported by the facilitators. The participatory exercise proved that women and men can discuss together, if there is proper preparation and facilitation. During the meeting in Menua Sadap, women were more serious about their points while men often cracked jokes and gave shallow arguments.

7.2.5 Participatory gender analysis as an entry point to establish trusting relationships between villagers and extension officers promoting CBFM/REDD

In summary, the process in Menua Sadap was successful because it managed to change the previous attitude of scepticism and resistance to an attitude of interest and motivation to get more involved in projects. The majority of people wanted more detailed information.

The participatory gender analysis provided not only baseline data about gender-specific roles and needs. The process also provoked discussions, informal sharing of knowledge and a village meeting, in which men and women participated almost equally. Selected tools of the gender analysis should be integrated into the CBFM/REDD procedures routinely during village consultation.

The process of the gender analysis can be used to set a basis of joint discussion about gender-specific needs, priorities and potential benefit sharing between the community members. It helps develop trust between the community members and the extension teams.

perempuan dan laki-laki dalam diskusi. Faktor-faktor penyumbang keterlibatan aktif perempuan adalah: mereka diundang secara terbuka oleh kepala desa dan rapat dijadwalkan cukup dini sehingga anak-anak juga dapat hadir. Bagian utama rapat difasilitasi oleh perempuan.

Perempuan mengeluarkan gagasan dan pendapat saat fasilitator memberi mereka kesempatan. Mereka merasa terdorong karena butir-butir pikiran dari kelompok kerja didukung oleh fasilitator. Latihan partisipatif membuktikan bahwa perempuan dan laki-laki dapat berdiskusi bersama, jika ada persiapan dan fasilitasi yang layak. Selama rapat di Menua Sadap, perempuan lebih serius tentang pemikiran mereka sementara laki-laki sering melontarkan lelucon dan memberikan pendapat yang dangkal.

7.2.5. Analisis gender partisipatif adalah titik masuk untuk membentuk hubungan yang saling percaya antara penduduk desa dan staf perluasan yang mempromosikan CBFM/REDD

Secara ringkas, proses di Menua Sadap adalah sukses karena berhasil mengubah sikap kurang percaya dan penolakan sebelumnya menjadi sikap ketertarikan dan motivasi untuk lebih terlibat dalam proyek. Mayoritas orang-orang menginginkan informasi yang lebih terinci.

Analisis gender partisipatif menyediakan bukan hanya data garis dasar tentang peran dan kebutuhan khusus gender. Proses ini juga memancing diskusi, berbagi pengetahuan yang informal, dan rapat desa, yang di dalamnya laki-laki dan perempuan berperan serta hampir secara setara. Alat analisis gender yang dipilih harus dipadukan secara rutin ke dalam prosedur CBFM/REDD selama konsultasi desa.

Proses analisis gender dapat digunakan untuk menetapkan landasan diskusi bersama tentang kebutuhan, prioritas, dan potensi berbagi manfaat khusus gender di antara anggota masyarakat. Hal ini membantu mengembangkan kepercayaan di antara anggota masyarakat dan tim penyuluh.

7.2.6 Analysis of gender-specific roles and needs to be integrated into a long term development process of CBFM

The process was not imbedded in an on- going activity taking place in the village. The GRT lacked information about future activities planned for this location. There was no detailed exploration and public discussion about needs to avoid raising expectations and adding to rumours. FORCLIME should integrate the process of gender analysis and its results into long term project activities as a follow up to the identified needs. Otherwise, false expectations and frustrations may develop.

7.3 Conclusions from Institutional Analysis

7.3.1 Work in the forestry sector is still perceived as a mans world

RENSTRA 2010-2014, the Strategic Plan of the Forest Ministry, includes a section on “community empowerment “which is completely “gender-blind”, despite national legislation and guidelines of gender mainstreaming.

Extension activities such as trainings, meetings and campaigns in the forest sector are still directed towards men. Men feel invited and participate, women do not. Their potentials are not involved. Women own land and influence decisions of land clearing, but are not involved in Land Use Planning.

7.3.2 Lack of knowledge about the gender concept in the forestry sector

Skills of officeholders in integrating gender aspects into planning and budgeting at all levels of the Forest Department are insufficient.

It will take much explanation and persuasion before male staff, especially decision-makers, understand the “added value” which women can contribute to forest projects, especially when they are linked to the management of natural resources. Extension staff lacks training in applying participatory methods required for stakeholder consultations. Training in participatory facilitation should include tools for gender analysis and help in involving women and men equally in public discussions

7.2.6 Analisis peran dan kebutuhan khusus gender harus dipadukan ke dalam proses pengembangan CBFM jangka panjang

Proses itu tidak tertanam dalam kegiatan yang berlanjut yang sedang berlangsung di desa. GRT kekurangan informasi tentang kegiatan mendatang yang direncanakan untuk lokasi ini. Tidak ada penyelidikan terinci dan diskusi publik tentang kebutuhan untuk menghindari membubungnyanya harapan dan membumbui gosip. FORCLIME harus memadukan proses analisis gender dan hasil-hasilnya pada kegiatan proyek jangka panjang sebagai tindak lanjut terhadap kebutuhan yang teridentifikasi. Jika tidak, harapan semu dan frustrasi mungkin berkembang.

7.3 Simpulan dari Analisis Kelembagaan

7.3.1 Kerja di sektor kehutanan masih dikesani sebagai dunia laki-laki

RENSTRA 2010-2014, Rencana Strategis Kementerian Kehutanan, mencakup satu bagian tentang “pemberdayaan masyarakat” yang sepenuhnya “buta gender”, walaupun ada undang-undang dan pedoman nasional mengenai pengarusutamaan gender.

Kegiatan penyuluhan seperti pelatihan, pertemuan, dan kampanye di sektor kehutanan masih diarahkan kepada laki-laki. Laki-laki merasa diundang dan berperan serta, perempuan tidak. Potensi mereka tidak dilibatkan. Perempuan memiliki tanah dan memengaruhi putusan pembukaan lahan, namun tidak terlibat dalam Perencanaan Tata Guna Lahan.

7.3.2 Minimnya pengetahuan tentang konsep gender di sektor kehutanan

Keterampilan pejabat dalam memadukan aspek gender ke dalam perencanaan dan penganggaran di semua tingkat instansi kehutanan adalah tidak memadai.

Akan memakan banyak waktu untuk menjelaskan dan meyakinkan sebelum staf laki-laki, khususnya pembuat putusan, memahami “nilai tambah” yang dapat disumbangkan perempuan kepada proyek kehutanan, khususnya saat dikaitkan dengan

7.3.3 Little cooperation between MoFor, MoWE and local NGOs in gender mainstreaming activities

There are very few links between the MoFor and the Ministry of Women Empowerment. The gender expertise is within the MoWE, while the sector ministries have sector knowledge. MoWE has not yet succeeded in integrating gender mainstreaming into the male dominated forest sector. MoWE lacks sector knowledge and there is no sex-disaggregated database for reference.

There are a number of NGOs in Kalimantan which deal with environmental issues and legal question. Some have experience outreach projects for women in forest communities. Sections from the University and the Gender Study Centre are interested in conducting more research on gender issues in male dominated areas. Again, there is little networking and cooperation between different NGOs and GOs regarding natural resource management.

7.3.4 Strategic partnership with decentralisation process and required stakeholder participation

Government employees involved in planning and activities which require community participation admit problems handling this process. They had some knowledge about indicators for gender empowerment measures, but no idea how to transfer this into the forest sector. However, there seems to be interest in understanding the gender approach better. "Gender-responsive budgeting" is often mentioned, but no one knows what it exactly means and how to implement it.

Government officials and decision-makers must be convinced that better participation of women will help to improve planning and implementation of REDD/CBFM projects.

pengelolaan sumber daya alam. Staf penyuluhan kurang mendapat pelatihan dalam menerapkan metode partisipatif yang disyaratkan untuk konsultasi pemangku kepentingan. Pelatihan dalam fasilitasi partisipatif harus mencakup alat untuk analisis gender dan bantuan dalam pelibatan perempuan dan laki-laki secara setara dalam diskusi publik

7.3.3 Sedikit kerjasama antara Kemenhut, MoWE, dan LSM lokal dalam kegiatan pengarusutamaan gender

Ada sangat sedikit kaitan antara Kemenhut dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Kepakaran gender berada dalam MoWE, sementara kementerian sektor memiliki pengetahuan sektor. MoWE belum berhasil memadukan pengarusutamaan gender ke dalam sektor kehutanan yang didominasi laki-laki. MoWE kekurangan pengetahuan sektor dan tidak memiliki basis data terpisah seks untuk menjadi rujukan.

Ada sejumlah LSM di Kalimantan yang menangani masalah lingkungan dan kajian hukum. Sebagian memiliki pengalaman proyek penjangkauan untuk perempuan di masyarakat desa hutan. Bagian-bagian dari universitas dan pusat studi gender tertarik untuk mengadakan penelitian lebih jauh tentang masalah gender di bidang yang didominasi laki-laki. Lagi-lagi, hanya ada sedikit jejaring dan kerjasama di antara berbagai LSM dan lembaga pemerintah mengenai pengelolaan sumber daya alam.

7.3.4 Kemitraan strategis dengan proses desentralisasi dan peran serta pemangku kepentingan yang disyaratkan

Karyawan pemerintah yang terlibat dalam perencanaan dan kegiatan yang mensyaratkan peran serta masyarakat mengakui masalah dalam menangani proses ini. Mereka memiliki sedikit pengetahuan tentang indikator untuk Ukuran Pemberdayaan Gender, namun tidak tahu apa-apa mengenai cara mengalihkan hal ini ke dalam sektor kehutanan. Akan tetapi, tampaknya ada minat pada upaya memahami pendekatan gender dengan lebih baik. "Penganggaran tanggap gender" sering disebutkan, namun tak seorang pun mengetahui arti sebenarnya dan cara melaksanakannya.

7.3.5 Potential of Gender Focal Persons and Gender Working groups not yet fully utilized

The legal possibilities of gender focal persons and gender working groups have not been fully utilized within the Ministry of Forestry. FORCLIME can help to create an “enabling situation” in which people from different levels are involved and gain experience in implementing gender sensitive approaches as part of participatory stakeholder consultation into their working structures.

Pejabat pemerintah dan pembuat putusan harus diyakinkan bahwa peran serta lebih baik kaum perempuan akan membantu memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proyek REDD/CBFM.

7.3.5 Potensi Focal point Gender dan Kelompok Kerja Gender belum sepenuhnya dimanfaatkan

Keberadaan *focal point* gender dan kelompok kerja gender belum sepenuhnya dimanfaatkan di lingkungan Kementerian Kehutanan. FORCLIME dapat membantu menciptakan “situasi yang mengaktifkan” yang di dalamnya orang-orang dari berbagai tingkat dilibatkan dan meraih pengalaman dalam melaksanakan pendekatan peka gender sebagai bagian dari konsultasi pemangku kepentingan partisipatif ke dalam struktur kerja mereka.

Chapter 8

Potential Partners

Chapter 8 provides an overview of governmental and non-governmental organisations which could support FORCLIME setting up and implementing a gender strategy.

Level	Institution/Organisations	Cooperation in
National	MoFor	Setting up national regulations Revise RENSTRA (Strategic Plan) 2010-2014 Integrate gender into REDD framework
	MoWE	Supporting gender focal persons and gender working groups in MoFor and BAPPENA Initiating forum for gender mainstreaming in male dominated sectors (forestry, agriculture) Training MoFor decision-makers
	CIFOR	Elaborating gender-sensitive criteria and indicators for Sustainable Forest Management in Manuals for Community Management of Forests
	gtz gender focal person	Initiating gender debate in gtz programmes in Indonesia operating in male dominated sectors Exchange materials and successful approaches
Provincial (Samarinda, Pontianak)	Forestry Services	Establishing gender focal persons and working groups in MoFor
	Women Empowerment Services	Supporting gender focal persons and gender working groups in MoFor and BAPPEDA Raise gender awareness in MoFor Training and supporting BAPPEDA in gender-responsive planning in forestry sector
	Women Study Centre	Supporting and exchanging experience conducting gender analysis
	Nurani Perempuan	
	Kawal Borneo Foundation (East Kalimantan)	Facilitating Community empowerment for CBFM Lobbying to Government (district or provincial) Networking and Outreach
	Riak Bumi (West Kalimantan)	Facilitating Community Empowerment for Income Generating,, Lobbying at Government (district and provincial) Networking and Outreach

Level	Institution/Organisations	Cooperation in
Districts	BAPPEDA	Generating sex-differentiated database Integrating gender mainstreaming into planning
	MoFor	Participating in gender analysis as part of CBFM Supporting training of extension staff in gender analysis Investigate results from gender analysis
	MoWE	Raising gender awareness in MoFor Train MoFor in gender-responsive planning
	Nurani Perempuan	Supporting training of MoFor extension staff in gender-sensitive facilitation of CBFM meetings Involvement in gender analysis as part of CBFM
Village	MoFor	Conducting gender analysis as entry point to CBFM process
	Women Empowerment Services	Supporting MoFor in conducting gender analysis and evaluating results
	Nurani Perempuan	Providing training in leadership skills for women Cooperation in gender analysis exercises Integrate REDD information in outreach activities

Mitra potensial

Bab 8 memberikan ikhtisar lembaga pemerintah dan swadaya masyarakat yang dapat mendukung FORCLIME dalam menyiapkan dan melaksanakan strategi gender.

Tingkat	Lembaga/Organisasi	Kerjasama dalam
Nasional	Kemenhut	- Menyiapkan peraturan nasional - Merevisi RENSTRA (Rencana Strategis) 2010-2014 - Memadukan gender ke dalam kerangka kerja REDD & CBFM
	MoWE	- Mendukung <i>focal point</i> gender dan kelompok kerja gender di Kemenhut dan BAPPENAS - Memulai forum untuk pengarusutamaan gender di sektor yang didominasi laki-laki (kehutanan, pertanian) - Melatih level pembuat putusan di Kemenhut
	CIFOR	Merinci kriteria dan indikator peka gender untuk Pengelolaan Hutan Lestari dalam Manual untuk Pengelolaan Hutan Masyarakat
	Focal point gender GIZ	- Memulai debat gender dalam program GIZ di Indonesia yang beroperasi di sektor yang didominasi laki-laki - Bertukar bahan dan pendekatan yang berhasil
Provinsi (Samarinda, Pontianak)	Dinas Kehutanan	Membentuk <i>focal point</i> gender dan kelompok kerja di Dinas Kehutanan provinsi
	Badan Pemberdayaan Perempuan	- Mendukung <i>focal point</i> gender dan kelompok kerja gender di Dinas Kehutanan Provinsi dan BAPPEDA - Meningkatkan kesadaran gender di Dinas Kehutanan Provinsi - Melatih dan mendukung BAPPEDA dalam perencanaan tanggap gender di sektor kehutanan
	Pusat Studi Perempuan	mendukung dan bertukar pengalaman dalam mengadakan analisis gender
	LSM Nurani Perempuan	
	LSM Kawal Borneo Foundation (Kalimantan Timur)	- Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat untuk CBFM - Melobi pemerintah (kabupaten atau provinsi) - Membuat jejaring dan penjangkauan
	LSM Riak Bumi (Kalimantan Barat)	- Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat untuk menghasilkan pendapatan - Melobi pemerintah (kabupaten atau provinsi) - Membuat jejaring dan penjangkauan

Tingkat	Lembaga/Organisasi	Kerjasama dalam
Kabupaten	BAPPEDA	• Membuat basis data yang terpisah seks • Memadukan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan
	Dinas Kehutanan	• Berperan serta dalam analisis gender sebagai bagian dari CBFM & REDD • Mendukung pelatihan staf perluasan dalam analisis gender • Menyelidiki hasil dari analisis gender
	Kantor Pemberdayaan Perempuan	• Menaikkan kesadaran gender di Dinas Kehutanan • Melatih Dinas Kehutanan dalam perencanaan tanggap gender
	LSM Nurani Perempuan	• Mendukung pelatihan staf perluasan Kemenhut dalam fasilitasi peka gender rapat CBFM • Pelibatan dalam analisis gender sebagai bagian dari CBFM
Desa	Dinas Kehutanan	• Mengadakan analisis gender sebagai titik masuk ke proses CBFM
	Dinas Pemberdayaan Perempuan	• Mendukung Dinas Kehutanan dalam mengadakan analisis gender dan mengevaluasi hasil
	LSM Nurani Perempuan	• Menyediakan pelatihan dalam keterampilan kepemimpinan untuk perempuan • Kerjasama dalam analisis gender • latihan • Memadukan informasi REDD dan CBFM ke dalam kegiatan penjangkauan

Recommendations for Entry points for gender mainstreaming and women empowerment in FORCLIME

Chapter 9 provides an overview of the recommendations for FORCLIME to integrate gender aspects as a cross cutting issue into its components. More detailed recommendations for activities can be found in the Annex.

9.1 Recommendations for Component 1: Policy development at national level

9.1.1 Support the implementation of the MoFor Guidelines for Gender Mainstreaming released in 2004

- review Strategic Plan 2010-2014 and advocate for the integration of gender aspects into component 6, “community empowerment”
- revive and strengthen MoFor gender working group and develop the abilities of gender focal person
- motivate MoFor to use its special budget for the implementation of national programmes at the local level (dana alokasi khusus) to work on the community level

9.1.2 Advocate for stronger cooperation and networking of different partners at the national level (MoFor, MoWE, BAPPENAS)

- initiate joint efforts to integrate gender issues into annual sector programmes
- support MoWE to develop a forestry-specific gender mainstreaming approach
- support MoWE in providing training and follow up activities in the forestry sector

Saran untuk Titik Masuk bagi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di FORCLIME

Bab 9 menyediakan ikhtisar saran untuk FORCLIME guna memadukan aspek gender sebagai masalah lintas sektor ke dalam komponen-komponennya. Saran lebih terinci untuk kegiatan dapat ditemukan di dalam Lampiran.

9.1 Saran untuk Komponen 1: Pengembangan kebijakan di tingkat nasional

9.1.1 Mendukung implementasi Panduan Kemenhut untuk Pengarusutamaan Gender yang diterbitkan di tahun 2004

- meninjau Rencana Strategis 2010-2014 dan menyokong pemaduan aspek gender ke dalam komponen 6, “pemberdayaan masyarakat”
- menghidupkan kembali dan memperkuat kelompok kerja gender Kemenhut serta mengembangkan kemampuan focal point gender
- menggerakkan Kemenhut untuk menggunakan anggaran khususnya untuk pelaksanaan program nasional pada tingkat lokal (dana alokasi khusus) untuk bekerja pada tingkat masyarakat

9.1.2 Menyokong kerjasama dan pembentukan jejaring yang lebih kuat dari berbagai mitra pada tingkat nasional (Kemenhut, MoWE, BAPPENAS)

- memulai upaya bersama untuk memadukan masalah gender ke dalam program tahunan sektor
- mendukung MoWE untuk mengembangkan pendekatan pengarusutamaan gender khusus kehutanan
- mendukung MoWE dalam menyediakan pelatihan dan kegiatan tindak lanjut di sektor kehutanan

9.1.3 Advocate for more gender awareness in “male-dominated” sectors and programmes

- initiate a forum to exchange information and networking
- contribute to exchange about gender mainstreaming issues between gtz projects in Indonesia.
- give regular feedback to the gtz gender focal person in Jakarta

9.2 Recommendations for component 2 and 3 (provincial and district level):

Activities related to CBFM and REDD should consider the two major findings of the gender analysis:

- women and men have different needs, interests and priorities in natural resources management.
- women usually do not actively participate in Land Use Planning and other activities related to CBFM.

9.2.1 Integrate gender issues in all phases of planning, implementation, monitoring and evaluation in forest management concepts

- conduct gender analysis to assess gender-specific needs and priorities in regard to CBFM/REDD
- ensure that gender-specific needs and priorities are integrated into planning and reflected in indicators
- adopt methods which ensure that women’s opinions are known and that their priorities are considered in decision-making so women and men can equally benefit from sustainable forest management
- develop and adjust models of benefit sharing which respond to identified needs (individual cash, revolving fund, individual projects or community projects in health, education or infrastructure)

9.1.3 Menyokong kesadaran gender lebih tinggi di sektor dan program yang “didominasi laki-laki”

- memulai forum untuk bertukar informasi dan membentuk jejaring
- berkontribusi kepada pertukaran tentang masalah pengarusutamaan gender di antara proyek-proyek GIZ di Indonesia.
- memberikan umpan balik rutin ke focal point gender GIZ di Jakarta

9.2 Saran-saran untuk komponen 2 dan 3 (tingkat provinsi dan kabupaten):

Kegiatan yang terkait dengan CBFM dan REDD harus memperhatikan dua temuan utama analisis gender:

- perempuan dan laki-laki memiliki kebutuhan, kepentingan, dan prioritas yang berbeda dalam pengelolaan sumber daya alam.
- perempuan biasanya tidak berperan serta secara aktif dalam perencanaan tata guna lahan dan kegiatan lain yang terkait dengan CBFM.

9.2.1 Memadukan masalah gender dalam semua tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam konsep pengelolaan hutan

- melakukan analisis gender untuk mengkaji kebutuhan dan prioritas khusus gender sehubungan dengan CBFM/REDD
- memastikan bahwa kebutuhan dan prioritas khusus gender terpadu ke dalam perencanaan dan tercermin dalam indikator
- memilih metode yang dapat memastikan bahwa pendapat perempuan diketahui dan prioritas mereka dipertimbangkan dalam pembuatan putusan sehingga perempuan dan laki-laki dapat menarik manfaat secara setara dari pengelolaan hutan lestari
- mengembangkan dan menyesuaikan model berbagi manfaat yang menjawab kebutuhan yang telah teridentifikasi (pemenuhan kebutuhan uang tunai, dana bergulir, proyek perseorangan atau proyek masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur)

9.2.2 Participatory Gender analysis as an integral part of CBFM/REDD processes

- use the participatory process of gender analysis to develop trusting relationships between communities and forestry extension staff
- include gender analysis and gender-sensitive facilitation in the training of MoF or and other extension staff implementing CBFM/REDD activities in the selected FORCLIME districts. Training should include:
 - participatory extension methods which encourage the presence and contributions of all of age and gender groups
 - application of selected tools of gender analysis to reveal and discuss different needs of women and men and their different priorities in land use planning
 - leadership training for female representatives
 - advocacy for gender issues so village elders and other male leaders support the approach.
- develop outreach activities to create community awareness about gender aspects in CBFM/REDD, including government agencies, NGOs, education sector, religious leaders

9.2.3 Support the establishment of gender focal persons and gender working groups at Forestry Services at Provincial and District level

- support capacity building of Gender focal persons and Gender working groups in the forestry sector
- encourage networking between Gender focal persons and working groups and exchange of experience
- provide “coaching” for gender focal persons in Forestry Services
- create awareness among political leaders, governors, heads of departments, so they see the relevance and support gender working groups and gender focal persons

9.2.2 Analisis Gender Partisipatif sebagai bagian terpadu proses CBFM/REDD

- menggunakan proses analisis gender partisipatif untuk mengembangkan hubungan saling percaya antara masyarakat dan staf penyuluhan kehutanan
- mengembangkan analisis gender dan fasilitasi peka gender dalam pelatihan Dinas Kehutanan dan atau staf penyuluhan lain yang melaksanakan kegiatan CBFM/REDD di lokasi proyek FORCLIME. Pelatihan harus meliputi:
 - metode penyuluhan partisipatif yang mendorong kehadiran dan kontribusi semua kelompok umur dan gender
 - penerapan alat analisis gender yang dipilih untuk menyingkapkan dan membahas berbagai kebutuhan perempuan dan laki-laki serta prioritas mereka yang berbeda dalam perencanaan tata guna lahan
 - pelatihan kepemimpinan untuk wakil perempuan
 - advokasi untuk masalah gender sehingga tetua desa dan para laki-laki pemimpin lainnya mendukung pendekatan ini.
- mengembangkan kegiatan penjangkauan untuk menciptakan kesadaran masyarakat tentang aspek gender dalam CBFM/REDD, yang mencakup badan pemerintah, LSM, sektor pendidikan, pemimpin keagamaan.

9.2.3 Mendukung pembentukan focal point gender dan kelompok kerja gender pada Dinas Kehutanan di tingkat Provinsi dan Kabupaten

- mendukung pembangunan kapasitas focal point gender dan kelompok kerja gender di sektor kehutanan
- mendorong pembentukan jejaring dan pertukaran pengalaman di antara focal point gender dan kelompok kerja
- memberikan “pembimbingan” untuk focal point gender di Dinas Kehutanan
- menciptakan kesadaran di kalangan pemimpin politik, gubernur, bupati dan kepala dinas sehingga mereka melihat relevansi serta mendukung kelompok kerja gender dan focal point gender

9.2.4 Raise gender awareness and gender competence of stakeholders from forestry sector and BAPPEDA

- conduct gender awareness raising and training in gender analysis for Forestry Services
- develop abilities in gender-sensitive facilitation methods
- raise awareness of MoF or and BAPPEDA about gender-responsive planning and budgeting
- support MoF or and BAPPEDA in integrating gender responsive planning and budgeting into the 5-year-development-plan of Kalimantan
- support BAPPEDA develop a list of relevant sex-segregated data and collect this data for planning and monitoring purposes

9.2.5 Encourage cooperation between Provincial Forestry Services, Women Empowerment Services and local NGOs

- assess local capacities for conducting gender trainings
- develop a common strategy for increasing gender awareness and competence in the forestry sector at provincial and district levels.
- identify training needs and develop gender competence of local NGOs and Gender Research Team members who will be involved in REDD/CBFM outreach activities
- facilitate and strengthen networking by providing funds and organisational development to determine mandates, common visions and objectives, division of tasks, sharing resources, setting up an internal steering mechanism.
- monitor and evaluate the process of integrating gender mainstreaming into the forestry sector and provide feedback to stakeholders in cooperation with WES.

9.2.4 Meningkatkan kesadaran gender dan kecakapan gender pemangku kepentingan sektor kehutanan dan BAPPEDA

- melakukan kegiatan peningkatan kesadaran gender dan pelatihan analisis gender untuk Dinas Kehutanan
- mengembangkan kemampuan dalam metode fasilitasi peka gender
- meningkatkan kesadaran Dinas Kehutanan dan atau BAPPEDA tentang perencanaan dan penganggaran tanggap gender
- mendukung Dinas Kehutanan dan atau BAPPEDA dalam memadukan perencanaan dan penganggaran tanggap gender ke dalam rencana pembangunan 5 tahun di tingkat propinsi ataupun kabupaten.
- mendukung BAPPEDA untuk mengembangkan daftar data yang terpisah seks dan mengumpulkan data ini untuk keperluan perencanaan dan pemantauan.

9.2.5 Mendorong kerjasama antara Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten, Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi/Kabupaten, dan LSM setempat

- mengkaji kapasitas lokal untuk mengadakan pelatihan gender
- mengembangkan strategi umum untuk meningkatkan kesadaran dan kecakapan gender di sektor kehutanan pada tingkat provinsi dan kabupaten.
- mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan mengembangkan kecakapan gender LSM setempat dan anggota Tim Penelitian Gender yang akan terlibat dalam kegiatan penjangkauan REDD/CBFM
- memfasilitasi dan memperkuat jejaring dengan menyediakan dana dan pengembangan organisasi untuk menentukan mandat, visi dan tujuan bersama, pembagian tugas, sumber daya bersama, penyiapan dan mekanisme pengarahannya.
- memantau dan mengevaluasi proses memadukan pengarusutamaan gender ke dalam sektor kehutanan dan memberikan umpan balik kepada pemangku kepentingan bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan.

9.2.6 Advocate at MoFor and other stakeholders to train and include more members of Dayak communities in out-reach activities

9.2.6 Menyokong Kemenhut dan pemangku kepentingan lainnya untuk melatih dan menyertakan lebih banyak anggota masyarakat Dayak dalam kegiatan penjangkauan (outreach).





Elements of a FORCLIME Gender Strategy

10.1 FORCLIME Gender Policy

FORCLIME should formulate a Gender Policy to integrate gender aspects as a cross cutting issue into the management of all programme components . All project members should understand and take responsibility for implementing the cross cutting issue as part of their work

This Gender Policy is documented, published and communicated to all partners, especially in the MoFor. FORCLIME advocates integrating gender aspects into mid-term development planning and annual programmes of the forestry sector at all levels and the training of extension staff in gender-sensitive participatory methods at provincial and district levels.

FORCLIME conducts annual self-evaluation in how gender policy has been implemented.

10.2 Include gender differentiating topics and gender-responsive indicators into FORCLIME result chain

The following proposals are based on the result chain discussed in a workshop on “FORCLIME planning and result chain”, Jakarta, 11. and 12.11.10

Gender aspects should be integrated into FORCLIME result chain and indicators as proposed:

Unsur Strategi Gender FORCLIME

10.1 Kebijakan Gender FORCLIME

FORCLIME harus merumuskan Kebijakan Gender untuk memadukan aspek gender sebagai masalah lintas sektor ke dalam pengelolaan semua komponen program. Semua anggota proyek harus memahami dan bertanggung jawab atas pelaksanaan masalah lintas sektor sebagai bagian dari kerja mereka

Kebijakan Gender ini didokumentasi, diterbitkan, dan disampaikan ke semua mitra, khususnya di Kemenhut. FORCLIME menyokong upaya memadukan aspek gender ke dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan program tahunan sektor kehutanan di semua tingkat dan pelatihan staf perluasan dalam metode partisipatif peka gender di tingkat provinsi dan kabupaten.

FORCLIME melakukan evaluasi diri tahunan mengenai cara kebijakan gender dilaksanakan.

10.2 Menyertakan topik khusus gender dan indikator tanggap gender ke dalam rantai hasil FORCLIME

Proposal berikut didasarkan pada rantai hasil yang dibahas dalam lokakarya tentang “Perencanaan dan rantai hasil FORCLIME”, Jakarta, 11 dan 12 November 2010

Aspek gender harus terpadu ke dalam rantai hasil dan indikator FORCLIME sebagaimana yang diusulkan:

10.2.1 REDD

- Forest Strategic Plans include assessment of gender-specific needs and priorities
- Quantitative and qualitative participation of women and men during consultations process for the development of provincial and district long term forestry plans
- RENSTRA improvements include integration of gender mainstreaming strategy
- Monitoring system includes sex-segregated data collection
- Training material and other communication media explaining REDD and CC mitigation concepts include case studies and pictures which refer to the roles of women and men
- Trainings for stakeholders and decision-makers include modules for raising gender awareness and gender competence
- Concept of REDD readiness Road map includes steps of gender analysis and demand of active participation of women in public consultation process
- M+E on CC mitigation action plan refers to gender-specific needs and priorities

10.2.2 CBFM

- CBFM concepts include analysis of gender specific needs and priorities
- Women and men participate equally during the endorsement of the concept of CBFM organisation
- Proposals submitted to local government are based on gender-specific needs and priority assessment and equal participation of women and men in the consultation process
- Training manuals for community and government level include chapters on gender mainstreaming concept, gender analysis and methods of gender-sensitive facilitation
- Booklets for public awareness advocate for gender equality in CBFM

10.2.1 REDD

- Rencana Strategis Kehutanan mencakup pengkajian kebutuhan dan prioritas khusus gender
- Peran serta kuantitatif dan kualitatif perempuan dan laki-laki selama proses konsultasi untuk pengembangan rencana kehutanan jangka panjang provinsi dan kabupaten
- Perbaikan RENSTRA mencakup integrasi strategi pengarusutamaan gender
- Sistem pemantauan mencakup pengumpulan data yang pilah seks
- Bahan pelatihan dan media komunikasi lain yang menjelaskan REDD dan konsep penanggulangan perubahan iklim mencakup studi kasus dan foto-foto yang merujuk kepada peran perempuan dan laki-laki
- Pelatihan untuk pemangku kepentingan dan pembuat putusan mencakup modul untuk meningkatkan kesadaran gender dan kecakapan gender
- Konsep roadmap kesiapan REDD mencakup langkah-langkah analisis gender dan tuntutan akan peran serta aktif perempuan dalam proses konsultasi publik
- Monitoring dan Evaluasi pada rencana tindakan mitigasi perubahan iklim merujuk kepada kebutuhan dan prioritas khusus gender

10.2.2 CBFM

- Konsep CBFM mencakup analisis kebutuhan dan prioritas khusus gender
- Perempuan dan laki-laki berperan serta secara setara selama pengesahan konsep organisasi CBFM
- Proposal yang dikirim ke pemerintah setempat didasarkan pada pengkajian kebutuhan dan prioritas khusus gender dan peran serta setara perempuan dan laki-laki dalam proses konsultasi
- Manual pelatihan untuk tingkat masyarakat dan pemerintah mencakup bab tentang konsep pengarusutamaan gender, analisis gender, dan metode fasilitasi peka gender
- Buklet untuk penyadaran publik menyokong kesetaraan gender dalam CBFM

- Local regulations and policies on CBFM include gender-sensitive approaches as a cross cutting issue

Participatory workshops for policy decision-making process at district level request equal and active participation of women and men

10.3 Gender expert/gender liaison officer:

10.3.1 FORCLIME Internal

FORCLIME should have a gender expert as a staff member.

The tasks of the gender expert are:

- examine whether all FORCLIME programme activities are identified and planned in a gender-sensitive way and considering different ethnic backgrounds
- insist on gender-sensitive indicators in all projects during planning and make sure they are monitored
- collect and summarize monitoring data twice a year and provide a feedback to other team members
- assess gender competence of COSERAM staff and organize capacity building regarding gender and conflict sensitivity, if necessary
- offer “coaching” to FORCLIME colleagues on integrating gender issues into their areas of work

10.3.2 FORCLIME External

- Determine training needs of FORCLIME partners in handling gender mainstreaming issues in their areas of work (especially MoFor, BAPPEDA)
- support MoWE in the development of a gender mainstreaming strategy for the forestry sector
- initiate and attend meetings of partners from government (MoFor, WoWE) and NGOs at national, provincial and district levels.

- Peraturan dan kebijakan lokal tentang CBFM mencakup pendekatan peka gender sebagai masalah lintas sektor

- Lokakarya partisipatif untuk proses pengambilan putusan kebijakan pada tingkat kabupaten mengharuskan peran serta setara dan aktif perempuan dan laki-laki

10.3 Pakar gender/staf penghubung gender:

10.3.1 Internal FORCLIME

FORCLIME harus memiliki pakar gender sebagai anggota staf.

Tugas pakar gender adalah:

- menelaah apakah semua kegiatan program FORCLIME diidentifikasi dan direncanakan dengan cara yang peka gender dan memperhatikan beragam latar belakang etnis
- mengawasi dengan ketat indikator peka gender dalam semua proyek selama perencanaan dan memastikan bahwa indikator itu dipantau
- mengumpulkan dan merangkum data pemantauan dua kali setahun dan memberikan umpan balik kepada anggota tim lainnya
- mengkaji kecakapan gender staf FORCLIME dan mengadakan pengembangan kapasitas mengenai gender dan kepekaan konflik, jika perlu
- menawarkan “pembimbingan” kepada rekan-rekan FORCLIME untuk memadukan masalah gender ke bidang kerja mereka

10.3.2 Eksternal FORCLIME

- Menentukan kebutuhan pelatihan para mitra FORCLIME dalam menangani masalah pengarusutamaan gender di bidang kerja mereka (khususnya Kemenhut, BAPPEDA)
- mendukung MoWE dalam pengembangan strategi pengarusutamaan gender bagi sektor kehutanan
- memulai dan menghadiri pertemuan mitra dari pemerintah (Kemenhut, WoWE) dan LSM pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.

- initiate meetings for dialogue and maintain networking with other gender experts and gender focal points at regional and national level
- identify suitable partners for conducting training responding to the identified training needs
- initiate the development of tools and check- lists which integrate gender into REDD/CBFM
- collect “successful gender- sensitive approaches and case stories in CBFM/REDD” and disseminate them to other stakeholders.
- exchange experience with gtz gender focal person in Jakarta
- memulai pertemuan untuk dialog dan memelihara jejaring dengan pakar gender dan focal point gender lainnya di tingkat daerah dan nasional
- mengidentifikasi mitra yang cocok untuk mengadakan pelatihan yang menjawab kebutuhan pelatihan yang teridentifikasi
- memulai pengembangan alat dan daftar periksa yang memadukan gender ke dalam REDD/ CBFM
- mengumpulkan “pendekatan peka gender yang berhasil dan kisah kasus dalam CBFM/REDD” dan menyebarkannya ke para pemangku kepentingan lainnya.
- bertukar pengalaman dengan focal point gender GIZ di Jakarta



LITERATURE

ADB, 2006: Country Gender Assessment Indonesia.

GTZ, 1997: Forestry and Nature Conservation. Indications for Gender Orientation

IUCN/Global Gender and Climate Alliance (GGCA): Training Manual on Gender and Climate change

IUCN/GGCA, 2006: Linking Gender and Climate Change

IUCN, 2007: Gender and climate change

Kusumanto Y./Sirait Martua: Community Participation in Forest Resources Management in Indonesia: Policies, Practices, Constraints and Opportunities

Ministry of Forestry, 2004: Ministerial Decree on Guidelines for implementing gender mainstreaming in the Forestry Department

Ministry of Forestry, 2005: Supplement to the Decree of the Minister of Forestry

Ministry of Forestry, 2007: Gender Mainstreaming in the Forestry Department

President of the Republic of Indonesia, 2000: Presidential Instruction about Gender Mainstreaming in National Development

Resurrection, B./Elmhirst, R., 2008: Gender and Natural Resource Management

Livelihoods, Mobility and Interventions

PUSTAKA

ADB, 2006: Country Gender Assessment Indonesia.

GIZ, 1997: Forestry and Nature Conservation. Indications for Gender Orientation

IUCN/Global Gender and Climate Alliance (GGCA): Training Manual on Gender and Climate change

IUCN/GGCA, 2006: Linking Gender and Climate Change

IUCN, 2007: Gender and climate change

Kusumanto Y./Sirait Martua: Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Indonesia: Kebijakan, Praktik, Kendala dan Peluang

Kementerian Kehutanan, 2004: Keputusan Menteri tentang Panduan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Departemen Kehutanan

Kementerian Kehutanan, 2005: Pelengkap Keputusan Menteri Kehutanan

Kementerian Kehutanan, 2007: Pengarusutamaan Gender di Departemen Kehutanan

Presiden Republik Indonesia, 2000: Instruksi Presiden tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

Resurrection, B./Elmhirst, R., 2008: Gender and Natural Resource Management

Livelihoods, Mobility and Interventions

Roehr, Ulrike, 2009: Gender in Climate Change Migration and Adaptation

Sirait Martua, 2009: Indigenous Peoples and Oil Palm Plantation Expansion in West Kalimantan, Indonesia

Thapa, Manish, 2005 Natural Resource Management From Gender Perspectives

UNEP, 2007: Gender Plan of Action

UN WomenWatch Women, Gender Equality and Climate Change

Roehr, Ulrike, 2009: Gender in Climate Change Migration and Adaptation

Sirait Martua, 2009: Masyarakat Adat dan Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Barat, Indonesia

Thapa, Manish, 2005 Natural Resource Management From Gender Perspectives

UNEP, 2007: Gender Plan of Action

UN WomenWatch Women, Gender Equality and Climate Change

ANNEXES

I Terms of Reference

Terms of Reference for the development of a gender concept for the Forests and Climate Program (FORCLIME) in Indonesia

Background:

Component 2 of the FORCLIME program supports government agencies at the national, provincial and district level in Kalimantan to create the necessary framework for REDD demonstration activities, and to facilitate their implementation. Pilot forest management units are developed in a participatory way, paying special attention to the traditional land use rights of surrounding communities. A gender concept is needed in order to analyse the working conditions of women and men in the forestry sector. A concept should be developed to support women and men to participate in a just and equal manner in working, decision making and benefiting from the management of the natural resources of the forests of Indonesia.

Objective of the consultancy:

Develop a gender concept for FORCLIME which is aligned with GTZ's overall gender strategy, the country gender policy¹ and contributes to the achievement of FORCLIME's overall goals and indicators.

Tasks of the consultancy:

1. Gender Analysis

Survey gender conditions under the four following aspects:

A. Country specific Analysis²

B. Sector specific

- gender specific use and interest in trees and forest plants
- impact of climate change on the living conditions of women and men and possible mitigation strategies

C. Organisation specific (institutional level)

- Assess gender competence of project staff and stakeholders of co-operating institutions.
- Assess gender and facilitation competence and availability of local NGOs to support the gender mainstreaming process (identification of possible civil society cooperation partners)

D. Target-group-specific

- Gender differentiated participation in decision-making at household and at community level (e.g. in Land Use Planning)
- Access to and control over natural resources
- Division of labour, specifically in the forestry area, etc.

1 Relevant documents: GTZ Genderstrategie 2010 – 2014, BMZ Gender Concept, GTZ Gender Steps for Action, Indonesian National Action Plan

2 For the country gender analysis the consultant could refer to existing analysis by e.g. ADB/World Bank and others

2. Concept Development

- Based on the analysis identify entry points for gender mainstreaming and women's empowerment in line with FORCLIMES goals and indicators
- Hold a workshop for FORCLIME staff, stakeholders, counterparts and decision-makers to present results and to receive feedback.
- Conduct a training workshop together with a co-moderator for local evaluators/facilitators in participatory rapid appraisal methods.
- Write a comprehensive report outlining FORCLIMES gender concepts based on the gender analysis and workshop results
- Integrate the gender concept into the existing results chain of FORCLIME. Review existing gender indicators of the FORCLIME offer and assess their quality. Recommend further indicators if needed (as basis for monitoring on gender results)

3. Results and outputs of the assignment:

- a local team of evaluators/facilitators is set up and receives basic training in gender issues and participatory rapid appraisal methods.
- results from the rapid appraisal of gender-specific roles and needs in CBFM and mitigation of climate change in one pilot district are available
- gender competence of different stakeholders and local NGOs is assessed
- workshop for stakeholders, counterparts and decision-makers is conducted
- report with results from the field appraisal and competence assessment including recommendations for better integrating gender issues into all aspects of project planning
- recommend how to harmonize/integrate the FORCLIME activities into the general gender activities of GTZ as well as in the partner national action plan.

II List of institutions and of people consulted

Jakarta:

- Barbara Lang, Project Manager FORCLIME, component 1
- Helmut Dotzauer, Project Manager FORCLIME, component 2
- Heinz Terhorst, Project Manager Heart of Borneo, FORCLIME, component 3
- Jasmin Freischlad, Team Leader, Good Governance in Population Administration gtz Gender Focal Person
- Georgia Wimhöfer, Team Leader, Strengthening Women's Rights (SWR) a GTZ supported project assisting the State Ministry of Women Empowerment and Children Protection
- Ibu Hartian Silawati, Senior Advisor, Strengthening Women's Rights (SWR) a GTZ supported project assisting the State Ministry of Women Empowerment and Children Protection
- Ibu Rahayu Riana, State Ministry of Forestry Head of Evaluation Unit, Planning Bureau, Secretariat of Gender working group in the MoFor

Samarinda:

Participants of Focus Group Discussion on 22.10.10:

- Mahrita, Women Empowerment Services
- Anom, Forestry Services
- Catur, Working Group REDD
- Hendra, Kawal Borneo Community Foundation
- Riawati, Environmental Services, Chief of subdivision
- Indah, Environmental Services, staff members
- Emina, lecturer, author, researcher at Mulawarman University, Samarinda

BAPPEDA, Samarinda:

- Syafrian, Head of Human Development Division
- Mona, Head of Sub-Division Social and Human Development

Putusibau:

- Participants of Focus Group Discussion on 01.11.10
- Maryati, Women Services Office
- John, Betung Kerihung National Park
- Guntur Prahara, Statistical Bureau
- Andi, Flora Fauna International
- Eko Darmawan, Flora Fauna International
- Johanis, District Forest Services

Menua Sadap

About 10 adult men and 20 adult women

III Members of the Gender Research Team

- Anom Rahayu Asmara Trisna (Province of Forest Services – East Kalimantan)
- Emina Nursita (Forestry Faculty of Mulawarman University)
- Hery Gunawan (Kayan Mentarang National Park – East Kalimantan)
- Heru Herlambang (Center of Social Forestry – Mulawarman University)
- Niken Wuri Handayani (Natural Resources and Conservation Agency – West Kalimantan)
- Reski Udayanti (Environment Education Networking – East Kalimantan)
- Dona Dorina (Germany Development Service – Putusibau)
- Indah Eliana (Provincial Environmental Services, Samarinda, East Kalimantan)

IV Training schedule and Tools for Participatory Gender Analysis in Forest and Natural Resources Management

Monday, 25.10.	Tuesday, 26.10.	Wednesday, 27.10.	Thursday, 28.10.	Friday, 29.10.
Opening Participants introduction/ expectation Framework of the Participatory Gender Analysis Introduction to gender concept and gender analysis Tool1: Profile of division of labour	Recap Principles of participatory rapid appraisal Tool 2: Access to and control over land and natural resources Tool 3: Gender and age-specific utilization of natural resources	Recap Tool 4: Profile of decision making on household level Tool 5: Participation in public meetings	Recap Tool 6: Education, Health, Migration Preparation of field trip Planning steps of the work in the village Preparation of material	Preparation of field trip continued Departure to Balikpapan

Tool1: Profile of division of labour

Activities	Involvement/ work share			
	Women		Men	
	Girls	Women	Boys	Men
Productive activities related to forest management and natural resources: Cutting trees for houses Cutting trees for firewood Collecting medicine plants Collecting palm leaves for weaving Collecting rubber Collecting seeds Collecting essence Collecting rattan Honey bee collection Hunting Catching birds Harvesting sago Clearing land Plowing the rice field Preparing rice seedlings Planting seedlings Weeding Harvesting Threshing Planting cassava Raising pigs Raising chickens Fishing Handicrafts Marketing Rattan Rice Cassava Animals				
Task for group work: Identify productive, reproductive and social activities performed in your village. Write the activities under the respective headings in the vertical axis. Assess how young and old women and young and old men are involved in each activity. Enter crosses into the respective box to indicate the degree of involvement XXX= high involvement, XX= fair involvement, X= little involvement Draw conclusions with regard to female and male work loads.				
Reproductive Activities Carrying water Gathering fire wood Cooking Cleaning Washing dishes Washing clothes Care giver for children Care giver for old people Care giver for sick people				
Social activities Religious activities Self-help programmes Credit unions Farmers groups Womens production groups Others				

Tool 2: Access to and control over natural resources

Guideline for semi- structured interviews

1. Which law rules the ownership of land and natural resources? Adat law? Modern law?
2. What does the law look like?
3. Who owns the forest?
4. Can women own forest land? How?
5. Which trees/forest resources are for women?
6. Which trees/forest resources are for men?
- 6a. Who makes the decision to cut trees for clearing new farming land?
- 6b. Who makes the decision to cut trees for the construction of houses?
- 6c. Who makes the decision to cut trees for firewood?
7. Are women involved in these decisions? How?
8. Do women have to ask permission if they want to collect rattan or other natural resources from the forest? Whom do they ask?
9. Are there any restrictions in using forest and natural resources?
10. What happens if the restrictions are not followed? (for example, illegal logging)
11. Who owns the farm land?
12. How is farm land inherited? Can women inherit farm land?
13. Who owns more farm land? Women or men?
14. How do women get access to farm land?
15. What happens if the husband dies or there is a divorce?
16. Is everybody happy with the regulation?
17. What should be changed?

Tool 3: Gender and age-specific utilization of natural resources

Divide the group into 4 sub-groups: young women, adult women, young men, adult men.

Each group should be facilitated by two research team members, one asking questions, one writing cards.

Tasks for group work

1. Forest or natural resources are most important for you?
Select the five most important resources, please.
2. Why are these resources so important for you?
What are you doing with these resources?

3. Have you seen any changes in the availability and quality of these resources?
4. How do you cope with the changes?
5. What should be done to prevent further degradation of the resources?

Each sub-group presents the results in the plenary.

Draw conclusions:

Which needs are similar for all groups?

Which needs are specific?

What do we learn for planning resources?

How can we assure that all needs are considered in Land Use Planning?

Questions	Answers of young women	Answers for old women	Answers of young men	Answers of old women
1. Forest or natural resources are most important for you? Select the five most important resources, please				
2. Why are these resources so important for you? What are you doing with these resources?				
3. Have you seen any changes in the availability and quality of these resources?				
4. How do you cope with the changes?				
5. What should be done to prevent further degradation of the resources?				

Tool 4: Decision making on household level

Decisions to be made	Men decide alone without consulting women	Men decide with consultation	Men and women decide together	Women decide with consultation	Women decide alone
Farming activities					
Clearing new fields					
Cutting trees					
Planting trees and shrubs					
Education of children					
Health issues					
Selling farm or forest produce					
Earning other additional income					
Spending money on food					
Spending money on cigarettes					
Spending money on household items					
Spending money on long term items					

Tool 5: Participation in public meetings (Land Use Planning Meetings)

Guideline for semi-structured interviews

1. What type of village meetings or community groups do you have?
(note down all answers)
2. Which meetings or groups do women like most?
3. Which meetings/groups are only for women?
4. Which meetings/groups are only for men?
5. Who invites participants to the Land Use Meetings?
6. Is everyone invited? Who is selected? What are the criteria for selection?

7. Who usually attends the Land Use Planning Meeting? (Number of men: women, young men, young women)
8. Why do only a few women attend?/ Why do women not attend?
9. If they attend, where do they sit?
10. Do women talk freely in the public meeting?
11. Are women invited to give contributions during the meeting?
12. Are women's proposals respected and supported by men?
13. Who makes the final decision?
14. Are you satisfied with the way the Land Use planning meetings are conducted?
15. What would you like to change?
16. Do you think it is important that women participate in Land Use meetings?
17. What could be done so that more women participate actively?

Tool 5 continued : Quality of participation (Observation)

Activity	Men			Women		
	Always	Sometimes	Never	Always	sometimes	Never
Attending meetings silently						
Chairing the meeting						
Asking questions						
Contributing arguments						
Interrupting						
Making decisions						
Writing minutes						
Preparing food						
Yawning/sleeping						
Laughing						

Please insert one check for men and one check for women in each line.

Discuss with the plenary:

What do we see ?

Why is it like that?

Should we change something?

How can it be changed?

What is the first step?

Tool 6: Interview Guideline to assess the Education, Health, Migration

Education

1. When was the school opened? Which grades are taught?
2. How many teachers work here?
3. How long have you worked here?
4. How many pupils are currently in the school?

Grades	No of Female pupils	No of Male pupils
1		
2		
3		
4		

5. How do boys perform at school? How do girls perform at school?
6. Do you perceive any changes in the attendance of girls and boys when you compare it to previous years? Which changes?
7. Where do children go for higher education?
8. Do you have any statistics about girls and boys in higher education?
9. Do you face any problems in the school? Which?

Health

- a). Do you have any problems related to health? Which?
- b). Health problems of children:
- c). Is there ante natal programme before delivery?
- d). Health problems of women
- e). Where do women deliver their babies?
- f). Health problems of men
- g). Do you have a health post in Menua Sadap?
- h). How far is the next health post?
- i). How many people work at the health post?
- j). Do you have any problems with the health post?
- k). What could be done about it?

Migration

- A. Do many people of the village work outside?
- B. Where do men go and what work do they do?
- C. Where do women go and what work do they do?
- D. How do they find work outside the village?
- E. Do many people marry outside? More men or more women?
- F. Do they come back to the village?
- G. What do they do when they come back? (Examples)
- H. Do you see any problem in migration? What problems?
- I. What could be done about it?

LAMPIRAN

I Kerangka Acuan Kerja

Kerangka Acuan Kerja untuk pengembangan konsep gender bagi Program Hutan dan Iklim (FORCLIME) di Indonesia

Latar belakang:

Komponen 2 dari program FORCLIME mendukung instansi pemerintah tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten di Kalimantan untuk menciptakan kerangka kerja yang perlu bagi kegiatan demonstrasi REDD, dan memfasilitasi pelaksanaannya. Satuan pengelolaan hutan percontohan dikembangkan secara partisipatif, dengan memberikan perhatian khusus kepada hak tata guna lahan tradisional masyarakat sekitar hutan. Konsep gender diperlukan guna menganalisis kondisi kerja perempuan dan laki-laki di sektor kehutanan. Konsep harus dikembangkan untuk mendukung perempuan dan laki-laki agar berperan serta secara adil dan setara dalam bekerja, mengambil putusan, dan menarik manfaat dari pengelolaan sumber daya alam hutan Indonesia.

Tujuan konsultasi:

Mengembangkan konsep gender untuk FORCLIME yang diselaraskan dengan strategi gender keseluruhan GIZ dan kebijakan gender negara, serta berkontribusi pada pencapaian sasaran dan indikator keseluruhan FORCLIME.¹

Tugas konsultasi:

1. Analisis Gender

Survei kondisi gender menurut keempat aspek berikut:

- A. Analisis khusus negara²
- B. Khusus sektor
 - penggunaan dan minat khusus gender pada pohon dan tumbuhan hutan
 - dampak perubahan iklim pada kondisi kehidupan perempuan dan laki-laki serta strategi penanggulangan yang mungkin
- C. Khusus organisasi (tingkat kelembagaan)
 - Mengkaji kecakapan gender dari staf proyek dan pemangku kepentingan lembaga yang bekerjasama.
 - Mengkaji kecakapan gender dan fasilitasi serta ketersediaan LSM setempat untuk mendukung proses pengarusutamaan gender (identifikasi mitra kerjasama masyarakat madani yang mungkin)
- D. Khusus kelompok sasaran
 - Peran serta yang dibedakan menurut gender dalam pembuatan putusan di tingkat rumah tangga dan masyarakat (misalnya, dalam Perencanaan Tata Guna Lahan)
 - Akses ke dan kontrol atas sumber daya alam
 - Pembagian kerja, khususnya di bidang kehutanan, dll.

1 Dokumen terkait: GIZ Genderstrategie 2010 – 2014, BMZ Gender Concept, GIZ Gender Steps for Action, Indonesian National Action Plan)

2 Untuk analisis gender negara, konsultan dapat merujuk ke analisis yang ada oleh misalnya ADB/Bank Dunia dan lain-lain

2. Pengembangan Konsep

- Berdasarkan analisis, identifikasi titik masuk untuk pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan sejalan dengan sasaran dan indikator FORCLIME
- Menyelenggarakan lokakarya staf FORCLIME, pemangku kepentingan, mitra dan pembuat putusan guna memaparkan hasil dan menerima umpan balik.
- Menyelenggarakan lokakarya pelatihan bersama co-moderator untuk evaluator/fasilitator lokal dalam metode penilaian cepat partisipatif.
- Menulis laporan menyeluruh yang merangkum konsep gender FORCLIME berdasarkan analisis gender dan hasil lokakarya
- Memadukan konsep gender ke dalam rantai hasil FORCLIME yang ada. Meninjau indikator gender FORCLIME yang ada, dan kaji mutunya. Menyarankan indikator lebih lanjut jika diperlukan (sebagai basis untuk pemantauan hasil gender)

3. Hasil dan keluaran penugasan:

- Tim evaluator/fasilitator lokal disiapkan dan menerima pelatihan dasar dalam masalah gender dan metode penilaian cepat partisipatif.
- hasil dari penilaian cepat peran dan kebutuhan khusus gender dalam CBFM dan penanggulangan perubahan iklim di satu kabupaten percontohan tersedia
- kecakapan gender berbagai pemangku kepentingan dan LSM lokal dikaji
- lokakarya untuk pemangku kepentingan, mitra, dan pembuat putusan diadakan
- laporan dengan hasil dari penilaian lapangan dan pengkajian kecakapan mencakup saran untuk lebih memadukan masalah gender ke dalam segenap aspek perencanaan proyek
- menyarankan cara menyelaraskan/memadukan kegiatan FORCLIME ke dalam kegiatan gender umum GIZ serta dalam rencana tindakan nasional mitra.

II Daftar lembaga dan orang yang dimintai pendapat

Jakarta:

- Barbara Lang, Team Leader Proyek FORCLIME, komponen 1
- Helmut Dotzauer, Team Leader Proyek FORCLIME, komponen 2
- Heinz Terhorst, Team Leader Proyek Heart of Borneo, FORCLIME, komponen 3
- Jasmin Freischlad, Pemimpin Tim, Tata Kelola yang Baik dalam Administrasi Penduduk, Focal point Gender GIZ
- Georgia Wimhöfer, GIZ - Team Leader, Strengthening Women's Rights (SWR), proyek GTZ yang mendukung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Hartian Silawati, GIZ – Senior Advisor, Strengthening Women's Rights (SWR), proyek GTZ yang mendukung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Rahayu Riana, Kementerian Kehutanan, Kepala Unit Evaluasi, Biro Perencanaan, Sekretariat Kelompok Kerja Gender di Kemenhut

Samarinda:

(Peserta Diskusi Kelompok Fokus pada tanggal 22 Oktober 2010):

- Mahrita, Dinas Pemberdayaan Perempuan
- Anom Rahayu Asmara Trisna, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
- Dyah Catur, Kelompok Kerja REDD Kalimantan Timur
- Hendra, Kawal Borneo Community Foundation
- Riawati, Badan Lingkungan Hidup Kalimantan Timur, kepala subdivisi
- Indah Eliana, Badan Lingkungan Hidup Kalimantan Timur, anggota staf
- Emina Nursita, dosen, pengarang, peneliti pada Universitas Mulawarman,

BAPPEDA, Samarinda:

- Syafrian, Kepala Divisi Pengembangan SDM
- Mona, Kepala Subdivisi Sosial dan Pengembangan SDM

Putusibau

- (Peserta Diskusi Kelompok Fokus pada tanggal 1 November 2010):
- Maryati, Kantor Dinas Perempuan
- John, Taman Nasional Betung Kerihung
- Guntur Prahara, Biro Pusat Statistik
- Andi, Flora Fauna International
- Eko Darmawan, Flora Fauna International
- Johanis, Dinas Kehutanan Kabupaten

Menua Sadap:

Sekitar 10 laki-laki dewasa dan 20 perempuan dewasa

III Anggota Tim Penelitian Gender

- Anom Rahayu Asmara Trisna (Dinas Kehutanan Provinsi – Kalimantan Timur)
- Emina Nursita (Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman)
- Hery Gunawan (Taman Nasional Kayan Mentarang – Kalimantan Timur)
- Heru Herlambang (UPT Perhutanan Sosial – Universitas Mulawarman)
- Niken Wuri Handayani (Balai Sumber Daya dan Konservasi Alam – Kalimantan Barat)
- Reski Udayanti (Jaringan Pendidikan Lingkungan – Kalimantan Timur)
- Dona Dorina (DED Jerman – Putussibau)
- Indah Eliana (Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur)

IV Jadwal pelatihan dan Alat untuk Analisis Gender Partisipatif dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Alam

Senin, 25.10.	Selasa, 26.10.	Rabu, 27.10.	Kamis, 28.10.	Jumat, 29.10.
Pembukaan Pengenalan peserta/ harapan Kerangka Kerja Analisis Gender Partisipatif Pengantar ke konsep gender dan analisis gender Alat 1: Profil pembagian tenaga kerja	Rangkum ulang Prinsip penilaian cepat partisipatif Alat 2: Akses ke dan kontrol atas sumber daya tanah dan alam Alat 3: Penggunaan sumber daya alam menurut gender dan umur	Rangkum ulang Alat 4: Profil pengambilan putusan pada tingkat rumah tangga Alat 5: Peran serta dalam rapat umum	Rangkum ulang Alat 6: Pendidikan, Kesehatan, Migrasi Persiapan kunjungan lapangan Perencanaan langkah kerja di desa Persiapan bahan	Persiapan kunjungan lapangan (lanjutan) Berangkat ke Balikpapan

Alat 1: Profil pembagian tenaga kerja

Kegiatan	Pelibatan/berbagi kerja			
	Perempuan		Laki-laki	
	Gadis	Perempuan	Pemuda	Laki-laki
Kegiatan produktif yang terkait dengan pengelolaan sumber daya hutan dan alam: Menebang pohon untuk rumah Menebang pohon untuk kayu bakar Mengumpulkan tumbuhan obat Mengumpulkan daun nyiur untuk ditenun Menyadap karet Mengumpulkan biji-bijian Mengumpulkan minyak tumbuhan Mengumpulkan rotan Mengumpulkan madu lebah Berburu Menangkap burung Memanen sagu Membuka lahan Membajak sawah Menyiapkan benih padi Menanam padi Menyiangi rumput Memanen Memipil Menanam singkong Beternak babi Beternak ayam Memancing Kerajinan tangan Memasarkan Rotan Beras Singkong Ternak				
Tugas untuk kelompok kerja: Mengidentifikasi kegiatan produktif, reproduktif, dan sosial yang dilakukan di desa. Menulis kegiatan di bawah masing-masing tajuk pada sumbu vertikal. Mengkaji cara perempuan muda dan tua serta laki-laki muda dan tua terlibat dalam setiap kegiatan. Masukkan tanda silang ke masing-masing kotak untuk menunjukkan derajat keterlibatan XXX= keterlibatan tinggi, XX= keterlibatan sedang, X = keterlibatan kecil Mengambil simpulan mengenai beban kerja perempuan dan laki-laki.				
Kegiatan Reproduksi Mengambil air Mengumpulkan kayu bakar Memasak Membersihkan Mencuci piring Mencuci pakaian Mengasuh anak-anak Merawat orang lanjut usia Merawat orang sakit				
Kegiatan sosial Kegiatan agama Program swabantu Koperasi simpan pinjam Kelompok petani Kelompok produksi perempuan Lainnya				

Alat 2: Akses ke dan kontrol atas sumber daya alam

Pedoman untuk wawancara semi-terstruktur

1. Hukum manakah yang mengatur kepemilikan sumber daya tanah dan alam? Hukum adat? Hukum moderen?
2. Seperti apakah hukum itu?
3. Siapakah yang memiliki hutan?
4. Dapatkah perempuan memiliki tanah hutan? Bagaimanakah caranya?
5. Pohon/sumber daya hutan manakah yang untuk perempuan?
6. Pohon/sumber daya hutan manakah yang untuk laki-laki?
- 6a. Siapakah yang membuat putusan untuk menebang pohon guna membuka lahan bertani baru?
- 6b. Siapakah yang membuat putusan untuk menebang pohon bagi pembangunan rumah?
- 6c. Siapakah yang membuat putusan untuk menebang pohon untuk kayu bakar?
7. Apakah perempuan terlibat dalam putusan ini? Bagaimanakah caranya?
8. Apakah perempuan harus meminta izin jika ingin mengumpulkan rotan atau sumber daya alam lainnya dari hutan? Kepada siapakah mereka meminta?
9. Adakah pembatasan dalam menggunakan sumber daya hutan dan alam?
10. Apakah yang terjadi jika pembatasan tidak ditaati? (misalnya, pembalakan liar)
11. Siapakah yang memiliki lahan pertanian?
12. Bagaimanakah lahan pertanian diwarisi? Dapatkah perempuan mewarisi lahan pertanian?
13. Siapakah yang memiliki lahan pertanian lebih banyak? Perempuan atau laki-laki?
14. Bagaimanakah perempuan memperoleh akses ke lahan pertanian?
15. Apakah yang terjadi jika suami meninggal dunia atau terjadi perceraian?
16. Apakah setiap orang senang dengan peraturan itu?
17. Apakah yang harus diubah?

Alat 3: Penggunaan sumber daya alam menurut gender dan umur

Bagi kelompok menjadi 4 subkelompok: perempuan muda, perempuan dewasa, laki-laki muda, laki-laki dewasa.

Setiap kelompok harus difasilitasi oleh dua anggota tim penelitian, yang satu mengajukan pertanyaan, yang lain menulis kartu.

Tugas-tugas untuk kelompok kerja

1. Sumber daya hutan atau alam apakah yang paling penting bagi Anda?
Pilihlah lima sumber daya terpenting.
2. Mengapa semua sumber daya itu demikian penting bagi Anda?
Apakah yang Anda lakukan terhadap semua sumber daya itu?
3. Pernahkan Anda melihat perubahan apa pun dalam ketersediaan dan mutu sumber-sumber daya itu?
4. Bagaimanakah cara Anda menghadapi perubahan?
5. Apakah yang harus dilakukan untuk mencegah pemerosotan lebih jauh sumber daya tersebut?
Setiap subkelompok memaparkan hasil dalam pleno.

Ambil simpulan:

Kebutuhan manakah yang serupa bagi semua kelompok?

Kebutuhan manakah yang khusus?

Apakah yang kita pelajari untuk perencanaan sumber daya?

Bagaimanakah cara kita memastikan bahwa semua kebutuhan dipertimbangkan dalam Perencanaan Tata Guna Lahan?

Pertanyaan	Jawaban perempuan muda	Jawaban perempuan tua	Jawaban laki-laki muda	Jawaban perempuan tua
1. Sumber daya hutan atau alam apakah yang paling penting bagi Anda? Pilihlah lima sumber daya terpenting.				
2. Mengapa semua sumber daya itu demikian penting bagi Anda? Apakah yang Anda lakukan terhadap semua sumber daya itu?				
3. Pernahkan Anda melihat perubahan apa pun dalam ketersediaan dan mutu sumber-sumber daya itu?				
4. Bagaimanakah cara Anda menghadapi perubahan?				
5. Apakah yang harus dilakukan untuk mencegah pemerosotan lebih jauh sumber daya tersebut?				

Alat 4: Pengambilan putusan pada tingkat rumah tangga

Putusan yang harus dibuat	Laki-laki memutuskan sendiri tanpa berkonsultasi dengan perempuan	Laki-laki memutuskan dengan konsultasi	Laki-laki dan perempuan memutuskan bersama	Perempuan memutuskan dengan konsultasi	Perempuan memutuskan sendiri
Kegiatan bertani					
Pembukaan lahan baru					
Menebang pohon					
Menanam pohon dan semak					
Pendidikan anak-anak					
Masalah kesehatan					
Menjual hasil pertanian atau hutan					
Mencari pendapatan tambahan lain					
Membelanjakan uang untuk makanan					
Membelanjakan uang untuk rokok					
Membelanjakan uang untuk barang rumah tangga					
Membelanjakan uang untuk barang berumur panjang					

Alat 5: Peran serta di rapat umum (Rapat Perencanaan Tata Guna Lahan)

Pedoman untuk wawancara semi-terstruktur

1. Jenis rapat desa atau kelompok masyarakat apakah yang Anda miliki? (catat semua jawaban)
2. Rapat atau kelompok manakah yang paling disukai perempuan?
3. Rapat/kelompok manakah yang khusus untuk perempuan?
4. Rapat/kelompok manakah yang khusus untuk laki-laki?
5. Siapakah yang mengundang peserta ke Rapat Tata Guna Lahan?
6. Apakah setiap orang diundang? Siapakah yang dipilih? Apakah kriteria pemilihannya?
7. Siapakah yang biasanya menghadiri Rapat Perencanaan Tata Guna Lahan? (Jumlah laki-laki: perempuan, muda laki-laki, muda perempuan)

8. Mengapa hanya segelintir perempuan yang hadir?/ Mengapa perempuan tidak hadir?
9. Jika menghadiri, di manakah perempuan duduk?
10. Apakah perempuan berbicara dengan bebas dalam rapat umum?
11. Apakah perempuan diundang untuk memberikan pendapat selama rapat?
12. Apakah usul dari perempuan dihormati dan didukung oleh laki-laki?
13. Siapa yang membuat putusan akhir?
14. Puaskah Anda dengan cara penyelenggaraan Rapat Perencanaan Tata Guna Lahan?
15. Apakah yang ingin Anda ubah?
16. Menurut Anda, pentingkah bahwa perempuan berperan serta dalam Rapat Tata Guna Lahan?
17. Apakah yang dapat dilakukan agar lebih banyak perempuan berperan serta secara aktif?

Alat 5 (lanjutan): Mutu peran serta (Pengamatan)

Kegiatan	Laki-laki			Perempuan		
	Selalu	Kadang-kadang	Tidak pernah	Selalu	Kadang-kadang	Tidak pernah
Menghadiri rapat dengan diam-diam						
Mengetuai rapat						
Mengajukan pertanyaan						
Menyumbangkan pendapat						
Menyela						
Membuat putusan						
Menulis risalah						
Menyiapkan makanan						
Mengantuk/tidur						
Tertawa						

Masukkan satu centang untuk laki-laki dan satu centang untuk perempuan di setiap baris.

Bahas dalam pleno:

Apakah yang kita lihat?

Mengapa seperti itu?

Haruskah kita mengubah sesuatu?

Bagaimanakah hal itu dapat diubah?

Apakah langkah pertamanya?

Alat 6: Pedoman Wawancara untuk mengkaji Pendidikan, Kesehatan, Migrasi

Pendidikan

1. Kapanakah sekolah dibuka? Kelas berapakah yang diajarkan?
2. Berapa banyakkah guru yang bekerja di sini?
3. Berapa lamakah Anda telah bekerja di sini?
4. Berapa banyakkah murid di sekolah saat ini?

Kelas	Jumlah murid perempuan	Jumlah murid laki-laki
1		
2		
3		
4		

5. Bagaimanakah prestasi anak laki-laki di sekolah? Bagaimanakah prestasi anak perempuan di sekolah?
6. Apakah Anda mengesani perubahan apa pun dalam kehadiran anak laki-laki dan perempuan saat Anda membandingkannya dengan tahun sebelumnya? Apakah perubahannya?
7. Ke manakah anak-anak pergi untuk pendidikan yang lebih tinggi?
8. Apakah Anda memiliki statistik tentang anak perempuan dan laki-laki di pendidikan yang lebih tinggi?
9. Apakah Anda menghadapi masalah di sekolah? Yakni?

Kesehatan

- a). Apakah Anda memiliki masalah apa pun yang terkait dengan kesehatan? Yakni?
- b). Masalah kesehatan anak-anak:
- c). Adakah program pra-kelahiran sebelum persalinan?
- d). Masalah kesehatan perempuan
- e). Di manakah para perempuan melakukan persalinan?
- f). Masalah kesehatan laki-laki
- g). Adakah pos kesehatan di Menua Sadap?
- h). Seberapa jauhkah pos kesehatan berikutnya?
- i). Berapa banyakkah orang yang bekerja di pos kesehatan?
- j). Adakah masalah dengan pos kesehatan?
- k). Apakah yang dilakukan terhadapnya?

Migrasi

- A. Berapa banyakkah warga desa yang bekerja di luar?
- B. Ke manakah para laki-laki pergi bekerja dan apakah yang mereka lakukan?
- C. Ke manakah para perempuan pergi bekerja dan apakah yang mereka lakukan?
- D. Bagaimanakah cara mereka mendapat pekerjaan di luar desa?
- E. Banyakkah orang yang menikah di luar desa? Lebih banyak laki-laki atau perempuan?
- F. Apakah mereka kembali ke desa setelah menikah?
- G. Apakah yang mereka kerjakan ketika kembali? (Contoh)
- H. Apakah Anda melihat ada masalah dalam migrasi? Apakah masalahnya?
- I. Apakah yang dilakukan terhadapnya?

Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Forests and Climate Change (FORCLIME)
Manggala Wanabakti, Bl. VII, Fl. 6
Jl. Jend. Gatot Subroto
Jakarta 10270 Indonesia
Tel: +62 (0)21 5720214
www.forclime.org